KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2022

MUNTOK TAHUN 2021

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2022

MUNTOK TAHUN 2021

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH **5**

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 5

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 12

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD **20**

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 20

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 21

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH **26**

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2021 26

4.2 Target Pendapatan Daerah 37

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH **40**

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja 40

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga 41

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH **58**

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 59

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 60

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN **61**

BAB VIII PENUTUP **64**

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Struktur APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021.....	7
Tabel 2.2.	Perkembangan Alokasi Belanja Langsung Terhadap Alokasi Belanja Daerah.....	17
Tabel 2.3.	Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	19
Tabel 3.1.	Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022	21
Tabel 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persentase)	22
Tabel 3.3.	Produk Domestik Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat 2016 – 2020	24
Tabel 4.1.1	Perkembangan Penerimaan PAD Dana APBD Kabupaten Bangka Barat 2017-2021	27
Tabel 4.1.2	Target PAD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022	28
Tabel 4.2.	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	38
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	58

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun anggaran. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai dokumen yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan yang diambil oleh Pemerintah Daerah adalah untuk mendukung tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan memberikan kerangka kebijakan manajemen keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya memuat kebijakan umum keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 yang menjadi

pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran pada program dan kegiatan berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daera, serta .Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan infomasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi yang diperkuat dengan terbitnya surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sejalan dengan berjalannya waktu dengan mempertimbangkan dinamika dan menjawab permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan RAPBD, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun asumsi dasar anggaran yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2022;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
5. Mejamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020

Dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, maka secara umum kondisi ekonomi daerah dapat digambarkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai *output* akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang merupakan gambaran kinerja makro dari pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi.

a. Pertumbuhan ekonomi

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit bagi perekonomian dunia dengan munculnya pandemi *Covid-19*, termasuk Indonesia. Kebijakan pencegahan yang diambil guna mengurangi penyebaran *Covid-19* seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah sangat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Kebijakan *Lockdown* serta pengalihan prioritas kebutuhan dunia dimana dengan kondisi pandemi tersebut lebih diutamakan pada bidang kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan covid 19, sehingga beberapa negara juga sangat mempengaruhi kebijakan ekspor produk dari Indonesia yang juga sangat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 yang terkontraksi sebesar -2,07 persen, dengan pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2020 sebesar -2,19 persen (year on year). Realisasi tersebut sangat mendekati proyeksi Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi 2020 berada

di angka -2,0 persen, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021. Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 56,94 juta dari sebelumnya Rp 59,06 juta di 2019 atau turun dari USD 4.174 per kapita menjadi USD 3.912 per kapita. Status Indonesia dari Upper Middle Income yang tercermin dari Gross National Income (GNI) per capita sebesar USD 4.047,6 di 2019, diperkirakan akan turun menjadi Lower Middle Income dengan GNI per capita sebesar USD 3.806,4 di 2022.

Deselerasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020, memberikan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, yang pertumbuhan ekonominya negatif (resesi) sebesar 5,43 persen. hal tersebut terjadi karena sektor utama penggerak ekonomi di Kabupaten Bangka Barat adalah sektor industri pengolahan yaitu logam timah serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan khususnya sub sektor perkebunan tahunan sebagai bahan baku pada sektor industri pengolahan yang memiliki dampak sangat besar pengaruh oleh lingkungan eksternal akibat pandemi Covid-19 ini.

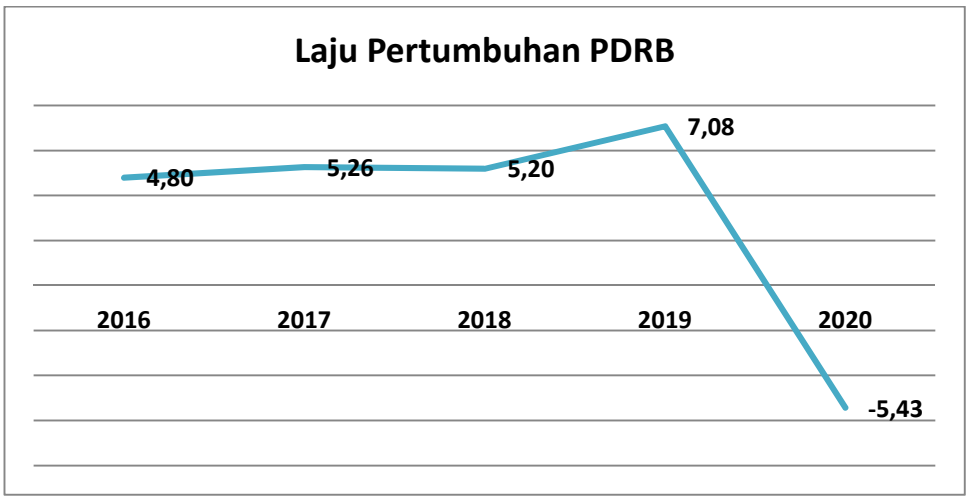

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021
Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

b. PDRB perkapita

Untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran penduduk serta tingkat pembangunan di suatu wilayah, salah satu indikator yang sering digunakan adalah PDRB perkapita. Senada dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang tumbuh sebesar negatif 5,43 persen, PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 juga tumbuh sebesar negatif 7,17 persen.

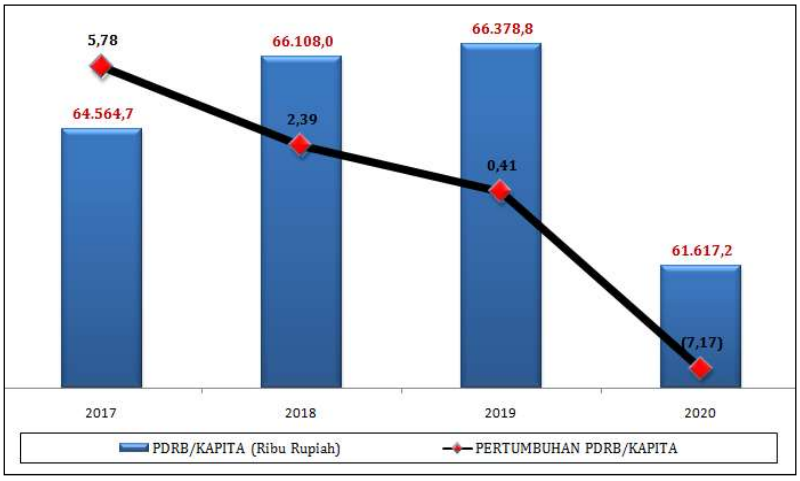

Sumber : RKPD Kabupaten Bangka Barat TAhun 2022

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020

Sebelum tahun 2020, Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat (ADHB) selalu mengalami peningkatan (2015 – 2019) dimana pada tahun 2015 Nilai PDRB per kapita sebesar 58,36 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 mencapai 66,37 juta rupiah, walaupun jika dilihat dari tingkat laju pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan. Namun nominal terhadap PDRB perkapita di Tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif seperti terlihat pada gambar 2.2 diatas.

2.1.2 Kebijakan Ekonomi Nasional

Berkaca dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen akibat pandemi Covid-19, Produk Domestik Bruto Indonesia diharapkan akan kembali tumbuh di Tahun 2021 dan di Tahun 2022. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, khususnya penanganan pandemi Covid-19 yaitu rencana pelaksanaan vaksinasi ke seluruh masyarakat secara bertahap yang diharapkan mampu mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi seperti sedia kala serta kondisi perekonomian dan keuangan global yang turut membaik.

Pada tahun 2021 serta rencana tahun 2022 Pemerintah masih akan memfokuskan belanja yang berkaitan secara langsung dengan pemulihan ekonomi. Diharapkan pelaksanaan pembangunan di Tahun 2021 dapat melakukan *recovery* perekonomian yang terpuruk di Tahun 2020 sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2022 mampu kembali normal, dengan asumsi bahwa ekonomi akan dibuka kembali secara bertahap dan stabil serta konsumsi swasta diperkirakan pulih lebih cepat, diikuti oleh investor di sektor swasta. PDB rill diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,8 persen pada Tahun 2021 yang ditunjang oleh pemulihan konsumsi swasta, serta PDB rill diproyeksikan tumbuh 6,0 persen pada Tahun 2022 karena pertumbuhan investasi yang tinggi dan rendahnya basis PDB (*base effect*) di tahun-tahun sebelumnya.

Namun perlu dicermati pula, mengingat adanya kebutuhan pengeluaran dan pada saat yang sama pemerintah harus melandaikan ‘kurva utang’, kebijakan stimulus fiskal perlu secara bertahap dikurangi seiring dengan perlunya peningkatan penerimaan. Data Kementerian Keuangan terkait kebijakan *countercyclical*, Defisit APBN Tahun 2020 pada kisaran 6,34 persen PDB, dan Defisit APBN Tahun 2021 pada kisaran 5,70 persen PDB. Jika tidak terdapat reformasi dalam kebijakan peningkatan penerimaan, pada akhirnya biaya utang akan berdampak pada belanja prioritas pembangunan.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi di Tahun 2021 dengan mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, Indonesia harus memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan. Penanganan Covid-19 perlu difokuskan pada upaya untuk menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 melalui kerja sama antara berbagai pihak yakni masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, meningkatkan jumlah testing dan tracing di seluruh daerah sehingga menurunkan positivity rate dan menurunkan angka reproduksi virus, serta melaksanakan vaksinasi sesuai sasaran yang ditetapkan.“Pemulihan ekonomi perlu difokuskan untuk melakukan implementasi program pemulihan ekonomi secara tepat dan terukur, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor sehingga dapat melakukan aktivitas ekonomi, melakukan reformasi sistem kesehatan, sistem perlindungan sosial, dan sistem kebencanaan, serta mengembalikan jam kerja pada sektor industri dan pariwisata selagi mendorong investasi padat karya.

Dilanjutkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 merupakan tahun kunci terkait pemulihan ekonomi Indonesia yang harus lebih cepat, khususnya dari investasi, eksport, serta industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi COVID-19 akan mengalami akselerasi. Strategi penerapan Reformasi Struktural diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing dengan gambaran kebutuhan investasi di tahun 2022 sebesar 5.891,4 - 5.931,8 Triliun Rupiah baik berasal dari Investasi Pemerintah, Investasi BUMD, serta Investasi Swasta.

Dalam penerapan tema pembangunan nasional di Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, ditetapkanlah sasaran dan target yang harus dicapai antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 - 6 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,00 – 4,00 persen;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 - 9 persen; IPM menjadi 73,44 – 73,48; gini rasio pada kisaran 0,376 – 0,378; tingkat pengangguran terbuka 5,5 – 6,2 persen;

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,9-5,41 persen, Jawa-Bali 5,48-5,88 persen, Kalimantan 5,76-6,25 persen, Sulawesi 6,88-7,57 persen, Nusa Tenggara 4,85-5,4 persen, Maluku 6,58-7,26 persen dan Papua 5,45-6,13 persen.

Serta menetapkan 7 Prioritas Pembangunan Nasional adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tahun 2021 dan 2022

Terkait target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 di awal perencanaan sebelum terjadinya pandemi Covid-19, ditargetkan mampu tumbuh sebesar 4,98 persen. Namun melihat kondisi perekonomian di Kabupaten Bangka Barat pasca pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh secara negatif dan signifikan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif besaran 5,43 persen. Kontraksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 didapat dari kontraksinya lapangan usaha industri pengolahan yang selama ini menopang perekonomian Kabupaten Bangka Barat lebih dari 40 persen dan kontraksi pada jenis lapangan usaha lainnya yang berdampak secara langsung dengan pandemi Covid-19 ini.

Terkait dengan kebijakan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 serta perencanaan di Tahun 2021, khususnya terkait penanganan pemulihan ekonomi, maka target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat diharapkan pada tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 7,40 – 9,36 persen dengan nilai PDRB (atas dasar harga konstan) sebesar 11.086.595,7 – 11.270.631,5 ribu rupiah serta proyeksi ekonomi di tahun 2022 tumbuh dengan rentang antara 8,90–12,33 persen dengan nilai PDRB (atas dasar harga konstan) antara 12.053.913,3 – 12.433.700,1 ribu rupiah. Namun untuk target ekonomi ini, sangat tergantung dengan perkembangan ekonomi makro secara global dan juga kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini, khusus terkait kebijakan ekspor produk logam timah yang menjadi penopang utama perekonomian di Kabupaten Bangka Barat.

Gambaran ekonomi Kabupaten Bangka Barat diatas sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan nasional dan daerah. Oleh karena itu untuk Tahun 2021 dan Tahun 2022 mendatang, lingkungan eksternal dan internal akan tetap berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat. Pada lingkungan eksternal adalah keberpihakan ekonomi daerah terhadap kebijakan nasional, sedangkan pada lingkungan internal diharapkan melalui kebijakan pemerintah daerah mampu melaksanakan pembangunan dengan baik melalui kelengkapan sarana prasarana pendukung perekonomian yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Besar harapan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, agar pelaksanaan pembangunan pada beberapa infrastruktur di wilayah Kabupaten Bangka Barat, terutama pembangunan stadion serta pembangunan Kawasan Industri Tanjung Ular dapat berjalan dengan lancar dan memiliki *multyplier effect* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bangka Barat secara khusus. Berikut digambarkan proyeksi nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang pada Tahun 2022 sebagai pijakan awal pelaksanaan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Barat tahap ke IV, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Keterbatasan sumber-sumber penerimaan fiskal dari pemerintah pusat seharusnya dapat menempatkan sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah lainnya sebagai sumber pendanaan pembangunan. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Penerimaan Pinjaman Daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Pada Tahun 2022, kebijakan keuangan Daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan Belanja Daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan Belanja Wajib, Mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kebijakan belanja yang dituangkan dalam perencanaan Tahun 2022 adalah :

a. Memperhatikan belanja pegawai yang disesuaikan dengan jumlah pegawai serta kebijakan terkait tunjangan kinerja;
b. Menyiapkan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
c. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan tema dan prioritas pembangunan;
d. Memprioritaskan pada belanja untuk pencapaian Visi,Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih;
e. Memprioritaskan pada belanja infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat;
f. Memprioritaskan alokasi dana hibah, khususnya kepada lembaga lembaga yang secara langsung mampu memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
g. Mempersiapkan alokasi anggaran khusus untuk usulan yang bersumber dari masyarakat secara langsung (pendekatan *bottom up*) melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan;

Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan dengan tetap memberikan penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dengan mengedepankan prinsip akuntubilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

Berikut disajikan struktur APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 :

Tabel 2.1

Struktur APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	APBD 2017	APBD 2018	APBD 2019	APBD 2020	APBD 2021
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**877.109.816.239,70**	**862.470.466.888,00**	**876.815.308.750,00**	**882.595.665.195,50**	**815.004.285.688,00**
1,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**83.132.535.239,70**	**67.178.623.888,00**	**66.409.000.000,00**	**75.781.823.857,35**	**74.134.746.118,00**
1.1.1	Hasil Pajak Derah	16.933.000.000,00	23.987.000.000,00	23.309.000.000,00	26.246.000.000,00	27.797.500.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.210.000.000,00	4.897.000.000,00	5.150.000.000,00	5.239.250.000,00	4.815.914.056,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.350.000.000,00	4.694.900.000,00	4.650.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.989.535.239,70	34.294.623.888,00	33.600.000.000,00	39.601.673.857,35	36.871.332.062,00
1,2	**Dana Perimbangan**	**650.538.841.000,00**	**649.172.037.000,00**	**685.240.180.750,00**	**635.414.533.450,00**	**-**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	**74.539.315.000,00**	69.385.400.000,00	81.210.909.750,00	90.834.464.640,00	-
1.2.2	Dana Alokasi umum	438.389.939.000,00	445.168.706.000,00	466.440.075.000,00	427.997.278.000,00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	137.609.587.000,00	134.617.931.000,00	137.589.196.000,00	116.582.790.810,00	-
4,2	**Pendapatan Transfer**					**716.030.819.570,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-		661.263.328.000,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	-	77.364.650.000,00
	Dana Alokasi umum	-	-	-	-	470.000.000.000,00
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	33.898.678.000,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	20.000.000.000,00
	Dana Desa	-	-	-	-	60.000.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-		54.767.491.570,00
1,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**143.438.440.000,00**	**146.119.806.000,00**	**125.166.128.000,00**	**171.399.307.888,15**	**24.838.720.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	27.688.000.000,00	27.179.750.000,00	24.838.720.000,00	24.838.720.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.000.000.000,00	35.000.000.000,00	42.000.000.000,00	42.446.665.528,15	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	95.300.840.000,00	73.769.806.000,00	55.781.378.000,00	82.338.269.000,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8.037.600.000,00	9.662.000.000,00	205.000.000,00	21.775.653.360,00	

NO	URAIAN	APBD 2017	APBD 2018	APBD 2019	APBD 2020	APBD 2021
2	**BELANJA DAERAH**	**879,120,752,028.00**	**898,262,442,707.21**	**962,836,023,934.00**	**982,649,416,270.45**	**875,343,297,943.00**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**409,643,253,882.00**	**418,385,899,399.21**	**445,689,554,736.00**	**467,320,554,401.45**	
2.1.1	Belanja Pegaw ai	288,601,699,446.00	296,800,000,000.00	317,000,000,000.00	317,250,000,000.00	
2.1.4	Belanja Hibah	10,320,676,800.00	11,824,140,000.00	10,604,880,000.00	36,669,246,408.00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	648,779,500.00	2,286,035,000.00	222,607,000.00	252,595,000.00	
2.1.6	Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota kepada Pemerintah Desa	2,220,000,000.00	2,150,000,000.00	2,845,900,000.00	2,632,213,729.45	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kota dan Pemerintah Desa	106,322,098,136.00	102,359,891,936.00	114,016,167,736.00	110,316,499,264.00	
2.1.8	Belanja tak Terduga	1,530,000,000.00	2,965,832,463.21	1,000,000,000.00	200,000,000.00	
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**469,477,498,146.00**	**479,876,543,308.00**	**517,146,469,198.00**	**515,328,861,869.00**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**659,730,896,768.00**
5.1.01	Belanja Pegaw ai	-	-	-		350,896,510,009.00
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	271,761,502,651.00
5.1.01	Belanja Hibah	-	-	-		31,151,615,608.00
5.1.01	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-		5,921,268,500.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**-**	**-**	**-**		**90,774,154,770.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	4,504,125,650.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	7,031,020,090.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dn Bangunan	-	-	-	-	36,171,878,620.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	42,901,185,650.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	165,944,760.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**-**	**-**	**-**		**4,850,000,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	4,850,000,000.00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**-**	**-**	**-**		**119,988,246,405.00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	3,261,341,405.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	116,726,905,000.00
SURPLUS/(DEFISIT)		**(2,010,935,788.30)**	**(35,791,975,819.21)**	**(86,020,715,184.00)**	**(100,053,751,074.95)**	**(60,339,012,255.00)**

NO	URAIAN	APBD 2017	APBD 2018	APBD 2019	APBD 2020	APBD 2021
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**8,510,935,788.30**	**41,791,975,819.21**	92,520,715,184.00	103,053,751,074.95	66,339,012,255.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	8,119,908,939.40	41,421,175,819.21	92,320,715,184.00	102,853,751,074.95	66,239,012,255.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	391,026,848.90	370,800,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan Hutang Kontijinsi					
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**6,500,000,000.00**	**6,000,000,000.00**	**6,500,000,000.00**	**3,000,000,000.00**	**6,000,000,000.00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6,500,000,000.00	6,000,000,000.00	6,500,000,000.00	3,000,000,000.00	6,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang		-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Hutang Kontijinsi					
PEMBIAYAAN NETO		**2,010,935,788.30**	**35,791,975,819.21**	**86,020,715,184.00**	**100,053,751,074.95**	**60,339,012,255.00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Barat

Belanja Daerah dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja langsung sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

Perkembangan Alokasi Belanja Langsung terhadap Alokasi Belanja Daerah

Tahun 2017-2021

Tahun	Alokasi Belanja Langsung	Belanja Daerah	Proporsi (%)
2017	469,477,498,146.00	879,120,752,028.00	53.40
2018	479,876,543,308.00	898,262,442,707.21	53.42
2019	517,146,469,198.00	962,836,023,934.00	53.71
2020	515,328,861,869.00	982,649,416,270.45	52.44
Tahun	**Alokasi Belanja Operasi**	**Belanja Daerah**	**Proporsi (%)**
2021	659,730,896,768.00	875,343,297,943.00	75.37

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

a. Memperhatikan belanja pegawai yang disesuaikan dengan jumlah pegawai serta kebijakan terkait tunjangan kinerja;
b. Menyiapkan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
c. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan tema dan prioritas pembangunan;
d. Memprioritaskan pada belanja untuk pencapaian Visi,Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih;

e. Memprioritaskan pada belanja infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat;
f. Memprioritaskan alokasi dana hibah, khususnya kepada lembaga lembaga yang secara langsung mampu memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
g. Mempersiapkan alokasi anggaran khusus untuk usulan yang bersumber dari masyarakat secara langsung (pendekatan *bottom up*) melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan;
h. Mempersiapkan alokasi anggaran khusus untuk pengadaan barang yang mendukung pelaksanaan kinerja perangkat daerah yang akan dibahas terlebih dahulu berdasarkan rencana kebutuhan barang milik daerah.

Arah kebijakan pembiayaan daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu terkait penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada upaya pemanfaatan silpa tahun sebelumnya serta pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah, dari pembiayaan netto tersebut akan digunakan untuk menutupi defisit yang diakibatkan selisih antara alokasi pendapatan dengan belanja.

Terkait penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2022 diprediksi sebesar Rp. 134.448.448.735,57 (seratus tiga puluh empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima dan lima puluh tujuh per seratus rupiah). Untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA Tahun 2021 diprediksi sebesar Rp. 89.948.448.735,57 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima dan lima puluh tujuh per seratus rupiah) dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 44.400.000.000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) serta Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dari SiLPA, perhitungannya didasarkan dengan asumsi bahwa daya serap belanja perangkat daerah pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar 90 persen, sehingga dana yang tersisa dari APBD Tahun 2021 dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja pada Tahun 2022.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah). Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yaitu penambahan penyertaan modal pada PT. BPD Sumsel Babel, BPR Syari'ah Bangka Belitung dan PD Bangka Barat Sejahtera serta PDAM Sejiran Setason.

Secara keseluruhan rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Pagu Murni 2021 (Rp.)	Target 2022 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**43.606.433.627,27**	**134.448.448.735,57**	**90.842.015.108,30**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	43.506.433.627,27	89.948.448.735,57	46.442.015.108,30
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	44.400.000.000,00	44.400.000.000,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**7.000.000.000,00**	**-7.000.000.000,00**
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	7.000.000.000,00	-7.000.000.000,00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**43.606.433.627,27**	**127.448.448.735,57**	**83.842.015.108,30**

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2020 dan 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Bangka Barat, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Pemerintah pada tahun 2022 telah menetapkan tema pembangunan nasonal “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukural”. Tema pembangunan tahun 2022 perlu *adaptif* dan *responsif* terhadap adanya dampak pandemi COVID-19 dengan mengupayakan pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan usaha penuntasan krisis kesehatan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2022, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 - 6
2	Inflasi (%)	2 - 4
3	Nilai Tukar Rupiah per US$ (rupiah)	13.900 – 15.000
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 – 6,2
5	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0
6	Rasio Gini Nilai	0,376 – 0,378
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	73,44 – 73,48

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat diharapkan pada tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 7,40 – 9,36 persen dengan nilai PDRB (atas dasar harga konstan) sebesar 11.086.595,7 – 11.270.631,5 ribu rupiah serta proyeksi ekonomi di tahun 2022 tumbuh dengan rentang antara 8,90–12,33 persen dengan nilai PDRB (atas dasar harga konstan) antara 12.053.913,3 – 12.433.700,1 ribu rupiah. Namun untuk target ekonomi ini, sangat tergantung dengan perkembangan ekonomi makro secara global dan juga kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini, khusus terkait kebijakan ekspor produk logam timah yang menjadi penopang utama perekonomian di Kabupaten Bangka Barat. Laju pertumbuhan ekonomi menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018 r	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,46	-0,21	1,57	-0,18	3,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0,65	2,41	0,48	1,41	- 13,63
C	Industri Pengolahan	3,35	6,53	6,97	12,08	-7,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,11	6,17	8,55	15,06	19,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,04	7,59	0,01	2,01	7,50
F	Konstruksi	9,14	7,05	7,23	3,85	-1,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,80	7,35	4,53	4,28	-6,48
H	Transportasi dan Pergudangan	6,52	7,85	6,54	3,34	- 13,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,90	5,83	6,54	3,34	- 13,37
J	Informasi dan Komunikasi	9,12	8,43	2,80	3,70	-0,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	2,04	10,51	12,55	24,49
L	Real Estate	6,05	5,05	7,29	1,57	4,91
M,N	Jasa Perusahaan	4,21	4,10	4,49	0,37	-9,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	7,80	8,08	6,08	-0,63
P	Jasa Pendidikan	9,42	9,76	9,12	6,01	-0,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,08	8,90	7,52	7,37	1,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,21	7,80	4,13	4,48	-4,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**4,80**	**5,26**	**5,20**	**7,08**	**-5,43**

Keterangan : r) angka revisi
*) angka sementara
**) angka sangat sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 menurun. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 mencapai Rp 10,30 trilliun, turun dibandingkan tahun 2019 yang bernilai sebesar Rp 10,89 trilliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi hanya sebesar -5,43 persen.

Pandemi Covid-19 menyebabkan ekonomi menurun secara agregat. Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mencapai -5.43 persen. Adapun beberapa sektor yang mengalami penurunan diantaranya adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa lainnya.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk periode Tahun 2022 diarahkan melalui kebijakan umum kerangka ekonomi daerah, diantaranya adalah:

- Mendorong dan menjaga stabilitas perekonomian daerah sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta berupaya meningkatkan laju investasi daerah;
- Pengalokasian pengeluaran diprioritaskan kepada belanja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat khususnya terkait pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib yang bersifat dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta belanja infrastruktur untuk penunjang perekonomian;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bangka Barat merupakan prasyarat di dalam mewujudkan pembangunan masyarakat dan daerah dengan tujuan peningkatan indeks pembangunan manusia; serta
- Mendorong peningkatan secara signifikan kontribusi sektor tersier pada PDRB Kabupaten Bangka Barat.

3.2.2 PDRB per Kapita

Pertumbuhan PDRB per kapita selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif (Tabel 3.3). Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan PDRB per Kapita cenderung lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,99 persen. Sementara pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB per kapita mengalami kontraksi yang cukup dalam dengan laju pertumbuhannya hanya sebesar -7,24 persen.

Tabel 3.3 Produk Domestik Bruto dan PDRB per Kaptita
Kabupaten Bangka Barat, 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB (milyar rupiah)					
a. ADHB	12,249	13,221	13,817	14,150	13,391
b. ADHK 2010	9,190	9,674	10,177	10,897	10,306
PDRB per Kapita (ribu rupiah)					
a. ADHB	61,308	64,565	66,108	66,379	61,617
b. ADHK 2010	45,794	47,240	48,692	51,122	47,412
Pertumbuhan PDRB per Kapita	2.66	3.16	3.07	4.99	(7.24)
ADHK 2010					
Jumlah Penduduk	200,684	200,778	209,011	213,163	217,332
Pertumbuhan	2.08	2.04	2.07	1.99	1.96

3.2.2 Lain-lain Asumsi

Asumsi lain-lain dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022, baik yang dipengaruhi oleh kebijakan serta kondisi di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kebijakan nasional, antara lain :

1. Kondisi keuangan negara yang masih belum dapat diprediksi di Tahun 2022 khususnya terkait penerimaan dana transfer pusat ke daerah yang bersifat dinamis, ditambah dengan kondisi keuangan negara akibat pandemi Covid 19;
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial, dimana dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018;

3. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan daerah;
4. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap pembangunan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan *second line* dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Ada beberapa kebijakan yang masih harus ditempuh pada Tahun 2022 berkaitan dengan perencanaan peningkatan pendapatan, yaitu :

1. Peningkatan PAD melalui intensifikasi/ektensifikasi pendapatan khususya pajak dan retribusi daerah;
2. Penetapan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan penerimaan dari sektor Pajak dan Retribusi yang mempunyai potensi;
3. Penerapan tarif baru berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat terutama untuk pendapatan-pendapatan yang mempunyai potensi seperti Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan PBB;
4. Mengoptimalkan penerimaan lain-lain PAD yang sah terutama dari lain-lain PAD yang sah lainnya, namun untuk kedepan akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah masuk dalam komponen PAD;
5. Mengoptimalkan penerimaan dari kekayaan daerah dan aset daerah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditunjukkan pada Tabel 4.1.1 berikut.

Tabel 4.1.1
Perkembangan Penerimaan PAD Dana APBD
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
2017	78.486.881.529,45	835.319.418.526,35	9,40
2018	69.765.373.034,63	866.847.770.184,98	8,05
2019	67.746.468.419,01	835.806.983.032,35	8,11
2020	64.304.326.355,09	827.319.557.834,46	7,77
2021*	74.134.746.118,00	878.135.809.527,00	8,44

Ket :

* = sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan data tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tetap optimis dalam meningkatkan PAD terutama pada beberapa sektor pajak dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan potensi yang ada melalui kebijakan yang telah direncanakan.

Walaupun realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan namun Pemerintah Kabupaten Bangka Barat optimis dapat meningkatkan pendapatan dibeberapa sektor PAD sehingga target pendapatan daerah tahun 2022. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rincian PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1.2

Tabel 4.1.2
Target PAD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun Anggaran 2022

No.	JENIS PENERIMAAN	Target Tahun 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	**93.738.699.924,43**
	HASIL PAJAK DAERAH	**30.163.590.000,00**
1	Pajak Hotel	100.750.000,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.820.000.000,00
3	Pajak Hiburan	35.700.000,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	450.000.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.500.000.000,00
6	Pajak Parkir	7.140.000,00
7	Pajak Air Tanah	250.000.000,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.000.000.000,00
10	PBBP2	6.000.000.000,00
11	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.500.000.000,00
	HASIL RETRIBUSI DAERAH	**9.354.920.000,00**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.000.000.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.152.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.500.000.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	30.000.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.000.000,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	322.000.000,00

No.	JENIS PENERIMAAN	Target Tahun 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)
8	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	200.000.000,00
9	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	70.000.000,00
10	Retribusi Tempat Pelelangan	6.120.000,00
11	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.600.000,00
12	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	170.000.000,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	100.000.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.000.000,00
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.120.000,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.040.000,00
18	Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.040.000,00
19	Retribusi IzinPemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing	6.000.000,00
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL :	**5.115.000.000,00**
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.115.000.000,00
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH :	**49.105.189.924,43**
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.485.189.924,43
	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.435.189.924,43
	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	750.000.000,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.500.000.000,00
4	Jasa Giro pada Kas Bendahara	350.000.000,00
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.400.000.000,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00
8	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	7.500.000,00
	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	2.500.000,00
9	Pendapatan Denda Pajak Restoran	30.000.000,00
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000,00
	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	25.000.000,00
10	Pendapatan Denda Pajak Reklame	25.000.000,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	20.000.000,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	5.000.000,00
11	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000.000,00
12	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00
13	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	205.000.000,00
	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	5.000.000,00
	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00

No.	JENIS PENERIMAAN	Target Tahun 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	200.000.000,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000,00
16	Pendapatan BLUD	21.500.000.000,00
17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.800.000.000,00
18	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000,00
	PENDAPATAN TRANSFER	**745.000.000.000,00**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**644.297.214.000,00**
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	79.000.000.000,00
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	18.000.000.000,00
	DBH PPh Pasal 21	6.000.000.000,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	400.000.000,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	53.050.000.000,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	50.000.000,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.500.000.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	441.000.000.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	33.000.000.000,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	33.000.000.000,00
5	DID	30.000.000.000,00
6	Dana Desa	61.297.214.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**100.702.786.000,00**
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.702.786.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.902.786.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.000.000.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.000.000.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	300.000.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.500.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	50.000.000.000,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**24.838.720.000,00**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.838.720.000,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS	24.838.720.000,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS	24.838.720.000,00
JUMLAH PAD		**863.577.419.924,43**

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Transfer Pemerintah Pusat

1. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

a. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 8.577.678.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari target tahun 2021, dengan mempertimbangkan perkembangan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir pada penerimaan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 serta penetapan proyeksi penerimaan sektor pajak nasional pada tahun 2022 masih dipengaruhi pandemi Covid-19. Target tahun 2022 ini juga akan disesuaikan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketetapan yang tertuang dalam Perpres tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat terdiri dari:

1) DBH-Kehutanan;
2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
3) DBH-Pertambangan Migas;
4) DBH-Perikanan;

Dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar) atau bertambah sebesar Rp. 5.129.018.000,00 (lima milyar seratus dua puluh sembilan juta delapan belas ribu rupiah) jika dibandingkan dengan target tahun 2021, dan akan disesuaikan kembali pada APBD tahun anggaran 2022.

c. Dana Alokasi Umum

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk tahun 2022 penerimaan Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 441.000.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 21.100.488.000,00 dari tahun anggaran 2021.

d. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

1) DAK Fisik; dan
2) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD,

untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Dana Tranfer Khusus

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasiDana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasiDana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

B. Transfer Pemerintah Daerah

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil Kabupaten Bangka Barat merupakan dana yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah Kabupaten yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

(a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

(b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

(c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

(d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 93.738.699.924,43 bertambah sebesar Rp. 19.603.953.806,43 atau sebesar 20,91% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2021 pada APBD Murni sebesar Rp. 74.134.746.118,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode.	Uraian	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4.	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**74.134.746.118,00**	**93.738.699.924,43**	**19.603.953.806,43**
4.1.01.	Pajak daerah	27.797.500.000,00	30.163.590.000,00	2.366.090.000,00
4.1.02.	Retribusi daerah	4.815.914.056,00	9.354.920.000,00	4.539.005.944,00
4.1.03.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.650.000.000,00	5.115.000.000,00	465.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	36.871.332.062,00	49.105.189.924,43	12.233.857.862,43
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**779.162.343.409,00**	**745.000.000.000,00**	**-34.162.343.409,00**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	714.394.851.839,00	644.297.214.000,00	-70.097.637.839,00
4.2.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	65.293.304.000,00	79.000.000.000,00	13.706.696.000,00
4.2.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	419.899.512.000,00	441.000.000.000,00	21.100.488.000,00
4.2.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	54.894.958.139,00	33.000.000.000,00	-21.894.958.139,00
4.2.01.05	DID	29.857.710.000,00	30.000.000.000,00	142.290.000,00
4.2.01.12	Dana Desa	61.297.214.000,00	61.297.214.000,00	0,00
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	64.767.491.570,00	100.702.786.000,00	35.935.294.430,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.767.491.570,00	40.702.786.000,00	-14.064.705.570,00
4.2.02.03	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.000.000.000,00	50.000.000.000,00	40.000.000.000,00
4.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**24.838.720.000,00**	**24.838.720.000,00**	**0,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	24.838.720.000,00	24.838.720.000,00	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**878.135.809.527,00**	**863.577.419.924,43**	**-14.558.389.602,57**

Adanya penurunan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 lebih diakibatkan karena situasi global dan nasional karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, terutama pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Target pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 bertambah Rp. 2.366.090.000,00 atau sebesar 8,51%. Sedangkan Retribusi Daerah diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 4.539.005.944,00 atau sebesar 94,25%.

Sedangkan untuk pendapatan transfer tahun 2022 turun sebesar Rp. 34.162.343.409,00 atau sebesar 4,38% jika dibandingkan dengan target pendapatan APBD Murni Tahun 2021. Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah (DID) tidak diproyeksi sementara waktu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan Presiden terkait Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran 2022. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dana PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Tranfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan sama dengan target pendapatan pada APBD Induk Tahun 2021, sedangkan Jenis Pendapatan berupa Bantuan Keuangan provinsi diasumsikan Nihil sampai dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota dan akan dilakukan perubahan Penjabaran APBD TA. 2022.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

a. Belanja Operasi

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sertaPimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yangberlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan.

g. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan

tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

i. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah

yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
   1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
   2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
   3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/ Kabupaten yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
   1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

2. Penghargaan atas suatu prestasi;
3. Beasiswa kepada masyarakat;
4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaranbantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran DalamAnggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor 105 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan Dan Mesin, Belanja Modal Bangunan Dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru *(new initiative)* dan angka dasar *(baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan

prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta aman at peraturan perundang-undangan;
2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
   1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4) Pengeluaran untuk mendanai:
   a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Keperluan mendesak; dan/atau
   c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya;

   yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
   a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
   b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

d. Belanja Transfer

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan serta pengelolaan pada Pemerintah Desa, Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakasa dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang

profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kedudukan ini memberikan angin segar kepada Desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Tentu kedudukan tersebut harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa yang tersebut diatas ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan tentu akan berakibat diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan sumber Pendapatan Desa yang di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selama ini.

1. Alokasi Dana Desa

   Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Pasal 72 ayat (4)*, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam *Pasal 72 ayat (6),*dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa *Pasal 96 ayat (3)* pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Ketentuan mengenai penggunaan anggarannya sudah diatur dengan jelas. Tata Cara Pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati Bangka Barat, dalam peraturan tersebut pembagian Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).Dengan formulasi yang jelas. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% adalah alokasi dana desa yang dibagi secara merata dengan formulasi Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dikalikan 10%, dari hasil 10% dikalikan 60% dan dibagi dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sisa dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), pembagian ke desa dengan memperhatikan indeks/variebel yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2. Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan *Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)* dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Pasal 11 ayat (3)* mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menetapkan alokasi serta dalam pengelolaan Dana Desa berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

3. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

   Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian ke Desa dengan komposisi 60% dibagi secara merata dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2). Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi. daerah kepada Desa. Besaran alokasi Dana Bagi Hasil untuk Desa ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber Dana Bagi Hasil berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

   Tata Cara penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa juga menjadi hal yang harus mendapat perhatian khusus, tujuannya agar penyaluran dan alokasinya tepat, kata kunci dari alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah memperhatikan realiasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cermat dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menetapkan alokasi serta dalam pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah telah berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

4. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan kepada Desa dapat bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada APBDes. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dengan tujuan tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah serta kebijakan daerah di desa.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan serta pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan melalui kegiatan berbasis masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam memberikan bantuan keuangan bertujuan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada BPD dalam upaya peningkatan kinerja serta profesionalisme kerja. Bantuan Keuangan kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang diatur

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa dilaksanakan menggunakan perinsip hemat, terarah, terkendali, tepat sasaran dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis maupun hukum.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Bangka Barat dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2022 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Pagu Murni 2021 (Rp.)	Target 2022 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**43.606.433.627,27**	**134.448.448.735,57**	**90.842.015.108,30**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	43.506.433.627,27	89.948.448.735,57	46.442.015.108,30
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	44.400.000.000,00	44.400.000.000,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**7.000.000.000,00**	**-7.000.000.000,00**
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	7.000.000.000,00	-7.000.000.000,00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**43.606.433.627,27**	**127.448.448.735,57**	**83.842.015.108,30**

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. SiLPA tahun 2018-2023 diproyeksikan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 8,56% dengan tahun dasar 2017, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 7% - 8% dari total APBD.
4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kepulauan Bangka Belitung guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB V
PENUTUP

Demikianlah KUA Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

Muntok, 31 Agustus 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

MARUDUR SARAGIH, S.E.
KETUA

H. OKTORAZSARI
WAKIL KETUA

MIYUNI ROHANTAP, S.H., M.H.
WAKIL KETUA

BUPATI BANGKA BARAT

A. SUKIRMAN, S.H.

PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2022

MUNTOK TAHUN 2021

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang……..……. 1

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS 3

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS..... 3

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH 5

2.1 Pendapatan Daerah…. 5

2.2 Penerimaan Pembiayaan 8

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 8

3.1 Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah..... 9

3.2 Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja..... 116

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 119

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan…..... 120

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga……..... 120

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 121

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah……..... 121

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah……..,..... 122

BAB VI PENUTUP …..….. 123

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022..... 7

Tabel 2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022..... 8

Tabel 3.1. Rincian Anggaran Belanja Perangkat Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

- *Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga* ..... 11 – 14
- *Dinas Kesehatan* ..... 15 – 21
- *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* ..... 22 – 26
- *Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan* ..... 27 – 30
- *Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana* ..... 31 – 33
- *Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa* ..... 34 – 37
- *Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi* ..... 38 – 40
- *Dinas Pertanian dan Pangan* ..... 41 – 44
- *Dinas Lingkungan Hidup* ..... 45 – 47
- *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* ..... 48 – 50
- *Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* ..... 51 – 53
- *Dinas Komunikasi dan Informatika* ..... 54 – 56
- *Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah dan Perindustrian* ..... 57 – 59
- *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan* ..... 60 – 62
- *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* ..... 63 – 65
- *Dinas Kelautan Dan Perikanan* ..... 66 – 68
- *Sekretariat Daerah* ..... 69 – 72
- *Sekretariat DPRD* ..... 73 – 75
- *Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah* ..... 76 – 79
- *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* ..... 80 – 83
- *Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah* ..... 84 – 85
- *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah* ..... 86 – 88
- *Inspektorat Daerah* ..... 89 – 91

- *Kecamatan Muntok* ..... 92 – 97
- *Kecamatan Simpangteritip* ..... 98 –100
- *Kecamatan Jebus* 101–103
- *Kecamatan Kelapa* 104-106
- *Kecamatan Tempilang* 107-109
- *Kecamatan Parittiga* 110-112
- *Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik* 113-115

Tabel 3.2.1 Rincian Plafon Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 118

Tabel 5.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022..... 122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan ABPD, dokumen PPAS disusun berdasarkan KUA yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah yang ada untuk mencapai hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan PPAS memperhatikan sinkronisasi struktur penyusunan yang berlandaskan kepada pendekatan bidang urusan pemerintahan yang dilakukan melalui pengintegrasian antara nomenklatur program dan kegiatan dalam RKPD dan penganggaran pada dokumen KUA. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kabupaten tentang penjabaran APBD.

Prioritas dan plafon anggaran sementara memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dalam bentuk program/kegiatan, plafon anggaran sementara untuk belanja daerah, serta rencana pembiayaan daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (political will) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

PPAS disusun dengan tahapan :

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana

Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemeirntahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Sebagai program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyediakan dokumen yang berisi rencana pendapatan dan penerimaan daerah yang mendukung pembiayaan dan belanja daerah;
3. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2022 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ada beberapa kebijakan yang masih harus ditempuh pada Tahun 2022 berkaitan dengan perencanaan peningkatan pendapatan, yaitu :

1. Terus melakukan intensifikasi/ektensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Penetapan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan penerimaan dari sektor Pajak dan Retribusi yang mempunyai potensi;
3. Penerapan tarif baru berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat terutama untuk pendapatan-pendapatan yang mempunyai potensi seperti Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan PBB;
4. Mengoptimalkan penerimaan lain-lain PAD yang sah terutama dari lain-lain PAD yang sah lainnya, namun untuk kedepan akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah masuk dalam komponen PAD;
5. Mengoptimalkan penerimaan dari kekayaan daerah dan aset daerah.

Target pendapatan daerah meliputi PAD, dana perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

- Pajak, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 30.163.590.000,00 (tiga puluh milyar seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Retribusi, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 9.354.920.000,00 (sembilan milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp.5.115.000.000,00 (lima milyar seratus lima belas juta rupiah);
- Lain-lain PAD yang sah, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 49.105.189.924,43 (empat puluh sembilan milyar seratus lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat dan empat puluh tiga per seratus rupiah).
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
    a. Bagi Hasil Pajak, dengan jumlah target pendapatan sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah);
    b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dengan jumlah target pendapatan sebesar Rp. 55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah).
    c. DAU Tahun 2022, ditargetkan sebesar Rp. 441.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu milyar rupiah);
    d. DAK Tahun 2022, ditargetkan sementara sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang difokuskan sementara untuk DAK non fisik urusan pendidikan;
    e. Dana Dasa sebesar Rp. 61.297.214.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
    f. Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- Pendapatan Transfer dari dana bagi hasil pajak provinsi ditargetkan sebesar Rp 50.702.786.000,00 (lima puluh milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) seiring pula dengan baiknya perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga akan meningkatkan bagi hasil pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok serta bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) direncanakan untuk pembangunan sporthall.

- Hibah Dana BOS diasumsikan sebesar Rp. 24.838.720.000,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan target pendapatan daerah Tahun 2022 adalah Rp. 863.577.419.924,43 (delapan ratus enam puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat dan empat puluh tiga per seratus rupiah).

Tabel 2.1
Rencana Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2022

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	**PENDAPATAN DAERAH**		
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**93.738.699.924,43**	
4.1.01.	Pajak Daerah	30.163.590.000,00	❖ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ❖ PERDA Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Babar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.1.02.	Retribusi Daerah	9.354.920.000,00	❖ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.115.000.000,00	❖ PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. ❖ PERDA Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	49.105.189.924,43	-
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**745.000.000.000,00**	
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	644.297.214.000,00	❖ PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	100.702.786.000,00	-
4.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**24.838.720.000,00**	
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan	24.838.720.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**863.577.419.924,43**	

2.2 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2022 diprediksi sebesar Rp. 134.448.448.735,57 (seratus tiga puluh empat milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima dan lima puluh tujuh per seratus rupiah). Untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA Tahun 2021 diprediksi sebesar Rp. 89.948.448.735,57 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima dan lima puluh tujuh per seratus rupiah) dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 44.400.000.000,00 (empat puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) serta Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dari SiLPA, perhitungannya didasarkan dengan asumsi bahwa daya serap belanja perangkat daerah pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar 90 persen, sehingga dana yang tersisa dari APBD Tahun 2021 dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja pada Tahun 2022.

Tabel 2.2 Rencana Penerimaan
Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**		
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.948.448.735,57	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	44.400.000.000,00	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**134.448.448.735,57**	

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-tiga RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bangka Barat (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kepulauan Bangka Belitung guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Prioritas Belanja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022.

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut :

a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.

Adapun sinergitas program dimaksud sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut.

TABEL 3.1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG OPD BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Pendidikan)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Kepemudaan dan Olahraga)
OPD : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**236.834.690.000,00**	**243.953.290.221,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**236.834.690.000,00**	**243.953.290.221,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**171.564.055.000,00**	**171.753.045.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**168.510.000.000,00**	**168.512.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	168.500.000.000,00	168.500.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**55.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan dan AnalisisJumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	55.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**963.815.000,00**	**1.013.815.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik untuk menunjang kerja kanto	6 jenis	23.000.000,00	23.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	5 jenis	11.550.000,00	11.550.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya surat kabar, majalah dan buku-buku peraturan	12 bulan	79.165.000,00	79.165.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor dan cetak kartu NISN (5.000 kartu)	12 bulan	106.300.000,00	106.300.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah dan buku-buku peraturan	12 bulan	13.800.000,00	13.800.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	11 bulan	80.000.000,00	80.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	650.000.000,00	700.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**-**	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya gedung olahraga**	**100 Persen**	**1.713.690.000,00**	**1.789.730.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	158.250.000,00	158.250.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	624 ob	1.553.440.000,00	1.629.480.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**293.550.000,00**	**377.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	40.360.000,00	45.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananaya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional lapangan	12 bulan	128.190.000,00	207.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung Kantor (pengecatan gedung kantor dan pengantian plafon rusak)	2 paket	125.000.000,00	125.000.000,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**		**65.246.155.000,00**	**72.175.245.221,00**
		- SD	**104,15%**		
		- SMP	**80,25%**		
		- PAUD	**80,15%**		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar**	**94,75%**	**40.292.806.000,00**	**50.038.240.000,00**
	Penambahan Ruang kelas baru	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru	1 ruang	300.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya pembangunan Ruang Guru	5 Ruang	973.480.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pembangunan Toilet siswa	2 Paket	3.375.136.000,00	
		Terlaksananya pembangunan Mushollah sekolah	1 ruang		
		Terbangunnya Sumur Bor Sekolah	4 unit		
		Terbangunnya Pagar Sekolah	20 Sekolah		
		Terlaksananya pembangunan Kelas Alam	1 unit		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas	6 Ruang	331.745.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	1 Ruang	110.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Toilet/jamban sekolah	1 Paket	45.000.000,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksananya pengadaan mebeler sekolah	290 Set	331.640.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Raport SD	4200 buku	190.000.000,00	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya drum band sekolah	1 paket	-	
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya ujian bagi peserta didik	139 sekolah	4.940.000,00	-
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Kompetisi Sains Nasional Tingkat SD	1 mata pelajaran	49.985.000,00	-
		Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	12 cabang olahraga		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersalurnya gaji Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	12 bulan	15.125.740.000,00	15.934.650.000,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembayaran bantuan biaya Pendidikan Profesi Guru SD	25 orang	187.500.000,00	187.500.000,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terakreditasinya Sekolah Dasar	20 sekolah	90.000.000,00	20.000.000,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersalurnya dana BOS SD	134 SD, 2027 Siswa	19.177.640.000,00	17.961.440.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**80,85%**	**14.534.584.000,00**	**12.264.620.000,00**
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang	277.000.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Toilet Sekolah	4 Pintu (SMP N 2 Sp	490.104.000,00	
		Terlaksananya pemasangan conblok	SMPN 2 Muntok		
		Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Sekolah	5 Unit		
	Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksananya pengadaan mebeler sekolah	104 set	123.990.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Raport SMP	2800 buku	199.590.000,00	129.725.000,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya biaya pendidikan untuk siswa kurang mampu	200 orang	312.465.000,00	125.000.000,00
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Terpenuhinya buku dan alat tulis siswa kurang mampu SMP	62 siswa	14.980.000,00	15.000.000,00
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya evaluasi kinerja bidang pendidikan	34 sekolah	9.960.000,00	10.000.000,00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya kegiatan Kompetisi sains siswa nasional	3 Mata Pelajaran	73.655.000,00	75.000.000,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersalurnya gaji Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	12 bulan	5.395.080.000,00	2.443.650.000,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersalurnya bantuan pendidikan guru peserta PPG	16 orang	125.290.000,00	125.315.000,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersalurnya Dana BOS SMP	34 sekolah, 1042 siswa	7.502.480.000,00	6.877.280.000,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya pengelolaan manajeman BOS Sekolah Menengah Pertama	34 sekolah	9.990.000,00	20.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD**	**90,25%**	**4.544.455.000,00**	**3.997.803.221,00**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya rehabilitasi Ruang Kelas TK	1 Ruang	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat toilet siswa	1 unit	-	
	Pengadaan Mebel PAUD	Tersedianya mebel PAUD/Siswa Paud	30 set	-	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya Raport TK	1000 buku	49.020.000,00	50.000.000,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Pembayaran Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD	1000 siswa, 1101 siswa	803.155.000,00	142.590.000,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tersedianya Gaji Bulanan GTT dan PTT TK	12 bulan	3.532.280.000,00	3.758.245.000,00
		Tersedianya tambahan pengahasilan pendidik PAUD	12 bulan		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Terlaksananya diklat dasar guru PAUD	30 orang	-	15.000.000,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya pembinaan PAUD oleh Bunda PAUD	6 kecamatan	160.000.000,00	31.968.221,00
		Terlaksananya akreditasi PAUD	25 lembaga		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	**4,95%**	**5.874.310.000,00**	**5.874.582.000,00**
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya evaluasi kinerja bidang pendidikan UNPK	5 PKBM	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya insentif tutor Paket A, B dan C	40 orang	5.859.530.000,00	5.859.582.000,00
		Tersedianya insentif ustad/ustadzah	935 orang		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan pendidikan keluarga di Satuan Pendidikan	120 orang	9.780.000,00	10.000.000,00
		Tersedianya data pendidikan non formal	1 dokumen		
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru Sertifikasi**	**42,25%**	**24.480.000,00**	**25.000.000,00**
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Persentase pendidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) dan sertifikat pendidik**	**43,15%**	**24.480.000,00**	**25.000.000,00**
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit JFT	1 kegiatan	24.480.000,00	25.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**11.321.470.000,00**	**1.247.365.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**11.321.470.000,00**	**1.247.365.000,00**
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan**	**30%**	**746.470.000,00**	**747.365.000,00**
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Jumlah keikutsertaan pemuda dalam paskibraka tingkat provinsi**	**3 orang**	**746.470.000,00**	**747.365.000,00**
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustus	100 orang	746.470.000,00	747.365.000,00
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Peningkatan prestasi olahraga**	**POPDA peringkat 3**	**10.075.000.000,00**	**500.000.000,00**
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah**	**3 event**	**4.075.000.000,00**	**500.000.000,00**
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Daerah (POPDA) Pelajar	8 cabang	4.075.000.000,00	500.000.000,00
		Terlaksananya Kompetisi liga sepakbola pelajar	2 jenjang		
		Terlaksananya Operasional Panitia Besar PORPROV	12 bulan		
		terlaksananya Pemenuhan Sarpras Porporv 2023	1 kegiatan		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga	**Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat provinsi**	**50%**	**6.000.000.000,00**	
	Pengembangan organisasi keolahragaan	Tersedianya dana hibah KONI	1 Kegiatan	6.000.000.000,00	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERMUKAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**	**35%**	**500.000.000,00**	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Jumlah gugus depan pramuka yang aktif**	**80 gugus depan**	**500.000.000,00**	
	Partisipasi dan keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	Tersedianya dana hibah kwartir cabang	1 Kegiatan	500.000.000,00	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga				**248.156.160.000,00**	**245.200.655.221,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Kesehatan)
OPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**174.330.782.000,00**	**280.847.024.480,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**174.330.782.000,00**	**280.847.024.480,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**73.277.161.000,00**	**69.467.310.280,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**24.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	4.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**66.306.000.000,00**	**66.306.000.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	66.300.000.000,00	66.300.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**-**	**12.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	-	12.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**634.111.000,00**	**986.072.080,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	57.611.000,00	129.034.644,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	1.500.000,00	6.524.760,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	55.000.000,00	67.667.124,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	55.000.000,00	71.669.400,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	5.000.000,00	6.007.200,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	12 bulan	60.000.000,00	85.968.952,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	400.000.000,00	619.200.000,00
	pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**2.400.000.000,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit (pagar)	2.400.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**3.673.050.000,00**	**1.576.338.200,00**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	139.800.000,00	153.780.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	165 unit	59.350.000,00	65.276.200,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	1440 orang/bulan	3.473.900.000,00	1.357.282.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**	**240.000.000,00**	**576.400.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	46.000.000,00	288.200.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	7 unit	194.000.000,00	288.200.000,00
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN**	**100 Persen**	**51.672.485.400,00**	**42.957.120.380,00**
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**10%**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Sarana Prasarana dan Alat (SPA) Rumah Sakit sesuai standar**	**90%**	**1.643.675.700,00**	**9.934.050.000,00**
		Terpenuhinya fasilitas layanan kesehatan UKM dan UKP di Puskesmas	**100%**		
		Persentase FKTP dan FKTL milik pemerintah sesuai standart	**84%**		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan renovasi sarana pelayanan kesehatan	2 unit	315.000.000,00	1.728.000.000,00
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Sarana Rumah Sakit	6 unit	362.940.000,00	650.000.000,00
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	8 puskesmas	699.635.700,00	330.000.000,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase alat kesehatan memenuhi standar di setiap puskesmas	95 %	71.960.000,00	3.426.050.000,00
	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100 %	194.140.000,00	3.800.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)**	**0,18**	**50.013.895.000,00**	**32.873.720.380,00**
		Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	**190**		
		Eliminasi malaria	**1 Kabupaten**		
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	**7%**		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	11.925.000,00	64.761.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	20.000.000,00	219.353.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	67.140.000,00	232.023.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	100 %	18.725.000,00	77.774.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	64.330.000,00	100.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	12.950.000,00	22.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100 %	12.400.000,00	17.600.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	35.440.000,00	42.460.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	60.000.000,00	117.645.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan	8 puskesmas	5.800.000,00	150.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk/stunting yg mendapatkan perawatan/pelayanan	100 %	96.055.000,00	450.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	3 rumah sakit 8 puskesmas 68 % 100 %	10.000.000,00	150.000.000,00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaporkan dan melakukan tata laksana penyakit menular. Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam, kasus AFP yang ditemukan 2 kasus, kasus campak ditemukan 24 kasus Persentase puskesmas yang melaporkan dan melakukan tata laksana penyakit menular. Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam, kasus AFP yang ditemukan 2 kasus, kasus campak	1 RSUD 8 puskesmas	9.350.000,00	74.250.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai	100 %	19.770.000,00	27.500.000,00
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlayaninya kesehatan matra (kondisi khusus atau kondisional dan darurat)	100 %	15.000.000,00	187.000.000,00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	API malaria Cakupan penemuan pneumonia balita Persentase 50% Puskesmas melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai dengan MTBS Persentase 80% Puskesmas melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar Persentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Persentase ibu hamil yang diperiksa hepatitis Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12- 23 bulan Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun Persentase Puskesmas yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk Persentase tatalaksana penderita filariasis Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	1 per mil 70 % 4 puskesmas 6 puskesmas 80 % 100 % 92 % 8.7 % 7 puskesmas 100 % 90 %	97.310.000,00	752.120.500,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat	103.616	49.432.800.000,00	15.422.619.920,00
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Predikat puskesmas yang terakreditasi (7 utama, 1 paripurna) Terlaksananya survei akreditasi RSUD (akreditasi madya)	8 puskesmas 1 RSUD	19.900.000,00	350.000.000,00
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah puskesmas yang mengimplementasikan Public Safety Center (PSC) 119	8 puskesmas	5.000.000,00	200.000.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas secara**	**88%**	**9.914.700,00**	**36.850.000,00**
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengumpulan, up dating dan analisis data serta penyusunan profil	2 jenis	4.939.800,00	24.200.000,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Sistem Informasi Managemen Puskesmas	8 puskesmas	4.974.900,00	12.650.000,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan**	**100%**	**5.000.000,00**	**112.500.000,00**
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya koordinasi tata kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 rumah sakit	5.000.000,00	25.000.000,00
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan sesuai**	**100%**	**6.156.545.600,00**	**6.525.738.600,00**
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Presentase perencanaan kebutuhan sesuai standar**	**100%**	**6.148.175.600,00**	**6.156.755.600,00**
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar	100 %	6.148.175.600,00	6.156.755.600,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi**	**95%**	**8.370.000,00**	**368.983.000,00**
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	50 orang	8.370.000,00	368.983.000,00
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai Standar**	**60%**	**12.560.000,00**	**107.000.000,00**
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang memiliki izin**	**100%**	**3.800.000,00**	**32.000.000,00**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pelaksanaan pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional sebesar	100 %	3.800.000,00	32.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentasi Industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan dan Izin Produksi**	**100%**	**3.800.000,00**	**25.000.000,00**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pelaksanaan pengawasan izin produksi dan sertifikat produksi pangan	100 %	3.800.000,00	25.000.000,00
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi**	**100%**	**4.960.000,00**	**50.000.000,00**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat sesuai standar	50 %	4.960.000,00	50.000.000,00
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER PHBS**	**47%**	**48.990.000,00**	**408.957.500,00**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri**	**30%**	**42.670.000,00**	**270.000.000,00**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang ber-PHBS Presentase desa siaga aktif strata mandiri	66 desa/kelurahan	42.670.000,00	270.000.000,00
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas**	**17%**	**3.135.000,00**	**28.957.500,00**
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase puskesmas yang menerapkan kebijakan GERMAS	100 %	3.135.000,00	28.957.500,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Posyandu Aktif**	**67,03%**	**3.185.000,00**	**110.000.000,00**
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah posyandu aktif	120 posyandu	3.185.000,00	110.000.000,00
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD SEJIRAN SETASON			**30.233.040.000,00**	**41.150.000.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH**	**100%**	**21.500.000.000,00**	**21.500.000.000,00**
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD**	**100%**	**21.500.000.000,00**	**21.500.000.000,00**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya layanan dan pendukung layanan kesehatan (BLUD)	1 RSUD	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase capaian SPM bidang kesehatan**	**100%**	**8.733.040.000,00**	**19.650.000.000,00**
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**12%**		
		Indeks rata-rata survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	**78%**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sarana dan prasarana dan alat (SPA) Rumah Sakit sesuai standar**	**72%**	**200.000.000,00**	**650.000.000,00**
		Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP di setiap puskesmas	**100%**		
		Persentase FKTP milik pemerintah sesuai standar	**84%**		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	I Gedung (graha rawat jalan)	100.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan Fasilitas Sarana Rumah Sakit	1 RSUD	100.000.000,00	650.000.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Predikat strata akreditasi rumah sakit**	**Madya**	**8.533.040.000,00**	**19.000.000.000,00**
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	**79%**		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya bahan-bahan logistik Rumah Sakit	1 RSUD	8.533.040.000,00	19.000.000.000,00
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Muntok			**2.050.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN**	**100%**	**2.050.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**10%**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)**	**0,18**	**2.050.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	**190**		
		Eliminasi malaria	**1 Kabupaten**		
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	**7%**		
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	2.050.000.000,00	14.104.413.960,00
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Jebus			**1.640.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN**	**100%**	**1.640.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**10%**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)**	**0,18**	**1.640.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	**190**		
		Eliminasi malaria	**1 Kabupaten**		
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	**7%**		
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	1.640.000.000,00	14.104.413.960,00
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Puput			**890.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN**	**100%**	**890.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**10%**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)**	**0,18**	**890.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	**190**		
		Eliminasi malaria	**1 Kabupaten**		
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	**7%**		
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	890.000.000,00	14.104.413.960,00
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kelapa			**2.280.000.000,00**	**14.104.413.960,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN**	**100%**	**2.280.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**10%**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)**	**0,18**	**2.280.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	**190**		
		Eliminasi malaria	**1 Kabupaten**		
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	**7%**		
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	2.280.000.000,00	14.104.413.960,00
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tempilang			**1.900.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN**	**100%**	**1.900.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**10%**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)**	**0,18**	**1.900.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	**190**		
		Eliminasi malaria	**1 Kabupaten**		
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	**7%**		
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	1.900.000.000,00	14.104.413.960,00
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Simpangteritip			**1.820.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN**	**100%**	**1.820.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**10%**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)**	**0,18**	**1.820.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	**190**		
		Eliminasi malaria	**1 Kabupaten**		
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	**7%**		
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	1.820.000.000,00	14.104.413.960,00
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Sekarbiru			**1.470.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN**	**100%**	**1.470.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**10%**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)**	**0,18**	**1.470.000.000,00**	**14.104.413.960,00**
		Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	**190**		
		Eliminasi malaria	**1 Kabupaten**		
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	**7%**		
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	1.470.000.000,00	14.104.413.960,00
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kundi			**880.000.000,00**	**21.500.000.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**CAPAIAN PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN**	**100%**	**880.000.000,00**	**21.500.000.000,00**
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**10%**		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Insidensi HIV (per seribu penduduk yang tidak terinfeksi HIV)**	**0,18**	**880.000.000,00**	**21.500.000.000,00**
		Insidensi tuberkulosis (per seratus ribu penduduk)	**190**		
		Eliminasi malaria	**1 Kabupaten**		
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	**7%**		
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya operasional pelayanan puskesmas	12 bulan	880.000.000,00	21.500.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Kesehatan				**174.330.782.000,00**	**280.847.024.480,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Pertanahan)
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**48.134.367.328,00**	**14.947.193.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**48.134.367.328,00**	**14.947.193.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**8.211.418.100,00**	**7.592.318.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**100 Persen**	**28.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang	4 Dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.110.000.000,00**	**4.112.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran Perangkat	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
	PendataandanPendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendafaran objek retribusi daerah	12 bulan	2.500.000,00	2.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**22.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	-	12.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**640.160.000,00**	**629.000.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	3.000.000,00	3.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material untuk kantor	12 bulan	53.660.000,00	40.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	500.000.000,00	500.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	13 bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**900.000.000,00**	**-**
	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	1 unit (PC mini)	600.000.000,00	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis	300.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.804.918.100,00**	**1.818.640.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	120.000.000,00	120.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	19.938.100,00	20.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	684 Ob	1.662.980.000,00	1.676.640.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**717.840.000,00**	**957.178.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	39.250.000,00	57.178.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	250.590.000,00	300.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	12 bulan	178.000.000,00	225.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 UNIT	250.000.000,00	250.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			125.000.000,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber sumber air yang di**	**32 Unit**	**3.287.984.000,00**	**3.482.400.000,00**
		Persentase ketersediaan air baku pertanian	**46,39%**		
		Penurunan titik kawasan terkena dampak banjir	**21 Titik**		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.811.984.000,00**	**1.034.400.000,00**
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terlaksananya pembangunan Perkuatan Tebing		-	
	- talud kp. Keranggan		35 meter		
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		1.300.000.000,00	
	- Talud Pantai Batu Berani		100 meter		
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	11.937 m3	261.984.000,00	684.400.000,00
	- Normalisasi Sungai Culong		8.187 m3		
	- Normalisasi Sungai Kabupaten Bangka Barat				
	- Normalisasi Sungai Rt. 05 - rt. 10 Desa Air lintang		3.750 m3		
	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Pengaman Pantai	250 meter	250.000.000,00	350.000.000,00
	- Operasi dan Pemeliharaan Pengaman Pantai Belembang		250 meter		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Kegiatan**	**1.476.000.000,00**	**2.448.000.000,00**
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	4 Dokumen	548.000.000,00	548.000.000,00
	- SID Jaringan Irigasi Air Nyatoh (230 HA)				
	- SID Jaringan irigasi Dendang (120 Ha)				
	-SID Jaringan irigasi Bukit Terak (50 Ha)				
	- Fisibilities Study (FS) (5 Ha)				
	- Komisi Irigasi T.A. 2022				
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Jaringan irigasi permukaan	2 kegiatan	200.000.000,00	500.000.000,00
	- Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi Sawah Kacung				
	- Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi Sawah Simpang Yul				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharaanya jaringan Irigasi	3 kegiatan	300.000.000,00	500.000.000,00
	- Rehabilitasi Bangunan Sadap D.I Kacung				
	- Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Tebing Bulin				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Rehabilitasi Bangunan Saluran D.I Tebing Bulin				
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	9.375 m3	300.000.000,00	550.000.000,00
	- Normalisasi Sungai D.I. Paradong				
	- Normalisasi Sungai D.I Buyan Kelumbi				
	- Normalisasi Sungai D.I Jebus				
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	4.000 m3	128.000.000,00	350.000.000,00
	-Normalisasi Sungai D.I.R Kebayan Limbung				
	-Normalisasi Sungai D.I.R Mancung Belit				
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap**	**82,40%**	**36.236.502.228,00**	**3.047.475.000,00**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**4 Kegiatan**	**36.236.502.228,00**	**3.047.475.000,00**
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen tersusun	2 Dokumen	718.510.000,00	218.510.000,00
	- DED Jalan Simpang Bulin - Petar				
	- Dokumen Lingkungan Jalan di Kecamatan Parittiga				
	- Dokumen Perencanaan Jln. Lingkar Air Nyatoh - Mayang				
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya dokumen inspeksi jalan dan jembatan	1 Dokumen	134.255.000,00	109.255.000,00
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan terbangun	11800 M	3.534.365.000,00	
	- Pembangunan jalan Tanjung Ular - Air Limau (Lanjutan)	Panjang jalan terbangun	10.000 M		
	Pembangunan jalan belakang villa batu, Kab. Bangka Barat	Panjang jalan terbangun	150 meter		
	Pembanguan Siring jalan belakang villa batu, Kab. Bangka Barat	Panjang jalan terbangun	150 meter		
	Pembangunan Jalan Begadang RT 03 tembus ke Jl. Setapaak RT 02, Kab. Bangka Barat	Panjang jalan terbangun	160 meter		
	Pembangunan Jalan desa air limau- dusun air mas, Kab. Bangka Barat	Panjang jalan terbangun	1000 meter		
	Pembangunan Jalan Gang Duren, Desa Sekarbiru Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat	Panjang jalan terbangun	500 meter		
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	23796 Meter	19.168.119.728,00	
	- Peningkatan jalan di Rt 07 dan Rt 06 Dusun III Desa Kundi	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1500		
	- Peningkatan jalan ke pantai siangau	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1000		
	- Pembangunan siring jalan Air Majid RT 05	Panjang Jalan yang direkonstruksi	400		
	- Peningkatan jalan RT. 014 Dusun Nyikep, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1000		
	Peningkatan Jalan Belakang SMPN 4 Muntok - Kuburan Dusun III - Dusun III belak, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	500		
	Pembangunan Siring Jalan Kampung Jawa RT.17 Desa Cupat, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1000		
	Peningkatan jalan gang nangka ke gang melinjo (Bakir) Desa Cupat, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	400		
	Peningkatan jalan dusun tegek desa benteng kota kecamatan tempilang, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1000		
	Rehabilitasi siring kampung sidorejo, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	250		
	Peningkatan jalan argotirto gang nila, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	150		
	pembangunan dan peningkatan jalan desa di Kelurahan kelapa, Kecamatan Kelapa, Kab.Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	5 KM		
	Peningkatan Jalan Gang 25 RT 11 Rw 05 Kelurahan Kelapa kecamatan kelapa, Kab. Bangka	Panjang Jalan yang direkonstruksi	300		
	Peningkatan Jalan rt 01 dan lingkar hutan larang lestari, kelapa, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	250		
	Peningkatan Jalan Mari ayu, kelapa, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	200		
	Pembangunan Siring Jalan RT 05 Gang Alfisaimi Belo Laut, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	300		
	Peningkatan Jalan gang makmur RT 01 kelurahan menjelang, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	350		
	Peningkatan jalan gg rukun RT 02, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	275		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Jalan gg damai RT 03 menjelang, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	175		
	Peningkatan Jalan desa air menduyung kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	800		
	Pembangunan Siring Jalan desa air menduyung kecamatan simpang teritip, Kab. Babar	Panjang Jalan yang direkonstruksi	500		
	Rehabilitasi siring Jalan RT,05 dan RT 07 Desa Kacung, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	600		
	Peningkatan jalan RT 04 sampai RT 01, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1200		
	Peningkatan jalan Pemakaman Dusun 1, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1200		
	Peningkatan jalan Jalan gang cong sipen, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	500		
	Pembangunan Siring jalan raya dusun tambang 25, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	200		
	Pembangunan Siring depan gereja dusun cupat, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	700		
	Peningkatan jalan dusun tambang 25 (arah Kuburan dan RT 3), Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	406		
	Peningkatan jalan jalan raya dusun cupat RT 11, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	100		
	Peningkatan jalan Gang Sanyot RT 05 Kelapa Timur, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	600		
	Peningkatan jalan gang binjai, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	250		
	Peningkatan jalan tembus Gg. Cek kelurahan sungai baru, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	300		
	Pembangunan siring Jalan rt 001 rw 002 di samping lapangan gelora muntok	Panjang Jalan yang direkonstruksi	500		
	Pembangunan Siring kelurahan sungai baru, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	200		
	Peningkatan Jalan masuk gereja Sekarbiru, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	80		
	Pembangunan Siring Jl. Payak RT 01, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	100		
	Pembangunan Siring dekat rumah Bapak Man, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	1200		
	Peningkatan Jalan AMD Desa kundi, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	750		
	Pembangunan Siring Jalan Dusun parit 4, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	200		
	Peningkatan Jalan masuk gereja dusun parit 4, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	80		
	Rehabilitasi siring dusun parit 4 desa sekar biru kecamatan parittiga, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	250		
	Pembangunan Talud Jalan Dusun tayu, Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang direkonstruksi	300		
	Peningkatan jalan Perumahan muntok permai (SMPN 4 Muntok)	Panjang Jalan yang direkonstruksi	300		
	Pemeliharaan Berkala Jalan		7.400 M	2.758.042.500,00	
	- Pemeliharaan Berkala Jalan gang taqwa Kp. Air Terjun RT. 001 RW. 002 Kelurahan		300 M		
	- Pemeliharaan berkala jalan dusun tayu - pantai jerangkat		1195 M		
	- Pemeliharaan berkala jalan desa pusuk		370 M		
	Pemeliharaan berkala jalan TPU Air Belo, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo		600 M		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya jalan kabupaten seluruh Bangka Barat	6 kecamatan	6.015.875.000,00	2.000.000.000,00
	- Pemeliharaan rutin jalan se Bangka Barat		6 kecamatan		
	Pembangunan Jembatan			3.407.625.000,00	
	Pembangunan Jembatan menuju perkuburan Dusun Sadar Jaya, Kab. Bangka Barat		10 M		
	Pembangunan Jembatan sawah adin desa dendang, Kab. Bangka Barat		15 M		
	- Pembangunan jembatan dusun parit 4, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru		24 M		
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhab	2 Unit	399.710.000,00	399.710.000,00
	- Rehabilitasi Jembatan Sungai Terabek				
	- Rehabilitasi Jembatan Air Cengal				
	- Rehabilitasi Jembatan Jebu 1				
	- Rehabilitasi Jembatan Jebu 2				
	- Rehabilitasi Jembatan Air Tenam				
	- Rehabilitasi jembatan kayu dusun sadar jaya				
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang di pelihara	3 Unit	100.000.000,00	320.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase rekomendasi IUJK**	**100,00%**	**92.395.000,00**	**400.000.000,00**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Tersedianya tenaga terampil bersertifikasi**	**60 Orang**	**92.395.000,00**	**300.000.000,00**
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga terampil bersertifikasi	60 Orang	92.395.000,00	300.000.000,00
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang**	**60%**	**306.068.000,00**	**425.000.000,00**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**28,57%**	**158.034.000,00**	**275.000.000,00**
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	1 Dokumen (RDTR Muntok)	158.034.000,00	150.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota**	**1 Kegiatan**	**148.034.000,00**	**150.000.000,00**
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan TKPRD	1 Kegiatan	148.034.000,00	150.000.000,00
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.588.922.750,00**	**375.000.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**1.588.922.750,00**	**375.000.000,00**
1	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase lahan yang bisa di bebaskan untuk pembangunan**	**100%**	**1.485.415.000,00**	**175.000.000,00**
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terfasilitasinya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.485.415.000,00**	**175.000.000,00**
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya keg. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1.485.415.000,00	175.000.000,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase ketersediaan data tanah kosong di Kabupaten Bangka barat**	**78,53%**	**103.507.750,00**	**150.000.000,00**
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	**Terlaksanya kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**1 Kegiatan**	**103.507.750,00**	**100.000.000,00**
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya kegiatan inventarisasi tanah aset pemda	1 Kegiatan	103.507.750,00	100.000.000,00
3	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase ketersediaan data penggunaan tanah dan pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten**	**33,33%**	**-**	**50.000.000,00**
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya kegiatan pendataan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Kegiatan**	**-**	**50.000.000,00**
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Tersusunnya Dok. Nilai Tanah	1 Dokumen	-	-
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**49.723.290.078,00**	**15.322.193.000,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Perhubungan)
OPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**104.819.146.561,00**	**9.296.884.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**9.666.092.561,00**	**7.146.884.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**7.335.810.450,00**	**5.756.884.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran yang Tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran yang Tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.510.000.000,00**	**3.512.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n Perangkat	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	12 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**22.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari Tertentu Lainnya beserta Atribut Kelengkapannya	25 Stel	0,00	12.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**946.008.350,00**	**671.800.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	28.660.000,00	30.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	290.948.350,00	170.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	4.800.000,00	4.800.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	122.500.000,00	65.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	489.600.000,00	390.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya Arsip Dinamis Perangkat Daerah	12 Bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**2.491.318.100,00**	**1.184.490.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 Bulan	731.100.000,00	89.100.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	10.048.100,00	10.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	732 OB	1.748.170.000,00	1.082.890.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**343.984.000,00**	**313.094.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	2.310.000,00	2.310.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit mobil dan 2 mesin rumput	341.674.000,00	310.784.000,00
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial yang Tertangani**	**100%**	**164.960.000,00**	**180.000.000,00**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota**	**100%**	**14.960.000,00**	**30.000.000,00**
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Terlaksananya Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	1 dokumen	14.960.000,00	30.000.000,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota**	**100%**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	5 Rumah	150.000.000,00	150.000.000,00
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase rumah layak huni dalam kawasan kotaku**	**93%**	**882.626.111,00**	**300.000.000,00**
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**60%**	**882.626.111,00**	**300.000.000,00**
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	15 unit	393.750.000,00	300.000.000,00
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2 paket	488.876.111,00	0,00
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**15%**	**290.233.200,00**	**560.000.000,00**
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota**	**15%**	**290.233.200,00**	**560.000.000,00**
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni umtuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	10 unit	230.264.000,00	500.000.000,00
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Perumahan Masyarakat (BOP BSPS)	5 kecamatan	59.969.200,00	60.000.000,00
5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase desa dengan infrastruktur dasar yang memadai**	**100%**	**992.462.800,00**	**350.000.000,00**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU perumahan**	**100%**	**992.462.800,00**	**350.000.000,00**
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	920 M	992.462.800,00	350.000.000,00
	- Pembuatan Jalan Setapak Pembangunan Jalan Beton RT 001 - RW 014		585 M		
	- Pembuatan Jalan Setapak RT 5 Desa Beteng Kota		300 M		
	- Talud kp. Keranggan		35 meter		
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**95.153.054.000,00**	**2.150.000.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)**	**75%**	**998.912.800,00**	**100.000.000,00**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem penyedian air minum (SPAM) di daerah Kab/Kota	15%	**998.912.800,00**	**100.000.000,00**
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3 Desa	899.967.800,00	0,00
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan SPAM	22 Desa Pasca Pamsimas	98.945.000,00	100.000.000,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang aman**	**90%**	**1.354.486.000,00**	**600.000.000,00**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah**	**3%**	**1.354.486.000,00**	**600.000.000,00**
	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	111 unit	905.637.600,00	200.000.000,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	333 unit (310 tanki septik dan 23 Ipal)	198.848.400,00	200.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	72 OB	250.000.000,00	200.000.000,00
3	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung negara dalam kondisi baik**	**100%**	**92.300.000.000,00**	**1.100.000.000,00**
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**100%**	**92.300.000.000,00**	**1.100.000.000,00**
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Sport hall serta Penjaga 4 orang, pupuk, operasional mesin dll	92.300.000.000,00	1.100.000.000,00
4	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Realisasi Perencanaan Bangunan dan Lingkungan yang terlaksana (kota pusaka)**	**44%**	**499.655.200,00**	**350.000.000,00**
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**499.655.200,00**	**350.000.000,00**
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 dokumen	499.655.200,00	350.000.000,00
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.420.295.800,00**	**1.410.000.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**2.420.295.800,00**	**1.410.000.000,00**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Menurunnya tingkat kecelakaan lalulintas sesuai kewenangan**	**44%**	**2.384.778.600,00**	**1.310.000.000,00**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Perlengkapan Jalan di Kabupaten**	**20%**	**1.955.570.100,00**	**850.000.000,00**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten	200 unit	1.739.790.100,00	0,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Perlengkapan Jalan	12 Bulan	215.780.000,00	850.000.000,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**20%**	**49.760.000,00**	**50.000.000,00**
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Teregistrasinya / Kalibrasi alat - alat uji Kendaraan Bermotor	8 unit	49.760.000,00	50.000.000,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten**	**15%**	**79.676.000,00**	**110.000.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	29.979.000,00	50.000.000,00
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 kegiatan	49.697.000,00	0,00
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**20%**	**249.927.500,00**	**300.000.000,00**
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3 kegiatan	249.927.500,00	250.000.000,00
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Terlaksananya penetapan Rencana Induk Jaringan Jalan**	**82%**	**49.845.000,00**	**0,00**
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen (update)	49.845.000,00	0,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan**	**100%**	**35.517.200,00**	**100.000.000,00**
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**25%**	**35.517.200,00**	**100.000.000,00**
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 kegiatan	35.517.200,00	100.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan				**107.239.442.361,00**	**10.706.884.000,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat)
OPD : Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**10.919.584.000,00**	**11.972.216.500,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**10.919.584.000,00**	**11.972.216.500,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**5.426.034.000,00**	**5.789.111.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan Anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah yang	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**3.810.000.000,00**	**3.812.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan dokumenkeuangan akhir tahun perangkat daerah	1 dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen laporan dokumen keuangan bulanan/triwulan/semestera n perangkat daerah	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran perangkat	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.000.000,00**	**263.395.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu	25 stel	-	252.395.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	4.000.000,00	11.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**850.915.000,00**	**617.800.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	2.700.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	2.125.000,00	3.300.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	43.350.000,00	44.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	12 bulan	35.000.000,00	60.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	5.000.000,00	5.500.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya bahan/material	12 bulan	40.000.000,00	55.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat koodinasi dan konsultasi skpd	12 bulan	720.240.000,00	440.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**533.710.000,00**	**706.099.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran biaya telepon listrik dan internet	12 bulan	42.000.000,00	46.200.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9 unit	6.490.000,00	11.869.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	192 OB	483.220.000,00	646.030.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**	**195.409.000,00**	**339.317.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangandinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	27.775.000,00	43.175.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	154.584.000,00	236.445.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	10.000.000,00	55.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 unit	3.050.000,00	4.697.000,00
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**4.611.688.000,00**	**5.298.540.500,00**
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**100%**	**4.162.678.000,00**	**4.807.506.000,00**
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	terlaksananya pencegahan gangguan ketertiban dan ketertiban umum	24 kali 48 kali 96 kali	135.400.000,00	88.000.000,00
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran perda	12 bulan	203.778.000,00	33.000.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	terlaksananya sistem keamanan dan ketertiban desa	6 kecamatan	58.980.000,00	82.500.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Anggota satpol PP, terlaksananya piket pada pos-pos penjagaan, terciptanya penegakan disiplin anggota piket pos Jumlah Anggota satpol PP, terlaksananya piket pada pos-pos penjagaan, terciptanya penegakan disiplin anggota piket pos	10 Pos 118 anggota	3.727.960.000,00	4.422.506.000,00
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya koordinasi antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penenganan gangguan ketertiban umum	12 bulan	36.560.000,00	181.500.000,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100%**	**449.010.000,00**	**491.034.500,00**
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	terlaksananya monitoring pelaksanaan terhadap perda dan perkada	6 kecamatan	21.700.000,00	212.734.500,00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	terlaksananya penyelesaian pelanggaran perda dan perkada	12 bulan	427.310.000,00	107.800.000,00
3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Terlaksananya Penanggulangan Bencana**	**100%**	**408.515.000,00**	**422.565.000,00**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Tersedianya informasi rawan bencana daerah**	**100%**	**150.000.000,00**	
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bangka Barat	1 dokumen	150.000.000,00	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100%**	**225.555.000,00**	**290.213.000,00**
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan mitigasi bencana	1 kegiatan	19.500.000,00	30.965.000,00
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	tertangani pasca bencana kabupaten	90 persen	3.440.000,00	23.980.000,00
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat	84 OB	202.615.000,00	235.268.000,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100%**	**32.960.000,00**	**132.352.000,00**
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	100 persen	32.960.000,00	132.352.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran**	**100%**	**473.347.000,00**	**462.000.000,00**
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran**	**100%**	**450.370.000,00**	**362.000.000,00**
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya pemadaman dan pengendalian kebakaran	10 kali	208.680.000,00	120.000.000,00
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	pembayaran honorarium PHL Damkar terselenggaranya penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran	84 OB 12 bulan	241.690.000,00	242.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**100%**	**22.977.000,00**	**100.000.000,00**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Tersosialisasinya masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1 kegiatan	22.977.000,00	100.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana				**10.919.584.000,00**	**11.972.216.500,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Sosial)

OPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**10.018.780.000,00**	**7.521.900.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**10.018.780.000,00**	**7.521.900.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**6.511.225.000,00**	**5.194.800.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang	4 Dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.510.000.000,00**	**3.012.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	**4.500.000.000,00**	3.000.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	**2.000.000,00**	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran Perangkat	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**830.250.000,00**	**930.000.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedia Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	35.000.000,00	40.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	2.750.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	40.000.000,00	40.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	710.000.000,00	800.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**993.975.000,00**	**1.029.800.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	1.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	44.475.000,00	76.800.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	7.500.000,00	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	384 OB	941.000.000,00	941.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**135.000.000,00**	**162.500.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	30.000.000,00	35.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	80.000.000,00	100.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	20.000.000,00	22.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Peningkatan kemampuan PSKS melalui program pemberdayaan sosial**	**100%**	**658.000.000,00**	**760.500.000,00**
		Persentase jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang terlibat dalam upaya penyelenggaran kesejahteraan sosial	**100%**		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pendamping yang menerima bimbingan sosial dan peningkatan kemampuan potensi**	**100%**	**658.000.000,00**	**760.500.000,00**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keterampilan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat dalam Melaksanakan Peran, Tugas dan Fungsi Dalam Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diwilayah desa/kelurahan	74 Orang	447.000.000,00	666.000.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas dan Peran Aktif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	6 Orang	36.000.000,00	79.500.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas dan Peran aktif SDM karang taruna dalam upaya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1 Karang Taruna	170.000.000,00	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kualitas SDM LK3 dalam Pelayanan Masalah Sosial	100 Persen	5.000.000,00	15.000.000,00
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase cakupan penanganan PPKS melalui pelayanan rehabilitasi sosial**	**100%**	**2.334.000.000,00**	**927.600.000,00**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti**	**100%**	**2.334.000.000,00**	**867.600.000,00**
	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan permakanan Jumlah lansia terlantar yang memperoleh bantuan permakanan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh bantuan permakanan	342 Orang 580 Orang 168 Orang	2.132.000.000,00	665.600.000,00
	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas dan lansia yang memperoleh sandang khusus	68 Orang	22.000.000,00	22.000.000,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terselenggaranya Komda Lansia	1 Kegiatan	30.000.000,00	100.000.000,00
	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya operasional/ penguatan Rumah Perlindungan Sosial/ Rumah Singgah Terselenggaranya fasilitasi pembinaan Anak/Lansia/Disabilitas di Panti/Balai	1 Kegiatan 5 Orang	150.000.000,00	80.000.000,00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial**	**100%**	**0,00**	**60.000.000,00**
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya Operasional Pendamping PKH	12 Orang	0,00	60.000.000,00
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**100%**	**275.000.000,00**	**413.200.000,00**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya updating verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan PPKS**	**100%**	**275.000.000,00**	**413.200.000,00**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2 Dokumen	10.000.000,00	35.000.000,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penerima Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran	1 Kegiatan	10.000.000,00	25.000.000,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Bantuan Sosial Bangka Barat Sejahtera	286 KPM	215.000.000,00	353.200.000,00
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Produktifitas Sosial Ekonomi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi	1 Kube, 4 UEP FM	40.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani**	**100%**	**240.555.000,00**	**225.800.000,00**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial**	**100%**	**40.800.000,00**	**60.800.000,00**
	Penyediaan Makanan	Tersedianya Kebutuhan Dasar Permakanan Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Persen	40.800.000,00	60.800.000,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah taruna siaga bencana dalam penanganan korban bencana, koordinasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana**	**100%**	**199.755.000,00**	**165.000.000,00**
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatnya Peran Aktif Taruna Siaga Bencana dalam Penanganan Korban Bencana	47 Orang	199.755.000,00	165.000.000,00
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.673.556.400,00**	**2.100.000.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**4.673.556.400,00**	**2.100.000.000,00**
1	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase penataan desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku**	**100%**	**48.950.000,00**	**100.000.000,00**
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**Terlaksananya penyelenggaraan penataan desa**	**60 Desa**	**48.950.000,00**	**100.000.000,00**
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Penataan Wilayah dalam Desa	60 Desa	29.730.000,00	60.000.000,00
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Penataan Kewenangan Desa	60 Desa	19.220.000,00	40.000.000,00
2	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase kerjasama antar desa yang terbentuk**	**42%**	**88.015.000,00**	**160.000.000,00**
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Jumlah kerjsama yang terbentuk antar desa**	**7 kerjsama**	**88.015.000,00**	**160.000.000,00**
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/ Kota	1 Kecamatan	18.995.000,00	30.000.000,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	7 Desa	29.660.000,00	50.000.000,00
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terfasilitasinya Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Kawasan Pedesaan	39.360.000,00	80.000.000,00
3	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa dengan status minimal swakarya**	**60%**	**3.355.211.400,00**	**510.000.000,00**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelengaaran administasi pemerintahan desa**	**60 desa**	**3.355.211.400,00**	**510.000.000,00**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	60 Desa	12.780.000,00	30.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pemerintahan Desa	60 Desa	24.515.000,00	50.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60 Desa	24.995.000,00	50.000.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terfasilitasinya pelaksanaan Evaluasi penggunaan Dana Desa serta Dana Transfer	60 Desa	14.297.500,00	30.000.000,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	60 BUMDesa	103.000.000,00	80.000.000,00
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	55 Desa	3.082.625.500,00	0,00
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terasilitasinya pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	55 Desa	9.717.500,00	20.000.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terfasilitasinya Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa	60 Desa	9.995.000,00	20.000.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terfasilitasinya Inventarisasi Aset Desa	60 Desa	9.947.500,00	20.000.000,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan bagi BPD	13 Desa	15.555.000,00	50.000.000,00
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Pelaporan Kepala Desa	55 Desa	9.815.900,00	20.000.000,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan	1 Event	37.967.500,00	100.000.000,00
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase BUMDes yang berkembang**	**15%**	**1.181.380.000,00**	**1.330.000.000,00**
		Persentase peningkatan status desa Mandiri	**60%**		
		Persentase pengentasan desa tertinggal	**100%**		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif**	**50%**	**1.181.380.000,00**	**1.330.000.000,00**
		Lembaga adat desa yang aktif	**13 lembaga adat**		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	**Alat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan**	**2 alat**		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum adat	60 Desa	24.995.000,00	150.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	3 Lembaga, 27 KPM	123.000.000,00	100.000.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tersusunnya Laporan Pengembangan Usahakan Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa, serta Terlaksanannya Bimtek Bumdes	4 Laporan, 30 Bumdes	377.955.000,00	400.000.000,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pembinaan Posyantek Terfasilitasnya ALat Teknologi Tepat Guna Unggulan	5 Posyantek, 8 Alat	126.865.000,00	80.000.000,00
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat	60 Desa	28.565.000,00	100.000.000,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pesentase PKK Aktif (desa/kelurahan)	100 Persen	500.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**14.692.336.400,00**	**9.621.900.000,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
OPD : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.537.334.500,00**	**7.032.710.750,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**5.649.689.500,00**	**5.695.689.500,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**5.136.980.000,00**	**5.182.980.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**46.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	20.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pengendaliaan dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.710.000.000,00**	**3.712.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir perangkat daerah	1 dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporooran dan analisis Prognosis Realiasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek retribusi daerah	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**22.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu linnya beserta atribut kelengkapnnya	25 stel	0,00	12.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawian perangkat Daerah	12 bln	2.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**462.540.000,00**	**465.040.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	15 jenis/bln	2.500.000,00	2.500.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan kegiatan	12 bln	35.000.000,00	35.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bln	30.000.000,00	30.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bln	5.040.000,00	5.040.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material	12 bln	40.000.000,00	40.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bln	342.500.000,00	342.500.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat Daerah	12 bln	2.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**828.750.000,00**	**828.750.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 bln	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Biaya telpon, Listrik dan internet	12 bln	86.400.000,00	86.400.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pembayaran Jasa pelayanan Umum kantor	300 OB	740.350.000,00	740.350.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**	**105.190.000,00**	**105.190.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit mobil	38.250.000,00	38.250.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit motor 2 unit mobil	36.940.000,00	36.940.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit gedung	30.000.000,00	30.000.000,00
2	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**100%**	**422.407.500,00**	**422.407.500,00**
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**4 jenis pelatihan**	**422.407.500,00**	**422.407.500,00**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Otomotif, Listik, Las, dan service AC Split	60 org/ 4 jenis pelatihan	422.407.500,00	422.407.500,00
3	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**50%**	**14.727.000,00**	**14.727.000,00**
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**5 jenis/20 perusahaan**	**14.727.000,00**	**14.727.000,00**
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersediaanya data informasi Bursa Kerja di Kabupaten Bangka Barat	5 jenis	7.877.000,00	7.877.000,00
	Job Fair/Bursa Kerja	Tersedianya kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan Kerja	20 perusahaan	6.850.000,00	6.850.000,00
4	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Angka Perselisihan Yang Terfasilitasi dan Terselesaikan**	**100%**	**75.575.000,00**	**75.575.000,00**
		Jumlah pekerja yang diikutsertakan pada program jamsos tenaga tenaga	**50%**		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Terselesainya kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten Bangka Barat**	**5 kasus**	**75.575.000,00**	**75.575.000,00**
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Survey Perizinan	1 dokumen	9.910.000,00	9.910.000,00
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terdatanya serikat pekerja yang ada di perusahaan - perusahaan	1 dokumen	4.835.000,00	4.835.000,00
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya masalah ketenaga kerjaan di Kabupaten Bangka Barat	1 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terdatanya kepesertaan jaminan sosial di perusahaan	1 dokumen	10.830.000,00	10.830.000,00
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**887.645.000,00**	**1.337.021.250,00**
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Kebijakan Penanaman Modal**	**5%**	**209.325.000,00**	**67.701.250,00**
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Peraturan yang disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi**	**1 Peraturan**	**9.325.000,00**	**9.325.000,00**
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Raperbub tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	9.325.000,00	9.325.000,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemetaan potensi dan Peluang Investasi**	**1 Peta Potensi Daerah**	**200.000.000,00**	**58.376.250,00**
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah	1 apl.peta digital 1 dokumen	200.000.000,00	58.376.250,00
2	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investasi yang berinvestasi**	**175 M**	**506.755.000,00**	**1.131.755.000,00**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sarana Promosi Potensi Penanaman Modal**	**3 Sarana promosi**	**506.755.000,00**	**1.131.755.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pameran Investasi Bangka Barat dan ikut serta pameran luar daerah (Apkasi dan Trade Expo)	3 kali	506.755.000,00	1.131.755.000,00
3	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan**	**80**	**151.565.000,00**	**117.565.000,00**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Bangka Barat**	**1000 izin**	**151.565.000,00**	**117.565.000,00**
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data Perizinan	1 dokumen	81.565.000,00	117.565.000,00
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Berita Acara Survey Perizinan	150	70.000.000,00	0,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Perusahaan Yang Mematuhi Kelengkapan Administrasi Investasi/Penanaman Modal**	**5%**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kontribusi Investasi dalam negeri/PMDN**	**20%**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tertibnya pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah	4 laporan	10.500.000,00	10.500.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tertibnya pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah sesuai peraturan perundang-undangan	4 laporan	9.500.000,00	9.500.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi				**6.537.334.500,00**	**7.032.710.750,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Pangan)
Urusan Pemerintahan Pilihan (Bidang Pertanian)
OPD : Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**14.605.424.065,00**	**13.668.870.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**14.605.424.065,00**	**13.668.870.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**14.294.997.340,00**	**13.300.370.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**39.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**10.910.000.000,00**	**9.115.000.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	10.900.000.000,00	9.100.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.000.000,00	5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran Perangkat	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	6.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.000.000,00**	**22.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	0,00	12.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	4.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**852.633.140,00**	**1.327.500.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk 8 kantor	12 bulan	15.133.140,00	40.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk 8 kantor	12 bulan	65.000.000,00	85.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	30.000.000,00	40.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	5.000.000,00	15.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material untuk 8 kantor	12 bulan	70.000.000,00	75.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta koordinasi dalam rangka menjolok dana APBN	12 bulan	650.000.000,00	1.000.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.500.000,00	7.500.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**2.297.066.500,00**	**2.326.370.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat/paket kantor	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet untuk 8 kantor	12 bulan	98.523.800,00	120.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	27.172.700,00	35.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor (51 PHL) dan Termasuk Gaji PPL sebanyak 22 orang	1 tahun	2.169.370.000,00	2.169.370.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**199.297.700,00**	**460.000.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (R4 4unit, R3 1unit; R2 2 unit (79 unit utk byr Pajak)	12 bulan	185.280.200,00	250.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	14.017.500,00	210.000.000,00
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Tingkat Ketersediaan Pangan**	**2310 kkal/ 63 g/ 75 g**	**108.031.900,00**	**123.500.000,00**
		Tingkat Konsumsi Pangan	**2100 kkal/ 57 g/ 68 g**		
		Skor Pola Pangan Harapan	**88,9**		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	**Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah**	**90%**	**93.749.800,00**	**43.500.000,00**
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya laporan analisis kondisi ketersediaan pangan kabupaten melalui Neraca Bahan Makanan	5 Laporan	15.300.000,00	20.000.000,00
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Fasilitasi pembelian produk petani terdampak harga anjlok (cabai) dan penyaluran bantuan pangan	1 komoditas	44.506.800,00	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya laporan pemantauan serta analisis pasokan dan harga pangan di Kab. Bangka Barat	5 Laporan	22.367.000,00	23.500.000,00
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Fasilitasi kerjasama kemitraan pemasaran hasil TPH (ubi cassesa) dan pengawasan pelaksanaannya	1 kegiatan	11.576.000,00	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Tercapainya target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)**	**90%**	**14.282.100,00**	**80.000.000,00**
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya laporan analisis pola konsumsi pangan penduduk dan skor PPH	5 Laporan	14.282.100,00	15.000.000,00
3	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**80%**	**124.691.225,00**	**160.000.000,00**
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Tersedianya informasi kerentanan dan ketahanan pangan**	**100%**	**54.758.600,00**	**75.000.000,00**
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersedianya laporan FSVA (Food Security and Fulnerability Atlas/ Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) Kabupaten	16 Laporan	54.758.600,00	75.000.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kab. Babar**	**80%**	**69.932.625,00**	**85.000.000,00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan analisis situasi pangan dan gizi kabupaten sebagai deteksi dini kerawanan pangan	5 Laporan	29.575.000,00	40.000.000,00
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Babar	15 Ton	40.357.625,00	45.000.000,00
4	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman**	**90%**	**77.703.600,00**	**85.000.000,00**
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman**	**90%**	**77.703.600,00**	**85.000.000,00**
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan lintas sektoral di Kab.	1 kegiatan	25.278.600,00	25.000.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya pengujian mutu dan keamanan pangan terhadap sampel PSAT	25 Sampel	52.425.000,00	60.000.000,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.423.907.125,00**	**1.730.000.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**2.423.907.125,00**	**1.730.000.000,00**
1	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**100%**	**371.443.850,00**	**845.000.000,00**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pertanian**	**100%**	**98.539.850,00**	**250.000.000,00**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Peningkatan efektifitas dan efisiensi bantuan alat mesin pertanian yang telah dihibahkan ke kelompok tani/UPJA	20 kelompok	32.939.850,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Inventarisasi kondisi dan kebutuhan alat dan mesin pertanian guna persiapan dukungan kegiatan food estate dan intensifikasi lahan komoditas tanaman rempah kapulaga	1 data		
		Fasilitasi pendampingan penyaluran KUR alsintan ke kelompok tani/UPJA/petani	6 kecamatan		
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Fasilitasi penyusunan erdkk dan aplikasi kartu tani guna mendapatkan data kebutuhan pupuk bersubsidi yang valid dan kesesuaian penyaluran pupuk di tingkat petani	6 kecamatan	65.600.000,00	250.000.000,00
		Peningkatan kemandirian kelompok tani dalam pemenuhan kebutuhan pupuk dan pestisida dengan pengolahan pupuk dan pestisida organik di tingkat kelompok	6 kecamatan		
		Pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida yang beredar di Kabupaten Babar	1 tahun		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme**	**100%**	**166.982.000,00**	**195.000.000,00**
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah varietas unggul lokal yang akan didaftarkan	5 varietas unggul lokal buah-buahan	84.754.000,00	100.000.000,00
		Jumlah penangkat benih/bibit yang dibina	7 penangkar benih perkebunan		
		Jumlah penangkar benih/bibit tanaman yang dibina dalam usaha penangkaran benih tanaman lokal	2 penangkar benih pangan (padi) dan 2 penangkar benih horti		
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah tanaman karet entres yg terpelihara	1 ha	14.998.000,00	20.000.000,00
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	tersedianya Nitrogen Cair untuk mendukung peningkatan kualitas genetik ternak	3 POS IB	67.230.000,00	75.000.000,00
		jumlah sarpras untuk mendukung peningkatan kualitas genetik ternak	2 jenis		
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**100%**	**105.922.000,00**	**150.000.000,00**
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	tersedianya HPT bagi ternak sapi dan tersedianya pakan tambahan ternak sapi dan sarpras di UPT Kelapa	1 Ha dan 1 tahun (operasional UPT)	105.922.000,00	50.000.000,00
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**100%**	**1.496.510.000,00**	**115.000.000,00**
	Pengembangan Prasarana Pertanian	**berkembangnya sarpras pertanian**	**100%**	**640.110.000,00**	**100.000.000,00**
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengelolaan Jalan Pertanian	1 dok	595.110.000,00	
		Pengelolaan Irigasi Tersier	1 dok		
		Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1 dok		
		Dukungan Manajemen	1 tahun		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah data dan informasi Update potensi perkebunan jumlah laporan bulanan data pertanian dalam 1 tahun jumlah laporan bulanan updating data peternakan dalam 1 tahun	6 Buku 12 Bulan	45.000.000,00	100.000.000,00
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Terkoneksinya Akses Jalan Pertanian**	**100%**	**851.200.000,00**	**0,00**
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Akses Prasarana kawasan pertanian	15 Km	851.200.000,00	
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Terkelolanya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten**	**100%**	**5.200.000,00**	**15.000.000,00**
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	jumlah laporan bulanan data peternakan dalam 1 tahun	12 Bulan	5.200.000,00	15.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani**	**100%**	**171.162.375,00**	**220.000.000,00**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terjaminnya kesehatan hewan dalam wilayah Kabupaten**	**100%**	**141.164.775,00**	**160.000.000,00**
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah obat-obatan ternak tersedianya alat penunjang pelayanan kesehatan hewan	26 jenis 8 jenis	102.194.715,00	90.000.000,00
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	jumlah peralatan dan perlengkapan medik veteriner	5 jenis peralatan dan 5 jenis perlengkapan medic veteriner	38.970.060,00	70.000.000,00
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Medic Veteriner**	**100%**	**29.997.600,00**	
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya bimbingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha	1 kegiatan	29.997.600,00	
4	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Bencana Pertanian yang Tertanggulangi**	**100%**	**295.140.900,00**	**300.000.000,00**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten**	**100%**	**295.140.900,00**	**300.000.000,00**
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah Luasan pengendalian OPT tanaman Pangan dan Hortikultura Jumlah luasan pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	200 Ha 100 Ha	295.140.900,00	300.000.000,00
5	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Meningkatnya jumlah unit usaha pertanian yang memenuhi standar yang berlaku**	**3 perusahaan**	**29.750.000,00**	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah	Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1 tahun	**29.750.000,00**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Perusahaan perkebunan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha perkebunan	2 kali	29.750.000,00	
6	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase POKTAN/GAPOKTAN/ Petani yang Mendapat Penyuluhan**	**100%**	**59.900.000,00**	**250.000.000,00**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Terlaksanannya pelaksanaan penyuluhan**	**2 kelembagaan**	**59.900.000,00**	**250.000.000,00**
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah percontohan di BPP	2 unit	49.900.000,00	180.000.000,00
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah KEP yang tumbuh	1 unit	10.000.000,00	70.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Pertanian dan Pangan				**17.029.331.190,00**	**15.398.870.000,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Pilihan, Kehutanan
OPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**19.417.026.310,00**	**6.673.933.600,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**19.417.026.310,00**	**6.673.933.600,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**4.521.952.260,00**	**4.749.532.100,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.610.000.000,00**	**2.612.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendafaran objek retribusi daerah	12 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**22.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 Stel	0,00	12.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	2.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**403.056.000,00**	**445.892.100,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor	12 Bulan	7.815.000,00	8.596.500,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	2.450.000,00	2.695.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	30.086.000,00	33.094.600,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	40.000.000,00	44.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang_Undangan	12 Bulan	5.205.000,00	6.006.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	40.000.000,00	44.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	275.000.000,00	302.500.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	2.500.000,00	5.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.312.296.260,00**	**1.443.530.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 Bulan	5.620.000,00	6.182.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	201.960.000,00	222.156.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Unit	13.196.260,00	14.520.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	432 OB	1.091.520.000,00	1.200.672.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**160.100.000,00**	**172.610.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	160.100.000,00	137.610.000,00
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	**2 Dokumen**	**297.924.820,00**	**180.000.000,00**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**100%**	**149.002.160,00**	**0,00**
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	149.002.160,00	0,00
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**100%**	**148.922.660,00**	**180.000.000,00**
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS RDTR	1 Dokumen	148.922.660,00	180.000.000,00
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**jumlah capaian pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**4 kegiatan**	**597.215.550,00**	**684.250.500,00**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat**	**100%**	**550.989.600,00**	**636.554.500,00**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen RPPMA Kabupaten/Kota, Data Indeks Kualitas Air, dan Data Indeks Kualitas Udara	1 dokumen 65 Poin 89 Poin	120.293.500,00	165.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen Emisi GRK	1 Dokumen	21.294.900,00	21.554.500,00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Bahan-bahan operasional laboratorium Dokumen Akreditasi KAN Jumlah alat yang dikalibrasi Tersedinya alat Laboratorium	6 Paket 1 Dokumen Akreditasi 21 Alat	409.401.200,00	450.000.000,00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat**	**100%**	**46.225.950,00**	**47.696.000,00**
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dokumen IKPLHD dan IKLH	2 Dokumen	46.225.950,00	47.696.000,00
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola**	**33,33%**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bangka Barat**	**100%**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman	Jumlah kelembagaan yang dibina	4 Lembaga	25.000.000,00	25.000.000,00
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**25%**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Terlaksananya Penyimpanan sementara Limbah B3 oleh Perusahaan/Badan**	**100%**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terverifikasinya usaha yang memenuhi syarat administrasi dan teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	15 Pelaku Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**19%**	**100.000.000,00**	**230.000.000,00**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**100%**	**100.000.000,00**	**230.000.000,00**
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data-data ketaatan terhadap izin lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat	63 Perusahaan	100.000.000,00	110.000.000,00
7	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase keikutsertaan sekolah yang menerapkan prinsip sekolah yang berbasis lingkungan**	**9%**	**42.310.000,00**	**46.541.000,00**
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**42.310.000,00**	**46.541.000,00**
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata	19 Sekolah	42.310.000,00	46.541.000,00
8	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara**	**13%**	**13.802.623.680,00**	**728.610.000,00**
	Pengelolaan Sampah	**Terlaksananya Pengelolaan sampah**	**100%**	**13.802.623.680,00**	**728.610.000,00**
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah	4 dokumen (SID, DED, AMDAL, dokumen tata batas terkait peningkatan TPA)	0,00	
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pembayaran honorarium PHL operasional kebersihan dan persampahan	1800 OB 12 Bulan	8.363.623.680,00	5.513.000.000,00
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pembayaran honorarium PHL operasional TPA (UPTD TPA)	132 OB 12 Bulan	5.439.000.000,00	728.610.000,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**684.515.900,00**	**670.560.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**684.515.900,00**	**670.560.000,00**
1	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Implementasi dokumen Rencana Pengelolaan Tahura**	**16%**	**684.515.900,00**	**670.560.000,00**
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)**	**100%**	**684.515.900,00**	**670.560.000,00**
	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah bibit yang tersedia untuk penanaman di Lahan Rehabilitasi TAHURA (tanaman kehutanan dan MPTS)	4 Ha	0,00	100.000.000,00
	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terjaganya Keutuhan kawasan Tahura, pembayaran PHL pengamanan kawasan	1 Kawasan, 60 OB	284.515.900,00	80.000.000,00
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Desa Penyangga Tahura	5 Kelembagaan	0,00	25.000.000,00
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Desain Tapak Tahura	1 Dokumen	400.000.000,00	265.560.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Lingkungan Hidup				**20.101.542.210,00**	**7.344.493.600,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Administrasi Kependudukan dan Capil
OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.307.721.042,00**	**5.468.377.027,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**6.307.721.042,00**	**5.468.377.027,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**5.881.221.582,00**	**4.873.010.070,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**45.650.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	16.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.400.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.400.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	11.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	9.350.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.110.000.000,00**	**2.113.750.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.000.000,00	2.750.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	5.500.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	5.500.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**9.350.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	6.000.000,00	9.350.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**24.750.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	20 stell	-	13.750.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000,00	11.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.066.930.902,00**	**616.472.148,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	5.489.680,00	14.312.320,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis (6 printer KTP, 6	638.000.000,00	50.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	4.525.200,00	15.943.158,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	19.232.500,00	45.694.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	43.784.952,00	62.436.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	1.320.000,00	5.500.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	152.078.570,00	169.586.670,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	200.000.000,00	247.500.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.500.000,00	5.500.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.623.262.450,00**	**1.889.376.885,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000,00	2.200.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	70.467.800,00	77.712.800,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	31.784.650,00	139.015.085,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	636 ob	1.519.010.000,00	1.670.449.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**	**1.047.028.230,00**	**173.661.037,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	15.821.850,00	42.310.939,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	19.981.380,00	56.951.598,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	7 unit	3.775.000,00	34.501.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	1.007.450.000,00	39.897.000,00
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen e-KTP**	**98%**	**292.366.150,00**	**296.220.276,00**
		Cakupan Kepemilikan Dokumen KK	**95%**		
		Cakupan Kepemilikan Dokumen KIA	**50%**		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Terlaksananya pelayanan Kependudukan secara optimal**	**100%**	**201.616.150,00**	**189.927.958,00**
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pendataan penduduk pendatang (Penduduk Non Permanen)	66 desa/kelurahan	6.600.000,00	20.382.318,00
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan Dokumen kependudukan dan perekaman (KK,KTP)	25000 dokumen	195.016.150,00	169.545.640,00
	Penataan Pendaftaran Penduduk	**Tersedianya Blangko dan Formulir terkait kependudukan**	**100%**	**90.750.000,00**	**106.292.318,00**
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Terbitnya Kartu Identitas Anak	15000 kartu	90.750.000,00	106.292.318,00
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran**	**97%**	**57.443.700,00**	**205.579.110,00**
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan	**100%**		
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian	**100%**		
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kematian	**100%**		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**Terlaksananya pelayanan Kependudukan secara optimal**	**100%**	**39.945.000,00**	**115.819.880,00**
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Penatausahaan dokumen pencatatan sipil secara digital	5000 berkas	25.900.000,00	37.485.800,00
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlayaninya kepemilikan akta-akta Pencatatan Sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dsb) penduduk	5000 dokumen	14.045.000,00	78.334.080,00
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku**	**100%**	**17.498.700,00**	**62.909.770,00**
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam administrasi pencatatan sipil	2 jenis laporan	17.498.700,00	39.250.420,00
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Cakupan pelaksanaan dan pelayanan kependudukan dengan sistem informasi kependudukan**	**100%**	**53.060.400,00**	**56.811.940,00**
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Data terkumpul dan tersaji dengan akurat**	**100%**	**11.157.500,00**	**25.432.440,00**
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Data kependudukan yang diolah dan disajikan dalam setahun	50000 data	4.302.200,00	12.965.480,00
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terjalinnya Kerjasama dalam pemanfaatan data	5 OPD	3.513.200,00	4.456.320,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Tersedianya data untuk pembangunan daerah	12 bulan	3.342.100,00	8.010.640,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terselenggara dengan baik**	**100%**	**10.312.900,00**	**10.510.190,00**
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya data yang dapat dimanfaatkan OPD, Desa/Keluarahan	66 Desa/Kelurahan, 11 OPD	3.741.400,00	9.285.540,00
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah data kependudukan yang terkonsolidasi dan terupdate secara manual	3000 data	6.571.500,00	1.224.650,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Pembinaan dan Pengawasan Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaskana**	**100%**	**31.590.000,00**	**20.869.310,00**
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Penggunaan Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Jarkomdat Dinas dan UPT	2 laporan	8.830.000,00	6.941.000,00
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 kali	22.760.000,00	13.928.310,00
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan**	**100%**	**23.629.210,00**	**36.755.631,00**
	Penyusunan Profil Kependudukan	**Profil Kependudukan tersusun dengan sempurna**	**100%**	**23.629.210,00**	**36.755.631,00**
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Kepedudukan	12 bulan	3.863.400,00	5.346.990,00
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang	Tersedianya Buku Profil	1 dokumen	19.765.810,00	31.408.641,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				**6.307.721.042,00**	**5.468.377.027,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
OPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.595.241.642,00**	**4.820.932.982,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**5.084.927.334,00**	**4.477.689.598,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**4.271.128.000,00**	**3.660.720.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**24.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	4 Dokumen	8.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen yang disusun	3 Dokumen	6.000.000,00	2.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	3 Dokumen	6.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.708.000.000,00**	**2.106.000.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.700.000.000,00	2.100.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**2.000.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**336.420.000,00**	**345.762.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	5.000.000,00	14.842.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	4.000.000,00	4.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12 bulan	40.000.000,00	40.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	40.000.000,00	40.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	4.920.000,00	4.920.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	40.000.000,00	40.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	200.000.000,00	200.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.500.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**943.180.000,00**	**943.180.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	67.500.000,00	67.500.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	4.500.000,00	4.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	492 ob	869.180.000,00	869.180.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**251.528.000,00**	**251.778.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan	1 unit	39.750.000,00	40.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50 unit	176.778.000,00	176.778.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	1 unit	30.000.000,00	30.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	5.000.000,00	5.000.000,00
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**	**2,80%**	**45.995.660,00**	**45.995.660,00**
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya dokumen profil kependudukan**	**1 dokumen**	**45.995.660,00**	**45.995.660,00**
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dokumen pemutakhiran data keluarga Dokumen pemutakhiran data keluarga	1 dokumen 66 peserta	45.995.660,00	45.995.660,00
3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)**	**2,80%**	**522.939.924,00**	**522.939.924,00**
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Cakupan promosi dan KIE**	**1 tahun**	**49.999.750,00**	**49.999.750,00**
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Edisi Penerbitan dan Siaran Langsung Edisi Penerbitan dan Siaran Langsung Edisi Penerbitan dan Siaran Langsung	10 surat kabar 12 Radio 20 Media Luar Ruang	49.999.750,00	49.999.750,00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Cakupan PLKB yang berdaya guna**	**100%**	**393.376.000,00**	**393.376.000,00**
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB	13 orang	393.376.000,00	393.376.000,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya pelayanan KB di lini lapangan**	**6 Kecamatan**	**79.564.174,00**	**79.564.174,00**
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya pelayanan KB di setiap Kecamatan	6 Kecamatan	79.564.174,00	79.564.174,00
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan keluarga sejahtera tingkat II**	**91%**	**244.863.750,00**	**248.034.014,00**
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok kegiatan**	**6 Kecamatan**	**244.863.750,00**	**192.124.899,00**
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya dukungan kegiatan Bina Keluarga dan dukungan kegiatan UPPKS dan mitra kerja Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Poktan	76.311.100,00	30.878.249,00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola dan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Mendapatkan Dukungan Biaya Operasional	108 Poktan	161.246.650,00	161.246.650,00
	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Koordinasi pencegahan dan penanganan stunting	100%	7.306.000,00	
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**510.314.308,00**	**343.243.384,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase dukungan APBD dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG**	**30%**	**195.443.347,00**	**153.173.240,00**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Penerapan PUG di lembaga pemerintah daerah**	**100%**	**11.400.000,00**	**19.573.750,00**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan	40 peserta	11.400.000,00	19.573.750,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya KIE dan advokasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan**	**1 tahun**	**184.043.347,00**	**133.599.490,00**
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya KIE tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta Terlaksananya advokasi dan sosialisasi kompetensi SDM Perempuan korban kekerasan dalam meningkatkan ketahanan keluarga	1 GOW dan DWP	184.043.347,00	133.599.490,00
2	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Layanan terhadap perempuan dan anak**	**100%**	**180.303.961,00**	**106.856.724,00**
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan**	**100%**	**152.525.000,00**	**76.757.763,00**
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan	15 Kasus	152.525.000,00	76.757.763,00
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan**	**100%**	**27.778.961,00**	**30.098.961,00**
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional UPTD PPA dan rumah aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan	1 Rumah aman/UPTD PPA	27.778.961,00	30.098.961,00
3	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentasei pengelolaan sistem gender dan anak**	**100%**	**9.900.000,00**	
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	**Cakupan proses pelaksanaan data gender dan anak**	**100%**	**9.900.000,00**	
	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya profil gender	1 dokumen	9.900.000,00	
4	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Pemenuhan hak anak**	**80%**	**124.667.000,00**	**83.213.420,00**
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tersedianya penguatan kualitas hidup anak**	**100%**	**124.667.000,00**	**65.221.310,00**
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak melalui Forum anak	100 anak	124.667.000,00	65.221.310,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**5.595.241.642,00**	**4.820.932.982,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian
OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**8.580.075.500,00**	**8.055.072.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**8.286.095.500,00**	**8.025.072.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**5.066.938.500,00**	**4.274.890.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.610.000.000,00**	**2.612.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan/bulanan/triwulana n/semesteran Perangkat	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Perangkat	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**135.000.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu beserta atribut kelengkapannya	25 stel	0,00	125.000.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	2.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**630.368.500,00**	**624.880.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	7.900.000,00	7.900.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	10.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	40.000.000,00	40.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedinya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	29.999.500,00	30.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedianya bahan bacan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	4.980.000,00	4.980.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	35.000.000,00	35.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	12 bulan	499.989.000,00	500.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**800.020.000,00**	**689.710.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	94.500.000,00	94.500.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	61.900.000,00	62.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	204 OB	641.620.000,00	531.210.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**169.680.000,00**	**162.800.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit	99.980.000,00	100.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	57.500.000,00	50.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	16 unit	12.200.000,00	12.800.000,00
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**822.870.000,00**	
	Pengadaan aset tak berwujud	Tersedianya aset tak berwujud	1 unit (firewall)	0,00	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit (penangkal petir)	47.760.000,00	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3 jenis (perangkat jaringan, storage, genset)	775.110.000,00	
2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik**	**90%**	**868.947.000,00**	**1.575.182.000,00**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat**	**90%**	**868.947.000,00**	**1.575.182.000,00**
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah dokumentasi audiovisual kabupaten bangka barat jumlah dokumentasi audiovisual kabupaten bangka barat	12 audiovisual 100	38.755.000,00	57.255.000,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita yang diupload pada website dan media sosial Diskominfo Kabupaten bangka barat	100 berita	14.730.000,00	36.270.000,00
	Pelayanan Informasi Publik	Dokumen data informasi jumlah media informasi yang diproduksi dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah jumlah peliputan kegiatan pemerintahan daerah	1 dokumen 9 jenis 120 liputan	204.932.000,00	388.632.000,00
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	meningkatnya kapasitas sumber daya komunikasi publik meningkatnya kapasitas sumber daya komunikasi publik meningkatnya kapasitas sumber daya komunikasi publik meningkatnya kapasitas sumber daya komunikasi publik	1 bimtek 1 lomba 1 pembinaan 12 kali	127.975.000,00	152.645.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah kerjasama dengan meaadia massa dan media elektronik jumlah kerjasama dengan meaadia massa dan media elektronik Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan	4 media cetak 12 media elektronik 1 Kali	482.555.000,00	940.380.000,00
3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase OPD, kelurahan, desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan**	**25%**	**2.350.210.000,00**	**2.175.000.000,00**
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengelolaan nama domain OPD, desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka Barat**	**1 domain dan 28 sub domain**	**324.500.000,00**	**350.000.000,00**
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi	1 tahun	49.800.000,00	50.000.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	tersedianya jaringan LAN fiber optik di OPD, Desa dan kelurahan	28 titik	274.700.000,00	300.000.000,00
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan E-Government yang diterapkan di Pemkab Bangka Barat**	**8 Layanan E-Government**	**2.025.710.000,00**	**1.825.000.000,00**
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	terlaksananya pengelolaan ruang server	1 ruang server	55.200.000,00	65.000.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	tersedianya layanan internet dan fasilitas video conference untuk OPD tersedianya layanan internet dan fasilitas video conference untuk OPD	1 aplikasi 150 Mbps	1.833.200.000,00	800.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	tersedianya sistem kemanan informasi	1 sistem	64.660.000,00	75.000.000,00
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	tersedianya aplikasi layanan publik dan pemerintahan	5 aplikasi	42.900.000,00	750.000.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	terlaksananya monitoring dan evaluasi mandiri SPBE	1 dokumen	29.750.000,00	40.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**231.710.000,00**	**259.110.000,00**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Ketersediaan Data Statistik Sektoral**	**60%**	**231.710.000,00**	**259.110.000,00**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Bangka**	**90%**	**231.710.000,00**	**259.110.000,00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	tersedinya buku analisis dan disemninasi data statistik sektoral	5 buku	47.050.000,00	50.000.000,00
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	tersedianya dokumen metadata statistik sektoral	1 dokumen	82.940.000,00	60.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	tersedianya operator data OPD dan Desa se Kabupaten Bangka Barat	35 operator	44.810.000,00	44.110.000,00
	Pengembangan Infrastruktur	tersedianya upgrade dan maintenance website data kite	1 kegiatan	13.300.000,00	60.000.000,00
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	terselenggaranya implementasi peraturan dan SOP otorisasi statistik di Kabupaten Bangka Barat	1 kegiatan	43.610.000,00	45.000.000,00
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**62.270.000,00**	**70.000.000,00**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase OPD memiliki keamanan informasi**	**100%**	**62.270.000,00**	**70.000.000,00**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Assesment Persandian dan Keamanan Cyber**	**100%**	**31.135.000,00**	**35.000.000,00**
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	pengelolaan dan perlindungan konten informasi milik pemerintah daerah	1 konten	31.135.000,00	35.000.000,00
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah berita sandi yang disampaikan melalui kamar sandi Kabupaten Bangka Barat**	**12 bulan**	**31.135.000,00**	**35.000.000,00**
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanaan dukungan kegiatan penting pada pemerintah daerah dan sterilisasi	1 kegiatan	31.135.000,00	35.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Komunikasi dan Informatika				**8.580.075.500,00**	**8.055.072.000,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian)
Urusan Pemerintahan Pilihan (Bidang Perdagangan)
OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.458.084.980,00**	**7.096.225.400,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**5.589.544.850,00**	**6.166.036.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**4.835.756.850,00**	**4.904.585.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**100 Persen**	**28.000.000,00**	**8.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan PD	3 Dokumen	6.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DALEV,LKPJ,LAKIP dan LPPD	2 Dokumen	4.000.000,00	2.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen tersusun	7 Dokumen	14.000.000,00	4.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.908.000.000,00**	**2.906.000.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen tersusun	2 Dokumen	4.000.000,00	2.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**0,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	6.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**0,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut	25 stel	0,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**675.660.850,00**	**761.889.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan Logistik Kantor	12 bulan	7.290.850,00	28.500.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minum rapat dan kegiatan Kantor	12 bulan	40.000.000,00	48.839.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan kantor dan Operasional UPT	12 bulan	65.940.000,00	72.120.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	4.860.000,00	4.860.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis Kantor dan Operasional UPT Pasar	12 bulan	47.570.000,00	47.570.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan Dinas luar dan dalam daerah.	12 bulan	505.000.000,00	505.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.059.496.000,00**	**1.062.096.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Honorarium PHL dan Peningkatan administrasi Perkantoran	48 OB	5.000.000,00	128.480.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon,listrik dan Internet	12 bulan	119.776.000,00	119.776.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Pelayanan Kantor	12 bulan	934.720.000,00	813.840.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**156.600.000,00**	**166.600.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Operasional	12 bulan	48.360.000,00	48.360.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas Operasional	12 bulan	68.240.000,00	68.240.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan Pasar	4 unit	40.000.000,00	50.000.000,00
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**100%**	**549.570.000,00**	**579.465.000,00**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**2 Kegiatan**	**549.570.000,00**	**579.465.000,00**
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Tenaga Peunyuluh Koperasi	15 orang	495.300.000,00	520.800.000,00
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya rapat koordinasi dan RAT Koperasi	6 Kecamatan	54.270.000,00	58.665.000,00
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Umi**	**100%**	**8.200.000,00**	**8.600.000,00**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	**Pengembangan Sarana dan Prasarana Umi**	**1 Kegiatan**	**8.200.000,00**	**8.600.000,00**
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Updating Usaha Mikro	1 Dokumen	8.200.000,00	8.600.000,00
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Terciptanya Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**	**100%**	**196.018.000,00**	**588.386.000,00**
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Peningkatan Unit Skala Usaha UMI**	**1 Kegiatan**	**196.018.000,00**	**588.386.000,00**
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Usaha Mikro	210 UMI	196.018.000,00	588.386.000,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**868.540.130,00**	**930.189.400,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**429.983.800,00**	**430.189.400,00**
1	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Jumlah Sub Distributor/Agen/Sub Agen Bapok yang terbina**	**12**	**11.705.000,00**	**11.990.000,00**
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Akses Distribusi perdagangan yang tertib dan Kondusif**	**1 Kegiatan**	**11.705.000,00**	**11.990.000,00**
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya para pengelola sarana distribusi perdagangan barang kebutuhan pokok yang upgrade informasi dan perizinan yang harus dipenuhi serta tertib administrasi terkait distribusi barang kebutuhan pokok	12 Sub distributor	11.705.000,00	11.990.000,00
2	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG**	**Jumlah konsumen berdaya beli rendah yang terbantu**	**6600**	**100.675.000,00**	**69.110.000,00**
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan barang penting di pasar wilayah Kabupaten Bangka Barat.**	**3 kegiatan**	**82.675.000,00**	**35.500.000,00**
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dokumen updating harga dan stock kebutuhan pokok masyarakat	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Updating, publikasi dan aksesbilitas data harga barang kebutuhan pokok	1 Pasar	15.675.000,00	17.500.000,00
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya paket pasar murah berupa sembako murah dan subsidi daging sapi	6600 paket sembako	49.000.000,00	0,00
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengawasan pupuk dan pestisida di Kab.Bangka Barat**	**6 kecamatan**	**18.000.000,00**	**33.610.000,00**
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terciptanya penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasran dan tertib ukur	6 Kecamatan	18.000.000,00	33.610.000,00
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Pameran yang Diikuti**	**100 persen**	**187.300.000,00**	**188.750.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pameran yang Diikuti**	**2 kegiatan**	**187.300.000,00**	**188.750.000,00**
	Pameran Dagang Nasional	Meningkatnya produk unggulan daerah Kab.Bangka Barat yang dikenal Investor dan Masayarakat sehingga semakin besar peluang investor masuk.	2 Pameran	122.050.000,00	123.000.000,00
	Pameran Dagang Lokal	Meningkatnya produk unggulan daerah Kab.Bangka Barat yang dikenal Investor dan Masayarakat sehingga semakin besar peluang investor masuk.	1 Pameran	65.250.000,00	65.750.000,00
4	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Terlaksanya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**100 Persen**	**130.303.800,00**	**160.339.400,00**
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**2 kegiatan**	**130.303.800,00**	**160.339.400,00**
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksanya sidang tera di pasar dan objek timbang	100 Persen	68.543.800,00	87.626.200,00
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	100 Persen	61.760.000,00	72.713.200,00
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**438.556.330,00**	**500.000.000,00**
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Induatri**	**100%**	**320.506.330,00**	**350.000.000,00**
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Induatri**	**3 Kegiatan**	**320.506.330,00**	**350.000.000,00**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terpenuhinya kesesuaian dokumen rencana dengan Program dan kegiatan yang	1 Kegiatan	86.451.330,00	100.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	meningkatnya penguatan kemampuan Industri berbasis Teknologi	1 Kegiatan	84.180.000,00	100.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	terlaksananya pembinaan dan Pemberdayaan IKM kegiatan Potensial	1 Kegiatan	149.875.000,00	150.000.000,00
2	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Pendampingan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri**	**100%**	**77.450.000,00**	**100.000.000,00**
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Pendampingan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri**	**2 Kegiatan**	**77.450.000,00**	**100.000.000,00**
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pendampingan Legalitas Usaha Industri	1 Kegiatan	46.450.000,00	50.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tercapainya sistem Informasi Industri	1 Kegiatan	31.000.000,00	50.000.000,00
3	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya sistem informasi Industri**	**100%**	**40.600.000,00**	**50.000.000,00**
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Ketersediaan Sistem Informasi Industri**	**1 Kegiatan**	**40.600.000,00**	**50.000.000,00**
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersedianya data dan Informasi IKM yang dimutakhirkan	1 Kegiatan	40.600.000,00	50.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian				**6.458.084.980,00**	**7.096.225.400,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Bidang Pariwisata, Kebudayaan)
Urusan Pemerintahan Pilihan (Bidang Pariwisata)
OPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.007.489.944,00**	**7.918.915.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**6.007.489.944,00**	**7.918.915.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**4.778.345.000,00**	**5.241.720.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.110.000.000,00**	**3.112.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semeste ran perangkat	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran perangkat	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	12 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**22.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 Stel	0,00	12.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	2.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**530.125.000,00**	**612.800.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	73.500.000,00	73.500.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	12 Bulan	91.125.000,00	71.300.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	300.000.000,00	400.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**866.420.000,00**	**866.420.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	250.800.000,00	250.800.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	252 OB	613.620.000,00	613.620.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**	**235.300.000,00**	**575.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	39.250.000,00	275.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	15 unit	183.550.000,00	275.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	7.500.000,00	15.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Unit	5.000.000,00	10.000.000,00
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah kekayaan budaya lokal daerah yang dilestarikan**	**10**	**499.350.000,00**	**2.120.000.000,00**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Fasilitasi acara Adat dan Kesenian**	**10 Faslitasi**	**315.350.000,00**	**1.870.000.000,00**
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah acara adat yang diselenggarakan	10 Event	315.350.000,00	1.870.000.000,00
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Fasilitasi penyambutan tamu**	**18 Faslitasi**	**80.000.000,00**	**100.000.000,00**
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Fasilitasi penyambutan tamu	18 Ceremoni	80.000.000,00	100.000.000,00
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Adat yang Dibina**	1 Lembaga Adat	**104.000.000,00**	**150.000.000,00**
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Terlaksananya program kerja lembaga adat	1 Dokumen	104.000.000,00	150.000.000,00
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Pelaku Seni yang Aktif melakukan Pengembangan Kesenian**	**10%**	**150.000.000,00**	**200.000.000,00**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Fasilitasi seni**	**1 Fasilitasi**	**150.000.000,00**	**200.000.000,00**
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya fasilitasi dewan kesenian	1 Dokumen	150.000.000,00	200.000.000,00
4	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah kerjasama pemerintah daerah terkait pengelolaan kekayaan budaya**	**1**	**262.658.105,00**	**62.675.000,00**
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Rangkaian pelestarian nilai sejarah yang dilakukan**	**6 rangkaian kegiatan & 1 laporan**	**262.658.105,00**	**62.675.000,00**
	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	Terlaksananya rangkaian kegiatan pelestarian nilai sejarah	2 kegiatan	200.000.000,00	
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lawatan sejarah kota tua Muntok	100 peserta		
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah fasilitasi, koordinasi terkait pembinaan dan pelestarian sejarah lokal daerah pada tahun bersangkutan Jumlah fasilitasi, koordinasi terkait pembinaan dan pelestarian sejarah lokal daerah pada tahun bersangkutan	1 Buku 1 Laporan	62.658.105,00	62.675.000,00
5	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah cagar budaya yang dilestarikan**	**11 CB**	**317.136.839,00**	**294.520.000,00**
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi**	**11 CB**	**317.136.839,00**	**294.520.000,00**
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya/situs sejarah yang direhabilitasi/ dipelihara Jumlah cagar budaya/situs sejarah yang ditingkatkan informasinya Terbayarnya honorarium PHL juru pelihara cagar budaya	11 CB 7 CB 84 OB	317.136.839,00	294.520.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**1.744.859.675,00**	**3.483.750.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**1.744.859.675,00**	**3.483.750.000,00**
1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata**	**10 DTW dan 3 Destinasi**	**1.237.250.000,00**	**1.201.250.000,00**
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Daya Tarik wisata yang dikembangkan**	**10 DTW**	**82.290.000,00**	**56.290.000,00**
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pengembangan daya tarik wisata	10 Fasilitasi	72.290.000,00	56.290.000,00
	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Destinasi yang dikelola**	**3 Destinasi**	**1.144.960.000,00**	**1.144.960.000,00**
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang dan pendukung di kawasan pariwisata	3 Objek	250.000.000,00	250.000.000,00
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembayaran jasa petugas kawasan wisata	384 OB	894.960.000,00	894.960.000,00
	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	**Pengelolaan data pelaku usaha pariwisata daerah**	**1 Data**	**10.000.000,00**	
	Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	1 laporan	10.000.000,00	
2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Kunjungan Wisatawan**	**104000 org**	**487.609.675,00**	**2.282.500.000,00**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah paket wisata yang dipasarkan**	**20 Paket**	**487.609.675,00**	**2.282.500.000,00**
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Bahan informasi promosi wisata Bahan informasi promosi wisata	4 Media 4000	107.949.800,00	105.000.000,00
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi event wisata masyarakat / komunitas Penyelenggaraan pemilihan duta wisata	10 Fasilitasi 2 Event	350.684.925,00	2.150.000.000,00
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar	Terlaksananya pemutakhiran data kepariwisataan	1 Dokumen	18.974.950,00	17.500.000,00
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya kerjasama antara pemkab babar dengan stakeholders lainnya di sektor kepariwisataan	1 Kerjasama	10.000.000,00	10.000.000,00
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Tersedianya zona ekonomi kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual**	**1 lokasi dan 1 usulan hak kekayaan intelektual**	**0,00**	
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang melakukanekspresi, promosi dan interaksi kreatif**	**10 pelaku Ekraf**	**0,00**	
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah fasilitasi sarana/prasarana zona ekonomi kreatif	10 fasilitasi, 1 pengusulan Hak Kekayaan Intelektual	0,00	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Meningkatnya kualitas SDM ekonomi kreatif**	**2 jenis ekonomi kreatif**	**20.000.000,00**	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah pelaku SDM yang ditingkatkan kapasitasnya**	**2 pelaku**	**20.000.000,00**	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Ekonomi Kreatif	2 fasilitasi	20.000.000,00	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				**7.752.349.619,00**	**11.402.665.000,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Perpustakaan dan Kearsipan
OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.572.634.004,00**	**5.007.859.480,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**5.472.634.004,00**	**4.907.859.480,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**5.211.067.546,00**	**4.506.529.021,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	**16.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	4.000.000,00	8.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tertib laporan capain kinerja dan dokumen perencanaan	4 Laporan	8.000.000,00	4.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAKIP, LKPJ DAN TAPKIN	4 Dokumen	8.000.000,00	4.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.714.000.000,00**	**2.706.000.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	2.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	LAKIP, LKPJ DAN TAPKIN	4 dok	8.000.000,00	2.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis	2 dok	4.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**-**	**41.636.350,00**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atributnya, pakaian batik dan olahraga serta seragam pelayanan perpustakaan daerah	3 jenis	-	41.636.350,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**361.300.996,00**	**451.300.431,00**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	20 jenis	15.000.000,00	15.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat-rapat dinas sesuai dengan tugas dan fungsi	12 bulan	40.000.000,00	50.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas perpustakaan dan kearsipan	12 bulan	40.000.000,00	40.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas perpustakaan dan kearsipan	12 bulan	1.299.996,00	1.299.996,00
	Penyediaan Bahan/Material	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk mendukung kelancatan tugas dan fungsi dinas perpustakaan dan kearsipan	12 bulan	40.000.000,00	119.999.435,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke instansi lain dan instansi pembina di dalam dan di luar daerah	376 kali	225.001.000,00	225.001.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**361.512.200,00**	**-**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	19 Jenis	243.354.300,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	5 Jenis	118.157.900,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.491.026.000,00**	**1.178.930.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya pembayaran biaya paket pengiriman	10 paket	500.000,00	500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhi pembayaran jasa komunikasi dan listrik	12 bulan	249.996.000,00	250.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya pembayaran gaji phl pembeliian bahan pembersih, pembeliaan materai, biaya pemeliharaan peralatan kerja	456 OB	1.240.530.000,00	928.430.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**263.228.350,00**	**112.662.240,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya pembayaran gaji PHL,pembelian bbm dan suku cadang, pembayaran pajak kendaraan dinas, dan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	1 unit	71.070.000,00	.
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya pembayaran gaji phl pembelian bbm dan suku cadang,pembayaran pajak kendaraan dinas dan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	1 unit, 24 OB	102.170.000,00	89.361.240,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung	3 ac	10.000.000,00	23.301.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung	3 gedung	79.988.350,00	79.988.350,00
2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun**	**10.000 orang**	**255.830.458,00**	**296.330.459,00**
		Persentase jumlah layanan bidang perpustakaan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	**100%**		
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan tingkat daerah**	**Sangat baik**	**71.200.000,00**	**94.000.000,00**
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	pengadaan bahan pustaka baru dan pengelolahan bahan pustaka baru,pelestarian bahan pustaka, alih media dan translasi bahan pustaka	1 paket	60.000.000,00	60.000.000,00
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pemenuhan kebutuhan informasi profil perpustakaan desa dan sekolah	9 profil	11.200.000,00	10.000.000,00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya perpustakaan keliling, dan lomba minat baca dan gemilang**	**80 titik perpusling, 2 kegiatan**	**184.630.458,00**	**202.330.459,00**
	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya minat baca masyarakat	4 Kegiatan	123.530.458,00	144.330.459,00
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	ketersediaan pondok baca di instansi-instansi yang menyelenggarakan pelayanan dasar/umu	1 pojok baca	15.150.000,00	15.000.000,00
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	terlaksanannya workshop transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	4 workshop	28.350.000,00	28.000.000,00
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya pemelihan duta baca tingkat kabupaten untuk umum	15 peserta	17.600.000,00	15.000.000,00
3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Meningkatnya Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian naskah kuno dan khazanah budaya bangsa**	**100%**	**5.736.000,00**	**5.000.000,00**
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya naskah kuno/kontent siap baca**	**1 dokumen**	**5.736.000,00**	**5.000.000,00**
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Tersedianya informasi Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno melalui peran serta masyarakat	1 dokumen	5.736.000,00	5.000.000,00
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**100.000.000,00**	**100.000.000,00**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase OPD dan Desa/Kelurahan yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku**	**75**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
		Meningkatnya indeks Kearsipan	**Baik**		
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengelolaan arsip secara baku**	**Baik**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD	20.000.000,00	20.000.000,00
2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase arsip di depo arsip yang terpelihara dengan baik**	**30%**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
		Meningkatnya kualitas sistem adminitrasi arsip statis	**100%**		
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Meningkatnya kualitas manajemen kearsipan melalui JRA**	**100 box arsip/20 ml**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	pelaksanaan penyusutan arsip di depo arsip yang tidak teratur	1500 arsip inaktif	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	pelaksanaan pemusnahan arsip	1500 arsip inaktip	20.000.000,00	20.000.000,00
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya DPA Arsip Statis Kabupaten Bangka Barat**	**1 dokumen**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	terselengganya FGD tentang penetapan dan autentisitas arsip terbentuknya kabupaten bangka barat	50 orang	20.000.000,00	20.000.000,00
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan	alih media arsip statis terbentuknya kabupaten bangka barat	75 arsip statis	10.000.000,00	10.000.000,00
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	**Terselenggaranya FGD dengan elemen presidium pembentukan Bangka Barat**	**1 kegiatan**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	terlaksananya pembuatan daftar pencarian arsip statis	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				**5.572.634.004,00**	**5.007.859.480,00**

Urusan : Urusan Pemerintahan Pilihan (Bidang Kelautan dan Perikanan)
OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.636.320.000,00**	**5.737.963.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**3.636.320.000,00**	**5.737.963.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**3.145.345.000,00**	**3.517.940.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**100 Persen**	**24.000.000,00**	**6.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	4.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen yang tersusun	6 dokumen	12.000.000,00	2.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.710.000.000,00**	**1.706.000.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	4.000.000,00	2.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	4.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**0,00**	**50.000.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PNS dan PHL yang tersedia Jumlah pakaian khusus hari- hari tertentu yang tersedia	25 stel	0,00	50.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**424.980.000,00**	**770.000.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	5.000.000,00	30.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan	39.980.000,00	40.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	35.000.000,00	50.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya surat kabar, majalah dan buku peraturan	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	35.000.000,00	40.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	300.000.000,00	600.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**760.455.000,00**	**775.940.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran honorarium PHI	24 ob	55.940.000,00	55.940.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik dan instalasi air yang tersedia Pembayaran jasa telepon, air dan listrik	1 gedung 12 bulan	111.400.000,00	120.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honorarium PHI	240 ob	593.115.000,00	600.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**225.910.000,00**	**210.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang terbayarkan Pembayaran honorarium PHI	14 unit 21 unit	165.910.000,00	150.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 gedung 1 gedung	50.000.000,00	50.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)**	**20%**	**134.750.000,00**	**1.313.023.000,00**
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)**	**20%**	**14.750.000,00**	**1.128.023.000,00**
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 dokumen (Rencana Induk Pengembangan Kelautan dan Perikanan)	14.750.000,00	40.000.000,00
		Tersedianya Data, Informasi dan Potensi Perikanan melalui aplikasi/website (PEDA IKAN)	12 bulan		
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)**	**20%**	**100.000.000,00**	**85.000.000,00**
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pembinaan Kelembagaan nelayan kecil	10 kelompok	50.000.000,00	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terjalinnya kemitraan dengan lembaga Keuangan dan perusahaan swasta dengan sistem bapak angkat	5 kemitraan	50.000.000,00	40.000.000,00
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**100%**	**20.000.000,00**	**100.000.000,00**
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersusunnya Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	20.000.000,00	100.000.000,00
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**	**20%**	**50.000.000,00**	**712.000.000,00**
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**persentase jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya**	**100%**	**0,00**	**260.000.000,00**
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Bimbingan dan Pelatihan terhadap Pelaku usaha Perikanan Budidaya	6 kecamatan	0,00	200.000.000,00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya(%)**	**20%**	**50.000.000,00**	**452.000.000,00**
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data, Informasi dan Potensi Perikanan melalui aplikasi/website (PEDA IKAN)	12 bulan	0,00	40.000.000,00
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi BBI	1 Paket	50.000.000,00	300.000.000,00
		Tersedianya Pakan Ikan di BBI	12 bulan		
4	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Menurunnya Tindak Pidana Perikanan**	**100%**	**200.000.000,00**	**80.000.000,00**
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Persentase Kepatuhan Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya terhadap hukum**	**100%**	**200.000.000,00**	**80.000.000,00**
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Fasilistasi Pengawas Terpadu terhadap pelanggaran Sumber Daya Perikanan Budidaya	12 bulan	200.000.000,00	40.000.000,00
5	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita dan Nilai Tukar Pengolah**	**49 Kg/tahun**	**106.225.000,00**	**115.000.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Persentase Peningatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)**	**20%**	**63.205.000,00**	**65.000.000,00**
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	12 bulan	63.205.000,00	65.000.000,00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**10%**	**43.020.000,00**	**50.000.000,00**
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Bimbingan dan Pelatihan terhadap Pelaku usaha Pengolahan	6 kecamatan	43.020.000,00	50.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Dinas Kelautan dan Perikanan				**3.636.320.000,00**	**5.737.963.000,00**

Urusan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
OPD : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**38.748.605.991,00**	**39.968.967.169,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**30.331.907.039,00**	**31.797.880.294,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**28.000.000,00**	**43.565.760,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	15.749.265,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.200.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.200.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	10.494.750,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	8.921.745,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**9.010.000.000,00**	**9.013.125.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat	1 Dokumen	2.000.000,00	2.625.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semerteran Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	5.250.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Bulanan/Semesteran Perangka Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	5.250.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.925.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	8.925.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**19.300.000,00**	**54.285.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekda Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	4 Stel	9.300.000,00	43.785.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	10.000.000,00	10.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.103.736.000,00**	**7.400.152.830,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	70.000.000,00	68.250.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 infocus, 8 laptop, Mic konfrens 3 paket, printer fotocopy 1, peng-hancur kertas 1, scanner F4, printer laserjet 5, lemari arsip 1	547.500.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	132.000.000,00	138.600.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	1.344.000.000,00	1.607.656.050,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	175.000.000,00	490.722.750,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	107.736.000,00	197.477.280,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	225.000.000,00	279.798.750,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah	12 Bulan	1.500.000.000,00	4.612.398.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis Perangkat Daerah	12 Bulan	2.500.000,00	5.250.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**6.005.960.000,00**	**6.401.529.099,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 Bulan	2.000.000,00	2.100.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Biaya Telepon,Listrik dan Internet	12 Bulan	900.000.000,00	1.392.300.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 unit	322.000.000,00	373.432.500,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	1728 Orang/Bulan	4.781.960.000,00	4.633.696.599,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**474.576.400,00**	**472.500.000,00**
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	5 unit meja dan 5 unit kursi	8.750.000,00	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit (pendopo)	455.826.400,00	472.500.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	2 unit AC	10.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**7.155.026.639,00**	**5.296.931.850,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 unit	518.350.000,00	1.973.160.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 unit	892.850.000,00	1.629.127.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 unit	5.619.229.639,00	1.438.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan rumah Jabatan/Dinas	198 unit	124.597.000,00	256.144.350,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Terpenuhinya adminstrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dae**	**100%**	**809.660.000,00**	**923.398.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	1 Tahun	200.000.000,00	250.000.000,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KDH dan WKDH	20 Stel	77.660.000,00	81.543.000,00
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya MedicalCheck Up KDH dan WKDH beserta Keluarga Tersedianya Suplemen Kesehatan KDH dan WKDH beserta Keluarga	8 Orang 12 Bulan	132.000.000,00	141.855.000,00
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya dana operasional KDH dan WKDH	12 bulan	400.000.000,00	450.000.000,00
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**	**100%**	**244.510.000,00**	**226.250.850,00**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Bupati	7 Paket	89.670.000,00	97.793.850,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Bupati Wakil Bupati	6 Paket	92.170.000,00	64.228.500,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	6 Paket	62.670.000,00	64.228.500,00
	Penataan Organisasi	**Jumlah kebijakan daerah terkait Penataan Organisasi yang dikeluarkan**	**3 kebijakan**	**614.588.000,00**	**805.055.055,00**
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kabupaten	4 Dokumen	267.145.000,00	302.956.605,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	137.197.000,00	167.945.190,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi Kabupaten	1 Dokumen	91.312.000,00	155.993.775,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	59.862.000,00	107.403.030,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	59.072.000,00	70.756.455,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Terselenggaranya protokol dan komunikasi Pimpinan**	**100%**	**1.860.550.000,00**	**1.624.661.850,00**
	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Penataan Acara Pimpinan Daerah di dalam Daerah dan luar Daerah	12 Bulan	95.550.000,00	100.327.500,00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi KDH/WKDH dengan Ormas/Pelaja/Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat	12 Bulan	1.730.000.000,00	1.485.237.600,00
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terdokumentasinya kegiatan Pimpinan Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	35.000.000,00	39.096.750,00
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai LPPD Pemerintah Daerah**	**3,28**	**7.746.226.952,00**	**7.624.240.575,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	**100%**		
		Terlaksananya fasilitasi siswa/mahasiswa miskin yang mengajukan bantuan pendidikan	**100%**		
		Persentase pengajuan bantuan rumah ibadah yang ditindaklanjuti	**100%**		
	Administrasi Tata Pemerintahan	**Jumlah kebijakan tata pemerintahan Daerah yang dikeluarkan**	**6 kebijakan**	**314.893.952,00**	**849.975.000,00**
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi bidang administrasi pemerintahan Tersusunnya laporan Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Kali 2 Laporan	167.585.920,00	288.750.000,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Terlaksananya pembinaan kewilayahan Tersedianya data kewilayahan Tersusunya data/ dokumen SHP (shapfile) Peta Rupa bumi	6 Kecamatan 6 Kali 1 Database 1 Dokumen	75.083.032,00	261.975.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Cakupan penerapan SPM di Kabupaten Bangka Barat Terfasilitasinya Pengurusan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Terfasilitasinya penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban pemerintah Daerah	100 Persen 2 Kali 3 Kali 2 Dokumen	72.225.000,00	299.250.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Jumlah kebijakan Daerah terkait Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan**	**3 kebijakan**	**6.708.952.500,00**	**4.889.674.125,00**
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Da"i yang melakukan pembinaan di desa Jumlah Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang diberangkatkan Haji Terlaksananya safari ramadhan Tersedianya operasional PHBI serta i'tikaf ramadhan, insentif marbot masjid serta fasilitasi perjalanan rohani	65 Orang 250 Orang 17 Desa 7 Hari Besar, 1 kegiatan, 20 masjid, 24 orang	2.110.707.500,00	2.029.831.125,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah proposal hibah/bansos yang di survey dan dimonitoring Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	56 Proposal 1 Laporan	4.584.340.000,00	2.844.108.750,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi , monitoring dan evaluasi terkait kesejahteraan masyarakatat, sekolah, perangkat desa, lembaga keagamaan	1 Dokumen	13.905.000,00	15.734.250,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Jumlah kebijakan Daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum**	**3 kebijakan**	**638.150.500,00**	**1.748.091.450,00**
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	165.795.500,00	164.772.300,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Bantuan Hukum untuk orang miskinrdinasi perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Terbinanya Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten (KADARKUM) Terlaksananya Bantuan/ Pendampingan Hukum Bagi Pejabat Pemkab Bangka BaratJumlah raperda dan raperbup yang tersusun Tersusunnya Laporan Aksi HAM Kabupaten Bangka Barat	5 Kasus 1 Kelompok 2 Kasus 2 Laporan	106.880.000,00	176.749.650,00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Perda / Perbup Terupdatenya Produk Hukum Melalui Website JDIH	6 judul Produk Hukum 50 Produk Hukum	365.475.000,00	1.406.569.500,00
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Jumlah Kebijakan Daerah bidang kerjasama daerah yang dikeluarkan**	**1 kebijakan**	**84.230.000,00**	**136.500.000,00**
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terfasilitasinya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan dengan Pihak ketiga	10 Kerjasama	43.400.000,00	89.250.000,00
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi hasil kerjasama dalam negeri Tersusunya dan terpublikasinya hasil pelaksanaan kerjasama dalam negeri	1 Dokumen 2 Jenis	40.830.000,00	47.250.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Tingkat kematangan UKPBJ**	**Level 3**	**670.472.000,00**	**546.846.300,00**
		Persentase capaian fisik dan keuangan pembangunan Daerah	**80%**		
		Penilaian Kinerja BUMD dan BLUD	**61,50**		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Jumlah Kebijjakan Daerah bidang Perekonomian yang dikeluarkan**	**2 kebijakan**	**196.937.000,00**	**208.389.300,00**
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersusunnya laporan pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	64.307.000,00	67.679.850,00
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tersusunnya laporan pelaksanaan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Dokumen	80.615.000,00	84.665.700,00
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tersusunnya Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	4 Dokumen	52.015.000,00	56.043.750,00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Jumlah Kebijjakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan**	**2 kebijakan**	**122.095.000,00**	**128.205.000,00**
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Bulan	122.095.000,00	128.205.000,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Jumlah Kebijjakan Daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang**	**3 kebijakan**	**351.440.000,00**	**210.252.000,00**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan yang ditindaklanjuti	100 Persen	171.985.000,00	81.884.250,00
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 Bulan	83.430.000,00	80.251.500,00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan terhadap Pelaku Pengadaan di Pemerintah Desa Terlaksananya Pembinaan terhadap Pelaku Pengadaan/Penyedia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	60 Desa 60 Orang	96.025.000,00	48.116.250,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Sekretariat Daerah				**38.748.605.991,00**	**39.968.967.169,00**

Urusan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
OPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**54.939.797.672,00**	**62.565.890.659,00**
A	**URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**			**54.939.797.672,00**	**62.565.890.659,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**28.361.382.432,00**	**25.201.058.461,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.010.000.000,00**	**3.012.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran Perangkat	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**23.125.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 Stel	-	13.125.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.728.045.975,00**	**1.603.428.803,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	50.000.000,00	111.494.019,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	350.900.000,00	210.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	45.502.420,00	49.352.541,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	412.823.990,00	433.465.190,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	377.893.120,00	291.269.286,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	67.200.000,00	70.560.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	221.226.445,00	232.287.767,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	200.000.000,00	200.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**2.734.860.000,60**	**1.186.500.000,00**
	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair Kantor	60 Unit	658.920.001,00	472.500.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit (komisi)	622.340.000,20	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	680.020.000,00	714.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250 meter (pagar) 90 M² (koridor)	773.579.999,40	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**2.177.902.000,00**	**2.229.535.100,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	368.364.000,00	386.782.200,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	744 OB	1.807.538.000,00	1.840.752.900,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**2.433.637.999,40**	**3.536.065.995,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	171.000.000,00	186.889.500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	202.980.000,00	221.004.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	1.785.159.999,40	2.509.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248 Unit	274.498.000,00	618.672.495,00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100%**	**14.780.506.754,00**	**12.032.752.375,00**
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1 Tahun	13.968.384.254,00	11.200.000.000,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD	150 Stel	337.563.500,00	334.465.425,00
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya Medical Check up untuk anggota DPRD dan keluarga	25 Orang	474.559.000,00	498.286.950,00
	Layanan Administrasi DPRD	**Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD**	**100%**	**1.454.429.703,00**	**1.527.151.188,00**
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi hearing, dialog dan monitoring adanya masukan/aspirasi dan masyarakat Fasilitasi pelantikan/peresmian PAW Fasilitasi rapat-rapat Badan Musyawarah Fasilitasi rapat-rapat komisi Fasilitasi rapat-rapat paripurna	4 Kegiatan 2 Kali 24 Kegiatan 12 Kegiatan	698.429.720,00	733.351.206,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Fasilitasi kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	12 bulan	755.999.983,00	793.799.982,00
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan Raperda menjadi Perda**	**100%**	**26.578.415.240,00**	**37.364.832.198,00**
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah**	**100%**	**591.257.870,00**	**620.820.764,00**
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Fasilitasi pembahasan Raperda Fasilitasi penyusunan Rancangan Perda Inisiatif	100 % 100 %	514.418.950,00	540.139.898,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Fasilitasi rapat-rapat Badan Legislasi	4 Kegiatan	76.838.920,00	80.680.866,00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100%**	**188.627.320,00**	**198.058.686,00**
	Pembahasan APBD	Fasilitasi rapat-rapat Badan Anggaran	4 Kegiatan	188.627.320,00	198.058.686,00
	Peningkatan Kapasitas DPRD	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**4.683.071.260,00**	**7.237.825.098,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bimbingan Teknis DPRD	Fasilitasi pendalaman tugas yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD	6 Kali	3.507.646.000,00	6.165.366.900,00
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Fasilitasi publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	12 Bulan	441.000.000,00	463.050.000,00
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Fasilitasi jasa konsultasi dan bantuan hukum bagi pimpinan dan anggota DPRD	12 Bulan	321.270.000,00	175.595.175,00
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli yang tersedia pertahun	60 OB	270.000.000,00	283.500.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Fasilitasi forum komunikasi DPRD dan Masyarakat	12 Kegiatan	143.155.260,00	150.313.023,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100%**	**648.155.000,00**	**680.562.750,00**
	Pelaksanaan Reses	Fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah Dapil masing-masing	3 Reses	648.155.000,00	680.562.750,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	**Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas DPRD**	**100%**	**20.467.303.790,00**	**28.627.564.900,00**
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Fasilitasi perjalanan dinas Pimpinan DPRD Dalam rangka konsultasi atau koordinasi	12 Bulan 12 Bulan	20.467.303.790,00	28.627.564.900,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Sekretariat DPRD				**54.939.797.672,00**	**62.565.890.659,00**

Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Perencanaan
OPD : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**9.242.673.880,00**	**11.000.091.693,00**
A	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN PERENCANAAN**			**8.558.299.850,00**	**10.220.750.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**6.050.152.050,00**	**6.168.310.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.610.000.000,00**	**3.612.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran Perangkat	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**9.985.400,00**	**122.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 Stell	0,00	12.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	9.985.400,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**865.144.650,00**	**954.187.800,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	10.000.000,00	11.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	27.900.000,00	30.690.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	39.999.350,00	44.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	39.850.000,00	44.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	4.998.000,00	5.497.800,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	39.897.300,00	44.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	700.000.000,00	770.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**161.000.000,00**	**0,00**
	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair Kantor	1 paket	50.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	111.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.021.252.000,00**	**1.064.439.200,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	2.000.000,00	2.200.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	102.000.000,00	112.200.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44 Unit	58.500.000,00	71.896.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	324 OB	858.752.000,00	878.143.200,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**350.770.000,00**	**364.683.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	41.250.000,00	51.656.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	73.870.000,00	81.257.000,00
	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel kantor	50 unit (sarung kursi)	25.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	199.950.000,00	220.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	10.700.000,00	11.770.000,00
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN**	**Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi**	**2**	**687.498.500,00**	**1.023.000.000,00**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten sesuai Tata Cara berdasarkan peraturan perundangan**	**100%**	**399.962.500,00**	**500.500.000,00**
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terselenggaranya pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Kegiatan	20.535.000,00	27.500.000,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan Musrenbang Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan	84.235.000,00	143.000.000,00
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya bahan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	28.020.000,00	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen Perencanaan	267.172.500,00	330.000.000,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Terlaksananya Analisis Data dan Informasi pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah**	**100%**	**142.358.000,00**	**220.000.000,00**
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan SIM Perencanaan	12 Bulan	73.499.000,00	110.000.000,00
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Updating E-Data SIPD	4 Triwulan	68.859.000,00	110.000.000,00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan daereah**	**100%**	**145.178.000,00**	**302.500.000,00**
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Tersusunnya dokumen pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen 1 Dokumen	63.435.000,00	165.000.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah	2 Dokumen	81.743.000,00	137.500.000,00
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	**Terlaksananya sinergitas dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**1.820.649.300,00**	**3.029.440.000,00**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Penjabaran program RPJMD dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**719.029.400,00**	**1.000.000.000,00**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	114.910.000,00	100.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Kegiatan	54.999.800,00	100.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 Bulan	59.999.900,00	100.000.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan	12 Bulan	124.910.000,00	200.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	119.910.000,00	100.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Kegiatan	64.999.800,00	100.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Bulan	79.389.900,00	100.000.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	12 Bulan	99.910.000,00	200.000.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100%**	**575.790.000,00**	**979.440.000,00**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada OPD mitra Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	58.515.000,00	83.685.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang perekonomian	2 Kegiatan	56.590.000,00	81.480.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang perekonomian	12 Bulan	54.665.000,00	79.275.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang perekonomian	12 Bulan	118.125.000,00	210.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada OPD mitra Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	58.515.000,00	105.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang SDA	2 Kegiatan	56.590.000,00	105.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang SDA	12 Bulan	54.665.000,00	105.000.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada OPD mitra bidang SDA	12 Bulan	118.125.000,00	210.000.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan**	**100%**	**525.829.900,00**	**1.050.000.000,00**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	68.515.000,00	105.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Kegiatan	56.590.000,00	105.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12 Bulan	54.490.000,00	105.000.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	12 Bulan	118.125.000,00	210.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Bulan	58.514.900,00	105.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Kegiatan	56.590.000,00	105.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12 Bulan	54.490.000,00	105.000.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	12 Bulan	58.515.000,00	210.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**684.374.030,00**	**779.341.693,00**
1	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Cakupan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah**	**100%**	**684.374.030,00**	**779.341.693,00**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Tersusunnya hasil kajian/ penelitian dibidang penyelenggaraan pemeritahan dan pengkajian peraturan**	**100%**	**156.857.000,00**	**159.355.790,00**
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Tersedianya Dokumen Kelitbangan Kabupaten Bangka Barat	4 Dokumen	156.857.000,00	159.355.790,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Meningkatkan rekomendasi kajian yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di Bidang Sosial dan Kependudukan**	**100%**	**83.614.930,00**	**73.324.623,00**
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Tersedianya rekomendasi bidang pendidikan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	83.614.930,00	73.324.623,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Meningkatkan rekomendasi dan strategi dalam perencanaan dan Pengambilan Kebijakan di Bid. Ekonomi dan Pembangunan**	**100%**	**340.023.300,00**	**373.345.390,00**
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Tersedianya rekomendasi Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	167.968.800,00	192.500.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Tersedianya rekomendasi bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan	1 Dokumen	172.054.500,00	180.845.390,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Meningkatnya kualitas dan memaksimalkan hasil kajian/penelitian serta menciptakan sistem informasi Inovasi Teknologi**	**100%**	**103.878.800,00**	**173.315.890,00**
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terciptanya inovasi di semua sektor dari pelaku usaha,organisasi, dan pemerintahan	1 Dokumen	103.878.800,00	103.864.090,00
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Tersalurnya informasi dan pengetahuan mengenai sistem dan aplikasi inovasi kepada masyarakat			69.451.800,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah				**9.242.673.880,00**	**11.000.091.693,00**

Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Keuangan
OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**127.965.874.242,00**	**128.854.684.311,00**
A	**URUSAN KEUANGAN**			**127.965.874.242,00**	**128.854.684.311,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**5.988.967.987,00**	**5.474.678.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang	4 Dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.510.000.000,00**	**3.512.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran Perangkat	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**10.000.000,00**	**22.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	0,00	12.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**971.289.987,00**	**623.800.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	9.000.000,00	9.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 jenis	350.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	74.994.546,00	75.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	40.000.000,00	40.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	4.800.000,00	4.800.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	59.995.441,00	60.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	425.000.000,00	425.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**472.500.000,00**
	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Tersedianya Mebel kantor	1 paket	50.000.000,00	472.500.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.045.788.000,00**	**1.045.988.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	109.800.000,00	110.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	14.588.000,00	14.588.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor, PHL sebanyak 30 orang (S2 1, SI 13, D3 2,SMA 14)	360 OB	919.400.000,00	919.400.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**369.890.000,00**	**219.890.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	39.750.000,00	39.750.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (4 mobil ,12 unit motor)	16 unit	150.140.000,00	150.140.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Gedung,1 ruang dan koridor	165.000.000,00	15.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Menurunnya temuan atas Audit BPK terhadap LKD Pemda**	**6 temuan**	**121.069.896.480,00**	**122.677.726.011,00**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Terlaksananya penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**1.391.942.400,00**	**1.399.550.000,00**
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA / PPAS APBD Kabupaten Bangka Barat yang tersusun	2 Dokumen	153.240.000,00	153.300.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA / PPAS APBD Perubahan Kabupaten Bangka Barat yang	2 Dokumen	155.332.100,00	157.500.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang tersusun	30 Dokumen	49.680.000,00	50.000.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang tersusun	30 Dokumen	49.680.000,00	50.000.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	30 Dokumen	50.460.000,00	50.750.000,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang tersusun	30 Dokumen	57.072.500,00	57.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Bangka Barat yang tersusun Jumlah Peraturan KDH Tentang APBD Kabupaten Bangka Barat yang tersusun	1 Perda 1 Perbup	298.571.000,00	300.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat yang tersusun Jumlah Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten	1 Perda 1 Perbup	299.952.800,00	300.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Bangka Barat yang tersusun	1 Dokumen 5 Regulasi	163.604.000,00	164.250.000,00
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Moonitoring dan Evaluasi Penatausahan anggaran Kabupaten Bangka Barat yang tersusun Terselenggaranya Pendampingan Implementasi Program	12 Kali 3 Kali	114.350.000,00	116.250.000,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai Peraturan Perundang- Undangan**	**100%**	**555.852.900,00**	**524.960.000,00**
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat yang tersusun	1 Dokumen	43.296.500,00	43.300.000,00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SIPD yang tersusun	4 Dokumen	16.556.500,00	28.856.000,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Transfer Pusat yang tersusun	1 Dokumen	46.023.730,00	46.030.000,00
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang tersusun	1 Dokumen	69.695.000,00	26.879.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Pengelolaan Gaji PNS/CPNS pada seluruh OPD	12 Bulan	123.813.850,00	108.376.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Pengelolaan Uang Daerah	4 Dokumen	43.330.000,00	43.440.000,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan SKPKD Kabupaten Bangka Barat	12 Bulan	195.892.320,00	199.215.000,00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan Pembinaan Penatausahaan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	17.245.000,00	28.864.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**100%**	**373.136.180,00**	**378.110.000,00**
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah dokumen Laporan Rekonsiliasi yang tersusun	12 Laporan	46.555.805,00	46.556.000,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD yang tersusun	12 Laporan	53.394.725,00	53.395.000,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Laporan	96.927.500,00	97.005.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	2 Laporan	74.158.150,00	79.050.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyelesaian Kasus Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2 Laporan	102.100.000,00	102.104.000,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Terlaksananya Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan**	**100%**	**118.748.965.000,00**	**120.375.106.011,00**
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Tersediannya Kajian Investasi Daerah	4 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa	60 Desa	113.397.164.000,00	116.886.465.001,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya alokasi untuk belanja tak terduga	100%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil ke Pemerintahan Desa	60 Desa	4.051.801.000,00	2.188.641.010,00
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Menurunnya temuan atas Audit BPK terkait aset / BMD Pemda**	**3 temuan**	**907.009.775,00**	**702.280.300,00**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**100%**	**907.009.775,00**	**702.280.300,00**
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Laporan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Harga Satuan Standar Kabupaten Bangka Barat	41 Buku	54.405.000,00	54.865.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan RKBMD dan RKPBMD Kabupaten Bangka Barat	2 Dokumen	46.515.825,00	47.329.870,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan aset daerah Kabupaten Bangka Barat Jumlah Pendampingan Implementasi Program Aplikasi BMD Jumlah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	6 Buku 1 Aplikasi 1 Perbup	181.755.300,00	183.553.700,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Investigasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat Jumlah Pengadaan tanda identitas dan plang pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1 Dokumen 5 Jenis	277.485.450,00	73.353.020,00
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	3 Dokumen	99.562.100,00	75.440.580,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat Jumlah Dokumen Pemusnahan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan Hasil penelitian usulan penghapusan barang milik daerah (SK Penghapusan BMD) Kabupaten Bangka Barat Jumlah Laporan penilaian dan laporan penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan	218.977.500,00	235.591.370,00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.258.600,00	5.267.160,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	30 OPD	23.050.000,00	26.879.600,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				**127.965.874.242,00**	**128.854.684.311,00**

Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Keuangan
OPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**9.892.096.300,00**	**10.727.559.600,00**
A	**URUSAN KEUANGAN**			**9.892.096.300,00**	**10.727.559.600,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**8.128.788.000,00**	**8.191.750.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**30.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	6.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang	4 dokumen	8.000.000,00	2.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**5.710.000.000,00**	**5.706.000.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran	Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semestera n perangkat daerah	2 dokumen	4.000.000,00	2.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya dokumen laporan dan analisis anggaran perangkat daerah	2 dokumen	4.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**2.000.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	2.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**0,00**	**12.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	0,00	12.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**696.996.500,00**	**721.920.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	10.000.000,00	20.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Adanya peralatan rumah tangga untuk kebersihan kantor	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum kantor	12 bulan	63.997.500,00	70.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	50.000.000,00	52.600.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Meningkatnya ilmu dan wawasan staf	12 bulan	3.000.000,00	4.320.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	139.999.000,00	145.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi pendapatan, pengawasan, perencanaan dan keuangan diklat, seminar dan bimtek	12 bulan	425.000.000,00	425.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.458.201.500,00**	**1.489.500.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa pengiriman surat	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber air dan listrik	12 bulan	325.601.500,00	356.900.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksanannya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	1.130.600.000,00	1.130.600.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**227.590.000,00**	**249.830.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemelihraan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	40.250.000,00	47.490.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemelihraan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	25 unit	126.340.000,00	141.340.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	7.500.000,00	7.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	38 unit	53.500.000,00	53.500.000,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase peningkatan pendapatan pajak daerah**	**2,50%**	**1.763.308.300,00**	**2.535.809.600,00**
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Tercapaianya penerimaan daerah dari sektor pajak daerah**	**2,50%**	**1.763.308.300,00**	**2.535.809.600,00**
		Terpenuhinya pelayanan pemeriksaan dan keberatan pajak daerah	**100%**		
		Terlaksananya pengolahan data dan evaluasi PAD	**100%**		
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersusunnya dokumen pemutakhiran zona nilai tanah (ZNT) PBB P2 untuk 21 Desa/Kelurahan	1 Dokumen	259.140.400,00	472.497.000,00
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Data 9 pajak daerah teraplikasi dengan baik Data BPHTB teraplikasi dengan baik Data PBB P2 teraplikasi dengan baik	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi	100.000.000,00	168.000.000,00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya produk hukum terkait pengeloaan pajak Terlaksananya penyebarluasan kebijakan pajak daerah	2 produk hukum 250 orang	78.055.700,00	95.600.000,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1 unit	0,00	10.000.000,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terdatanya wajib pajak dan objek pajak daerah Tedatanya wajib pajak dan Objek Pajak Daerah di wilayah Kec Jebus yg akurat Terdatanta wajib pajak dan objek pajak daerah PBBP2 yg akurat	2100 OP 5500 OP	216.260.800,00	181.380.000,00
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersusunnya administrasi pengelolaan pendataan, penilaian dan ketetapan BPHTB yang baik Tersusunnya administrasi pengelolaan pendataan, penilaian dan ketetapan Pajak Daerah Tersusunnya administrasi pengelolaan pendataan, penilaian dan ketetapan PBB P2 yang baik	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	207.909.000,00	274.558.000,00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Nilai objek pajak PBB P2 yang akurat Nilai Objek Pajak BPHTB yang akurat dan Terverifikasi	4000 OP 250 OP	42.085.000,00	181.380.000,00
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Adanya ketetapan pajak daerah	6000 SKPD	30.060.000,00	173.697.000,00
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersampaikannya SPPT PBB P2 Kabupaten Bangka Barat Tersusunnya administrasi hasil verifikasi data pelaporan pajak daerah	48000 SPPT 12 laporan	269.105.600,00	378.120.100,00
	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan wajib pajak daerah Tersusunnya administrasi penagihan pajak daerah Tercapai target penerimaan PBB P2	7500 WP 1 dokumen 52220 SPPT PBB P2	354.444.000,00	304.837.000,00
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya penyelesaian keberatan dan piutang pajak daerah Tersusunnya data penghapusan piutang pajak daerah	235 OP	56.564.800,00	117.968.500,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek dan subjek pajak daerah Tersusunnya laporan pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek dan subjek pajak daerah	125 OP 1 laporan	79.325.000,00	103.000.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi PAD sehingga meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi	4 kali	60.358.000,00	64.772.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah				**9.892.096.300,00**	**10.727.559.600,00**

Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Setelah Pembahasan (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**8.497.069.800,00**	**8.746.543.161,00**
A	**URUSAN KEPEGAWAIAN**			**7.333.540.300,00**	**7.393.180.500,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**5.681.588.800,00**	**5.739.290.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran yang Tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran yang Tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Realisasi Kinerja PD yang	4 Dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.410.000.000,00**	**3.407.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD yang Tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n PD yang Tersusun	2 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD yang	2 Dokumen	4.000.000,00	0,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**56.495.000,00**	**71.500.000,00**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin/Kartu Absensi	30 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu Lainnya	25 Stel	0,00	12.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	45 Orang	19.100.000,00	20.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	30 Orang	12.395.000,00	14.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**760.590.000,00**	**780.600.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen- komponen Listrik	12 Bulan	34.950.000,00	35.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat-alat Rumah Tangga	34 Unit	72.540.000,00	90.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	46.500.000,00	46.500.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan surat kabar dan Majalah	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan/Bahan Pembersihan	12 Bulan	86.600.000,00	86.600.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	462.500.000,00	462.500.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Arsip Dinamis PD	12 Bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**1.063.753.800,00**	**1.067.190.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Setelah Pembahasan (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Teleppon/Internet, Listrik dan Air	12 Bulan	300.400.000,00	300.400.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	48.563.800,00	52.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	204 OB	712.790.000,00	712.790.000,00
		Tersedianya Jasa Kebersihan (outsourcing)	1 Tahun		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**	**358.750.000,00**	**362.500.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas dan Kepala Badan	1 unit	39.250.000,00	43.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	13 unit	75.500.000,00	75.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	150.000.000,00	150.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207 unit	94.000.000,00	94.000.000,00
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN daerah**	**70%**	**1.651.951.500,00**	**1.653.890.500,00**
		Terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian	**80%**		
		Persentase capaian penilaian kinerja ASN	**85%**		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi**	**20%**	**591.290.000,00**	**526.835.000,00**
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pengadaan ASN	1 Dokumen	18.565.000,00	40.000.000,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	CPNS dan CP3K lulus Seleksi Pengadaan ASN	400 Orang	234.069.000,00	234.069.000,00
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN	1 Dokumen	10.728.000,00	10.728.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian	100 Orang	25.916.000,00	25.916.000,00
	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	19.022.000,00	19.122.000,00
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	100.000.000,00	12.000.000,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	1 SAPK	29.400.000,00	30.000.000,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	1 Aplikasi	153.590.000,00	155.000.000,00
	Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase pengisian JPT, administrator dan pengawas secara terbuka kompetitif**	**70%**	**371.977.500,00**	**381.432.500,00**
	Pengelolaan Mutasi ASN	Terkelolanya Mutasi ASN	3 Kali	20.840.000,00	20.840.000,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terkelolanya Kenaikan Pangkat ASB	2 Periode	32.696.000,00	32.696.000,00
	Pengelolaan Promosi ASN	Terkelolanya Promosi ASN	4 Kali	318.441.500,00	327.896.500,00
	Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase peningkatan kompetensi ASN**	**15%**	**434.985.000,00**	**442.570.000,00**
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Aparatur yang mengikuti Assessment Center/Talent Poll	50 orang	184.830.400,00	185.100.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terfasilitasinya pendidikan lanjutan bagi ASN	36 orang	140.960.000,00	140.984.000,00
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Sosialisasi dan Penyebaran informasi Jabatan Fungsional ASN	2 kali	47.857.100,00	48.483.000,00
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan Jabatan Fungsional ASN	32 OPD	20.662.500,00	24.659.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pengembangan Jabatan Fungsional melalui ujikom/inpasing	25 orang	20.590.000,00	21.600.000,00
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Dokumen	20.085.000,00	21.744.000,00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Terlaksananya penilaian kinerja ASN yang objektif dan terukur**	**75%**	**253.699.000,00**	**303.053.000,00**
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32 OPD	84.245.000,00	90.000.000,00
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa Karya Satya Lancana	50 Orang	13.040.000,00	10.500.000,00
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring	32 OPD	41.395.000,00	42.500.000,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian pelanggaran Disiplin ASN	8 kasus	48.560.000,00	90.566.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Setelah Pembahasan (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	10 orang	46.239.000,00	47.731.000,00
	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Disiplin ASN	1 Dokumen	20.220.000,00	21.756.000,00
B	**URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**1.163.529.500,00**	**1.353.362.661,00**
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi**	**35%**	**1.163.529.500,00**	**1.353.362.661,00**
	Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis formal**	**10%**	**222.218.000,00**	**229.479.000,00**
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Diklat ASN	4 Dokumen	50.983.000,00	51.715.000,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fasilitasi Biaya Diklat ASN	25 orang	166.937.500,00	166.950.000,00
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring	32 OPD	4.297.500,00	10.814.000,00
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial dan fungsional**	**15%**	**941.311.500,00**	**1.123.883.661,00**
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Diklat Kepemimpinan dan Fungsional ASN	1 Dokumen	12.977.500,00	13.700.000,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Jumlah Aparatus yang mengikuti Diklat PIM IV, Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	345 orang	919.586.500,00	1.070.046.661,00
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang dimonitoring	32 OPD	8.747.500,00	40.137.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				**8.497.069.800,00**	**8.746.543.161,00**

Urusan : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
OPD : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	**URUSAN PENGAWASAN**			**8.175.254.000,00**	**8.277.126.000,00**
A	**URUSAN PENGAWASAN**			**8.175.254.000,00**	**8.277.126.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**5.119.766.000,00**	**5.252.726.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.710.000.000,00**	**3.712.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**-**	**12.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapan	25 stel	-	12.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**670.006.000,00**	**672.506.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	6.789.000,00	6.789.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	12 bulan	5.432.000,00	5.432.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	12 bulan	60.485.000,00	60.485.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	4.800.000,00	4.800.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	115.000.000,00	115.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	425.000.000,00	425.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**-**	**300.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	-	300.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**554.420.000,00**	**554.420.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengirimam	12 bulan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	67.200.000,00	67.200.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	192 ob	480.220.000,00	480.220.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**	**153.340.000,00**	**250.500.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	38.250.000,00	47.490.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (3 Unit mobil dan 4 Unit motor)	7 unit	107.590.000,00	190.510.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	7.500.000,00	7.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	-	5.000.000,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu**	**100%**	**2.602.274.000,00**	**2.565.350.000,00**
		Persentase OPD LAKIP BB	**40%**		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Terlaksannya Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**100%**	**2.470.400.000,00**	**2.565.350.000,00**
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LAKIP OPD yang di evaluasi (30 objek evaluasi) Jumlah SPIP OPD yang di evaluasi (30) Evaluasi perencanaan penganggaran responsif gender (1 laporan) evaluasi pelayanan publik (1laporan)	34 Laporan	221.500.000,00	223.400.000,00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pencapaian program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (45 objek audit) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hibah atau bansos (1 Laporan)	46 Laporan	358.610.000,00	367.260.000,00
	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya reviu LAKIP Daerah, Jumlah dokumen perencanaan yang di reviu, Jumlah Pelaporan penyerapan anggaran, Jumlah pelaporan penyerapan pengadaan Barang Jasa (PBJ)	86 Laporan	556.900.000,00	578.150.000,00
	Reviu Laporan Keuangan	Tersedianya laporan reviu keuangan Pemerintah Daerah (31 laporan) Terkelolanya SIM hasil pemeriksaan (12 bulan)	31 laporan	111.850.000,00	113.750.000,00
	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60 Laporan	502.240.000,00	555.890.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	100 %	719.300.000,00	726.900.000,00
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**100%**	**131.874.000,00**	**139.874.000,00**
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kasus tertangani	1 Kasus	1.874.000,00	1.874.000,00
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus tertangani	10 Kasus	130.000.000,00	138.000.000,00
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Pemenuhan Infrastruktur IACM**	**2,5**	**453.214.000,00**	**459.050.000,00**
	Pendampingan dan Asistensi	**Tersedianya pendampingan dan asistensi**	**100%**	**453.214.000,00**	**459.050.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya gelar pengawasan (1 kegiatan), Tersedianya LAPOR SP4N, Jumlah Aksi Pencegahan Korupsi	7 Laporan	21.550.000,00	23.450.000,00
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan LHKASN (1 laporan) Persentase jumlah wajib lapor (WL) LHKPN yang melapor (100%) Jumlah OPD yang membuat buku register resiko (15 OPD) Jumlah OPD yang melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi dan birokrasi	100 %	28.000.000,00	29.900.000,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersedianya laporan Saber Pungli (12 bln) Persentase Tindak Lanjut atas laporan pengaduan melalui Whistle Blower System (WBS) (100%) Persentase laporan gratifikasi penyelenggaraan Negara dan ASN ke KPK (100%) Jumlah dokumen laporan RAD PPK (1 laporan)	100 %	375.664.000,00	375.800.000,00
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Tindak Lanjut atas laporan benturan kepentingan (100%) jumlah unit kerja Zona Integritas (2 laporan)	100 %	28.000.000,00	29.900.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Inspektorat Daerah				**8.175.254.000,00**	**8.277.126.000,00**

Urusan : Unsur Kewilayahan
OPD : Kecamatan Muntok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**14.530.070.199,00**	**15.663.790.000,00**
A	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**14.530.070.199,00**	**15.663.790.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**7.593.737.999,00**	**7.576.813.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.310.000.000,00**	**4.312.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semestera n perangkat	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran perangkat	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**22.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	0,00	12.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**999.613.000,00**	**898.713.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	18.260.000,00	18.260.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	28.852.000,00	28.852.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	310.145.000,00	310.145.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak da penggandaan	12 bulan	88.677.000,00	88.677.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	15.792.000,00	15.792.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	12 bulan	209.987.000,00	209.987.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	325.400.000,00	222.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip Dinamis Perangkat Daerah	12 bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**2.152.555.000,00**	**2.187.500.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya jasa pengiriman	12 bulan	275.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	193.200.000,00	193.200.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	39 unit	27.300.000,00	27.300.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	816 ob	1.931.780.000,00	1.965.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**	**97.569.999,00**	**105.600.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	5 unit	30.300.000,00	46.620.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangann dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	27.269.999,00	18.980.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4 unit	30.000.000,00	30.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	10.000.000,00	10.000.000,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**53.000.000,00**	**88.000.000,00**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang kecamatan	1 kali	23.000.000,00	23.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya data profil dan informasi tentang Kecamatan	1 dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**26.000.000,00**	**61.000.000,00**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Meningkatnya pengetahuan dan pemutakhiran data pelayanan dan penatausahaan administrasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan	1 kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya jasa Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	15.000.000,00	50.000.000,00
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**100%**	**6.725.862.200,00**	**7.798.830.000,00**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**22.000.000,00**	**23.750.000,00**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan BBGRM Terlaksananya lomba desa	1 kali	22.000.000,00	23.750.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**6.667.862.200,00**	**7.775.080.000,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya musrenbang kelurahan	5 kelurahan	42.750.000,00	50.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	2.513.200.000,00	3.360.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanaya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kaling, dan LPM	100%	4.099.912.200,00	4.353.080.000,00
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya lomba kelurahan	5 kelurahan	12.000.000,00	12.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**100%**	**36.000.000,00**	**45.000.000,00**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya penyelenggaraan kelembagaan kemasyarakatan di Kecamatan	12 bulan	36.000.000,00	45.000.000,00
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 bulan dan Satgas Covid Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	12 bulan	13.520.000,00	15.000.000,00
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan**	**100%**	**100.000.000,00**	**107.400.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100.000.000,00**	**107.400.000,00**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT RI di Kecamatan	1 kali	75.000.000,00	75.000.000,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan tingkat Kecamatan	12 bulan	25.000.000,00	32.400.000,00
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu**	**100%**	**28.950.000,00**	**62.747.000,00**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**28.950.000,00**	**62.747.000,00**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	12 bulan	6.000.000,00	18.800.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan	6.400.000,00	26.000.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Desa	8 dokumen	1.800.000,00	10.947.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Ter;laksananya pemilihan Kepala Desa serentak	2 desa	14.750.000,00	7.000.000,00
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Tanjung				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan		
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**100%**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanaya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kaling, dan LPM	100%		
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Sungai Baru				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan		
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**100%**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanaya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kaling, dan LPM	100%		
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Sungai Daeng				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan		
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**100%**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanaya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kaling,	100%		
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Keranggan				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan		
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**100%**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanaya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kaling,	100%		
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Menjelang				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan		
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**100%**		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanaya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kaling,	100%		
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Kecamatan Muntok				**14.530.070.199,00**	**15.663.790.000,00**

Urusan : Unsur Kewilayahan
OPD : Kecamatan Simpang Teritip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**4.006.794.000,00**	**4.137.092.000,00**
A	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**4.006.794.000,00**	**4.137.092.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**3.706.514.000,00**	**3.808.092.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**48.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	16.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	12.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.910.000.000,00**	**2.915.000.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.000.000,00	3.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	6.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	6.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	6.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**24.000.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Dinas dan Pakaian Khusus Hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	-	13.000.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	2.000.000,00	11.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**184.820.000,00**	**222.992.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 bulan	5.000.000,00	5.500.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	3.000.000,00	4.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan	30.000.000,00	33.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15.000.000,00	16.500.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	4.320.000,00	4.992.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	35.000.000,00	33.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	90.000.000,00	120.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya Arsip Dinamis Perangkat Daerah	12 bulan	2.500.000,00	6.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**477.900.000,00**	**483.100.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 bulan	300.000,00	2.200.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan	25.200.000,00	28.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	180 ob	452.400.000,00	452.900.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**99.794.000,00**	**105.000.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	32.200.000,00	32.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	42.594.000,00	43.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 unit	15.000.000,00	17.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	5.000.000,00	6.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	5.000.000,00	6.000.000,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**27.860.000,00**	**38.000.000,00**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**23.200.000,00**	**30.000.000,00**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kali	20.000.000,00	25.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Data Profil dan Informasi tentang Kecamatan	1 dokumen	3.200.000,00	5.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**4.660.000,00**	**8.000.000,00**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12 bulan	4.660.000,00	8.000.000,00
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**100%**	**58.000.000,00**	**80.000.000,00**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**22.000.000,00**	**40.000.000,00**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa	1 kali 1 kali	22.000.000,00	40.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**100%**	**36.000.000,00**	**40.000.000,00**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kelembagaan Kemasyarakatan di Kecamatan	12 bulan	36.000.000,00	40.000.000,00
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan	13.520.000,00	15.000.000,00
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan**	**100%**	**100.000.000,00**	**103.000.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100.000.000,00**	**103.000.000,00**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peringatan dan perayaan HUT RI di Kecamatan	1 kali	75.000.000,00	75.000.000,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	12 bulan	25.000.000,00	28.000.000,00
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu**	**100%**	**85.900.000,00**	**78.000.000,00**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**85.900.000,00**	**78.000.000,00**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 bulan	19.500.000,00	40.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan	20.800.000,00	28.000.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	5.850.000,00	10.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Serentak	12 desa	39.750.000,00	-
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Kecamatan Simpang Teritip				**4.006.794.000,00**	**4.137.092.000,00**

Urusan : Unsur Kewilayahan
OPD : Kecamatan Jebus

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**3.867.775.800,00**	**3.973.775.000,00**
A	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**3.867.775.800,00**	**3.973.775.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**3.393.660.000,00**	**3.473.775.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang	4 dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.410.000.000,00**	**2.412.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JJumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendafaran objek retribusi daerah	12 bulan	2.500.000,00	2.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	0,00	0,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**218.000.000,00**	**336.500.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	5.500.000,00	5.500.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	15.000.000,00	15.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	35.000.000,00	35.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	110.000.000,00	200.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**543.750.000,00**	**414.865.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	300.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	29.100.000,00	29.100.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	204 ob	514.350.000,00	383.765.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**185.410.000,00**	**249.910.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	32.200.000,00	32.200.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	134.130.000,00	134.130.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	7.500.000,00	72.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17 unit	11.580.000,00	11.580.000,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**211.295.800,00**	**218.000.000,00**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**27.000.000,00**	**26.000.000,00**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang kecamatan	1 kali	23.000.000,00	22.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya data profil dan informasi tentang kecamatan	1 dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilakasanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**179.295.800,00**	**180.000.000,00**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembayaran honorarium PHL Tersedianya peralatan kebersihan pasar	72 ob 12 bulan	179.295.800,00	180.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**5.000.000,00**	**12.000.000,00**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya jasa pelayanan administrasi terpadu kecamatan	12 bulan	5.000.000,00	12.000.000,00
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**1**	**58.000.000,00**	**80.000.000,00**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**22.000.000,00**	**35.000.000,00**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan Terlaksananya Lomba Desa	1 kali 1 kali	22.000.000,00	35.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**100%**	**36.000.000,00**	**45.000.000,00**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya penguatan kelembagaan di kecamatan	12 bulan	36.000.000,00	45.000.000,00
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan	13.520.000,00	15.000.000,00
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan**	**1**	**100.000.000,00**	**115.000.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100.000.000,00**	**115.000.000,00**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peringatan dan perayaan HUT RI di Kecamatan	1 kali	75.000.000,00	80.000.000,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	12 bulan	25.000.000,00	35.000.000,00
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu**	**100%**	**76.300.000,00**	**57.000.000,00**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**76.300.000,00**	**57.000.000,00**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 bulan	16.500.000,00	35.000.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan	17.600.000,00	12.000.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	4.950.000,00	5.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Serentak	11 desa	37.250.000,00	5.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Kecamatan Jebus				**3.867.775.800,00**	**3.973.775.000,00**

Urusan : Unsur Kewilayahan
OPD : Kecamatan Kelapa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**6.609.385.000,00**	**7.811.389.999,00**
A	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**6.609.385.000,00**	**7.811.389.999,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**4.598.795.000,00**	**4.836.680.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**41.500.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi anggaran yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	10.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**3.610.000.000,00**	**3.612.500.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	2.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semestera n perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 dokumen	6.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	12 bulan	2.500.000,00	2.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**22.500.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	-	12.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	terkelolanya adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	2.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**215.200.000,00**	**422.700.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersediannya komponen instalasi/penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	30.000.000,00	240.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	2.700.000,00	2.700.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya bahan/material	12 bulan	35.000.000,00	30.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	110.000.000,00	110.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**654.780.000,00**	**656.480.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa pengiriman	12 bulan	300.000,00	2.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 bulan	62.400.000,00	62.400.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	20.000.000,00	20.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	228 ob	572.080.000,00	572.080.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 Persen**	**82.315.000,00**	**70.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3 unit	32.550.000,00	25.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	6 unit	39.765.000,00	35.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksannya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	10.000.000,00	10.000.000,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**394.620.000,00**	**38.000.000,00**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terlaksanya musrenbang kecamatan	1 kali	23.000.000,00	23.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	tersusunnya data profil dan informasi tentang kecamatan	1 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilakasanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**356.620.000,00**	**356.620.000,00**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembayaran Honorarium PHL Tersedianya Peralatan Kebersihan Persampahan	132 ob 12 bulan	356.620.000,00	356.620.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	tersediannya jasa pelayanan administrasi terpadu kecamatan	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**100%**	**58.000.000,00**	**1.355.000.000,00**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**22.000.000,00**	**25.000.000,00**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	pelaksanaan BBGRM dan terlaksananya lomba desa	2 kali	22.000.000,00	25.000.000,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**-**	**1.330.000.000,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	terlaksananya musyawarah kelurahan kelapa	1 kelurahan	-	5.000.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksannya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	-	720.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanaya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Peningkatan kualitas RT/RW dan LPM	100% dan Satgas Covid Kelurahan	-	600.000.000,00
	Evaluasi Kelurahan	terlaksananya lomba desa	1 kelurahan	-	5.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**100%**	**36.000.000,00**	**45.000.000,00**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	terlasananya penyelanggaraan kelembagaan kemasyarakatan di kecamatan	12 bulan	36.000.000,00	45.000.000,00
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara repoblik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal terkait	12 bulan dan Satgas Covid Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	terlaksananya harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 bulan	13.520.000,00	15.000.000,00
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan**	**100%**	**100.000.000,00**	**101.360.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100.000.000,00**	**101.360.000,00**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	terlaksananya HUT RI di Kecamatan	1 kali	75.000.000,00	75.000.000,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	terlaksananya forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan	12 bulan	25.000.000,00	26.360.000,00
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu**	**100%**	**85.900.000,00**	**106.800.000,00**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**85.900.000,00**	**106.800.000,00**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	terfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	12 bulan	19.500.000,00	11.900.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 bulan	20.800.000,00	45.000.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	5.850.000,00	16.900.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	12 desa	39.750.000,00	33.000.000,00
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Kelapa				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik	12 bulan	210.000.000,00	210.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**100%**	**1.133.550.000,00**	**1.133.549.999,00**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**1.133.550.000,00**	**1.133.549.999,00**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	terlaksananya musyawarah kelurahan kelapa	1 kelurahan	8.550.000,00	8.550.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat	100%	400.000.000,00	399.999.999,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksanaya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung dan Tersedianya Honorarium RT, RW, Kaling,	100%	720.000.000,00	719.999.999,00
	Evaluasi Kelurahan	terlaksananya lomba desa	1 kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Kecamatan Kelapa				**6.609.385.000,00**	**7.811.389.999,00**

Urusan : Unsur Kewilayahan
OPD : Kecamatan Tempilang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**3.705.133.000,00**	**4.185.300.000,00**
A	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**3.705.133.000,00**	**4.185.300.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**3.421.713.000,00**	**3.839.030.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**48.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	16.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	12.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	3 dokumen	6.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.610.000.000,00**	**2.613.000.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	1 dokumen	2.000.000,00	3.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	2 dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**4.000.000,00**	**8.500.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	4.000.000,00	8.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**58.300.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu la beserta atribut kelengkapannya	25 stel	0,00	48.300.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	2.000.000,00	10.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**213.233.000,00**	**408.150.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	5.733.000,00	6.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	30.000.000,00	41.050.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12 bulan	15.000.000,00	20.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	5.000.000,00	6.000.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 bulan	35.000.000,00	40.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	115.000.000,00	220.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya Arsip dinamis perangkat daerah	12 bulan	2.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**453.400.000,00**	**455.100.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 bulan	300.000,00	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	33.600.000,00	33.600.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya administrasi keuangan dan pembayaran honorarium PHL	168 Orang/bulan	419.500.000,00	419.500.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**113.080.000,00**	**140.980.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	32.700.000,00	32.700.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas	7 unit	55.380.000,00	83.280.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas	4 unit	15.000.000,00	15.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	4 unit	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	4 unit	5.000.000,00	5.000.000,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**32.700.000,00**	**34.200.000,00**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**26.700.000,00**	**26.700.000,00**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Data Profil dan Informasi tentang Kecamatan	1 dokumen	3.700.000,00	3.700.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**6.000.000,00**	**7.500.000,00**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya Jasa pelayanan administrasi terpadu kecamatan	12 bulan	6.000.000,00	7.500.000,00
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**1**	**58.000.000,00**	**65.200.000,00**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**22.000.000,00**	**25.200.000,00**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan Tempilang	1 kali	22.000.000,00	25.200.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**100%**	**36.000.000,00**	**40.000.000,00**
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya penyelenggaraan kelembagaan kemasyarakatan di kecamatan	12 bulan	36.000.000,00	40.000.000,00
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan	13.520.000,00	15.000.000,00
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan**	**1**	**100.000.000,00**	**136.000.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100.000.000,00**	**136.000.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan Peringatan dan perayaan HUT RI di Kecamatan	1 kegiatan	75.000.000,00	100.000.000,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya koordinasi forum pimpinan tingkat Kecamatan	12 bulan	25.000.000,00	36.000.000,00
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu**	**1**	**64.200.000,00**	**80.870.000,00**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**64.200.000,00**	**80.870.000,00**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya Dokumen RAPERDES yang baik dan benar	12 bulan	13.500.000,00	27.770.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan pembinaan pemerintahan desa	12 bulan	14.400.000,00	36.000.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan baik dan benar	18 dokumen	4.050.000,00	17.100.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	9 desa	32.250.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Kecamatan Tempilang				**3.705.133.000,00**	**4.185.300.000,00**

Urusan : Unsur Kewilayahan
OPD : Kecamatan Parittiga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**3.484.208.000,00**	**3.716.577.000,00**
A	**URUSAN KEWILAYAHAN**			**3.484.208.000,00**	**3.716.577.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**2.838.798.000,00**	**2.960.873.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**45.650.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	8.000.000,00	16.500.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.400.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	4.400.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Pengendalian dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	11.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun	3 Dokumen	6.000.000,00	9.350.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.910.000.000,00**	**1.913.750.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	2.750.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	5.500.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.000.000,00	5.500.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**9.350.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	9.350.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.500.000,00**	**2.750.000,00**
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Retrebusi Daerah	12 bulan	2.500.000,00	2.750.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**24.750.000,00**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.000.000,00	11.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**208.992.000,00**	**221.437.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Gedung kantor	12 Bulan	4.500.000,00	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	2.000.000,00	2.500.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik	12 Bulan	30.000.000,00	33.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15.000.000,00	16.500.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang- Undangan	12 Bulan	4.992.000,00	4.992.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	35.000.000,00	33.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	115.000.000,00	120.945.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya Arsip Dinamis Perangkat Daerah	12 Bulan	2.500.000,00	5.500.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**556.660.000,00**	**610.566.000,00**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman	12 Bulan	300.000,00	2.200.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Biaya Telepon, Listrik dan Internet	12 Bulan	35.500.000,00	39.050.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	216 OB	520.860.000,00	569.316.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**126.646.000,00**	**135.370.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	31.700.000,00	34.870.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	69.946.000,00	73.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	3 Unit	15.000.000,00	16.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	5.000.000,00	6.000.000,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**391.140.000,00**	**427.204.000,00**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**25.000.000,00**	**27.060.000,00**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksanya musrenbang kecamatan	1 kali	23.000.000,00	23.210.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	1 Dokumen	2.000.000,00	3.850.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilakasanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**354.140.000,00**	**396.044.000,00**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penbayaran Honorarium PHL danTersedianya Peralatan Kebersihan Pasar	144 OB	354.140.000,00	396.044.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**12.000.000,00**	**4.100.000,00**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya Jasa Administrasi Terpadu Kecamatan	12 Bulan	12.000.000,00	4.100.000,00
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan**	**100%**	**58.000.000,00**	**80.000.000,00**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**22.000.000,00**	**30.000.000,00**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan dan Terlaksananya Lomba Desa	1 Kali	22.000.000,00	30.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**100%**	**36.000.000,00**	**50.000.000,00**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kelembagaan Kemasyarakatan di Kecamatan	12 Bulan	36.000.000,00	50.000.000,00
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**28.520.000,00**	**30.000.000,00**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	12 Bulan	13.520.000,00	15.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan**	**100%**	**100.000.000,00**	**110.000.000,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100.000.000,00**	**110.000.000,00**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peringatan dan perayaan HUT RI di Kecamatan	1 kali	75.000.000,00	75.000.000,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	12 Bulan	25.000.000,00	35.000.000,00
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Menyusun APBDes tepat waktu**	**100%**	**67.750.000,00**	**108.500.000,00**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**67.750.000,00**	**108.500.000,00**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	TerFasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Bulan	15.000.000,00	30.500.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa	12 Bulan	16.000.000,00	15.500.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunnya LKPJ dan LPPD dengan baik dan benar	20 Dokumen	4.500.000,00	7.500.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Serentak	9 Desa	32.250.000,00	55.000.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Kecamatan Parittiga				**3.484.208.000,00**	**3.716.577.000,00**

Urusan : Unsur Pemerintahan Umum
OPD : Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**2.056.732.700,00**	**2.283.835.000,00**
A	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**2.056.732.700,00**	**2.283.835.000,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**2.056.732.700,00**	**2.283.835.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**26.000.000,00**	**11.000.000,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	4 Dokumen	8.000.000,00	2.200.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.200.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1 Dokumen	2.000.000,00	2.200.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan realisasi kinerja perangkat daerah yang	4 Dokumen	8.000.000,00	2.200.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	6.000.000,00	2.200.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.210.000.000,00**	**1.206.600.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	2.200.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	2.200.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	2.200.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.000.000,00**	**2.200.000,00**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	6.000.000,00	2.200.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**2.000.000,00**	**255.200.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	25 stel	-	23.100.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	2.000.000,00	2.200.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**332.934.300,00**	**283.500.000,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	12 Bulan	1.999.300,00	2.200.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis/ Bulan	1.300.000,00	1.430.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Jenis/ Bulan	14.996.300,00	16.500.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	11.999.810,00	13.200.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	2.640.000,00	2.970.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	22.998.890,00	25.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	275.000.000,00	220.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis perangkat daerah	12 Bulan	2.000.000,00	2.200.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**401.984.400,00**	**442.200.000,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman	12 Bulan	2.000.000,00	2.200.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12 Bulan	34.999.800,00	38.500.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	4.984.600,00	5.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor + JKK/JKN	144 OB	360.000.000,00	396.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**77.814.000,00**	**83.135.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	38.250.000,00	42.075.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit Mobil 7 Unit Motor	25.600.000,00	28.160.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	10.000.000,00	8.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	3.964.000,00	4.400.000,00
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Jumlah kasus penistaan terhadap simbol-simbol negara**	**0 kasus**	**642.416.350,00**	**738.500.000,00**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya penyantunan Keluarga Pejuang Terfasilitasinya kegiatan FPK Kab.bangka Barat	6 Kegiatan 26 Orang 1 Tahun	**642.416.350,00**	**738.500.000,00**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya penyantunan Keluarga Pejuang Terfasilitasinya kegiatan FPK Kab.bangka Barat	6 Kegiatan 26 Orang 1 Tahun	638.416.400,00	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kab. Bangka Barat		3.999.950,00	38.500.000,00
		Terlaksananya Monitoring dan Penguatan untuk seluruh OPD Gerakan Revolusi Mental	2 Dokumen		
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase ketidakhadiran masyarakat dalam pemilu/pemilukada**	**15%**	**1.511.655.100,00**	**915.772.000,00**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**100%**	**1.511.655.100,00**	**915.772.000,00**
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya penyaluran Hibah kepada Partai Politik	10 Partai Politik	1.444.785.000,00	880.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Berkas Parpol yang terverifikasi	10 Partai Politik	33.933.400,00	17.072.000,00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya laporan Perkembangan Politik daerah	4 Laporan	32.936.700,00	18.700.000,00
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Indeks kinerja ormas**	**180 skor**	**69.210.500,00**	**71.500.000,00**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100%**	**69.210.500,00**	**71.500.000,00**
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Pengawasan Ormas Tingkat Kab. Bangka Barat	100 Persen	36.934.200,00	55.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Terlaksananya Verifikasi Pendaftaran, Pendataan dan Pemantauan Ormas/LSM Kab. Bangka Barat	100 Persen	32.276.300,00	16.500.000,00
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Jumlah angka kriminalitas menurun**	**150 kasus**	**152.299.850,00**	**332.000.000,00**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Terlaksananya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**100%**	**152.299.850,00**	**332.000.000,00**
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya penyaluran hibah kepada FKUB	1 Tahun	100.000.000,00	166.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Tim P4GN Kabupaten Bangka Barat	1 kegiatan	52.299.850,00	166.000.000,00
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Jumlah konflik sosial menurun**	**10 kasus**	**296.586.750,00**	**431.900.000,00**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**100%**	**296.586.750,00**	**431.900.000,00**
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terfasilitasinya kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di daerah Terfasilitsinya kegiatan FKDM Kab. Bangka Barat	2 Dokumen 6 Kecamatan	46.272.100,00	46.900.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terdapatnya laporan penanganan gangguan konflik sosial Kabupaten Bangka Barat	3 Dokumen	67.520.500,00	220.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Terlaksananya pendataan keberadaan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	2 Dokumen	50.859.950,00	165.000.000,00
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	12 Kali	131.934.200,00	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung OPD Kesatuan Bangsa dan Politik				**4.728.901.250,00**	**4.773.507.000,00**

3.2 Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Pusat dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk keluar dari Middle Income Trap, dengan Recovery dan Reformasi Belanja antara lain peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (knowledge economy) pada bidang pendidikan, pemulihan dan penguatan sistem kesehatan pada bidang kesehatan, pemulihan dan penguatan program bantuan sosial serta berfokus pada program prioritas yang berorientasi hasil, efektif dan antisipatif.

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut :

a. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.
b. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
d. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
e. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.

f. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
g. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
h. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
i. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
j. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja operasi
   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
b. Belanja modal
   Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
c. Belanja tidak terduga; dan
   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
d. Belanja transfer
   Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 3.2.1 Rincian Palfon Anggaran Belanja

Tahun Anggaran 2022

Jenis Belanja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
BELANJA OPERASI	0,00	0,00	659.730.896.768,00
Belanja Pegawai	317.000.000.000,00	317.250.000.000,00	350.896.510.009,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	271.761.502.651,00
Belanja Bagi Hasil	2.845.900.000,00	2.632.213.729,45	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	114.016.167.736,00	110.316.499.264,00	0,00
Belanja Hibah	10.604.880.000,00	36.669.246.408,00	31.151.615.608,00
Belanja Bantuan Sosial	222.607.000,00	252.595.000,00	5.291.268.500,00
BELANJA LANGSUNG	517.146.469.198,00	515.328.861.869,00	0,00
BELANJA MODAL	0,00	0,00	90.774.154.770,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	200.000.000,00	4.850.000.000,00
BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	119.988.246.405,00

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2022, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2022. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatanPrioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2022. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara interaktif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2021 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan.Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Angaran 2022 sebagaimana Lampiran II.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Plafon Anggaran Sementara untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 991.025.868.660,00 yang terdiri dari belanja pegawai yang dialokasikan sebesar Rp. 351.068.384.254,- untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH, dan sebesar Rp. 639.957.484.406,00 dialokasikan untuk belanja barang jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja transfer, belanja tidak terduga dan serta belanja modal.

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

a. Penerimaan Pembiayaan daerah

Dalam rencana Penerimaan Pembiayaan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merencanakan sebesar Rp. 134.448.448.735,57 yang terdiri dari SiLPA sebesar Rp. 89.948.448.735,57 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 44.400.000.000,00 serta Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.

SiLPA dapat bersumber dari:

a. pelampauan penerimaan PAD;
b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
e. penghematan belanja;
f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembati pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rencana Pengeluaran Pembiayaan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merencanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal daerah terutama pada BUMD yang terdiri dari PD. Bank Sumsel Babel, PDAM, serta BUMD Bangka Barat Sejahtera.

Tabel 5.1 Rincian Palfon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
	PEMBIAYAAN	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	89.948.448.735,57
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	44.400.000.000,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**134.448.448.735,57**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**7.000.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**127.448.448.735,57**

BAB VI

PENUTUP

Pagu indikatif dalam PPAS merupakan pagu yang bersifat sementara. Untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti dana darurat, dana bencana alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus dan lain-lain serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah atas program/kegiatan/sub kegiatan tersebut sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan kewajiban untuk memberitahukan perihal tersebut kepada pimpinan DPRD yang nantinya akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Untuk selanjutnya apabila pagu indikatif pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat telah ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat pembahasan Rancangan APBD, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA antara kepala daerah bersama pimpinan DPRD.

Demikianlah PPAS APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 yang disusun untuk selanjutnya akan dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022.

Muntok, 31 Agustus 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

MARUDUR SARAGIH, S.E.
KETUA

H. OKTORAZSARI
WAKIL KETUA

MIYUNI ROHANTAP, S.H., M.H.
WAKIL KETUA

BUPATI BANGKA BARAT

H. SUKIRMAN, S.H.